



MENAVIGASI GUNCANGAN GLOBAL:

KETAHANAN EKONOMI INDONESIA
DI TENGAH KRISIS GEOPOLITIK,
ENERGI, DAN IKLIM

Editor:
Eisha Maghfiruha Rachbini

INDEF

MENAVIGASI GUNCANGAN GLOBAL: Menguji Ketahanan Ekonomi Indonesia

Penulis:

Ahmad Heri Firdaus

Annisa Utami Kusuma Negara

Riza Annisa Pujarama

Izzudin Al Farras Adha

Afaqa Hudaya

Agung Satria Permana

INDEF

Menavigasi Guncangan Global: Menguji Ketahanan Ekonomi Indonesia

Hak Cipta © *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*

Tim Penulis:

Ahmad Heri Firdaus

Annisa Utami Kusuma Negara

Riza Annisa Pujarama

Izzudin Al Farras Adha

Afaqa Hudaya

Agung Satria Permana

Editor:

Eisha Maghfiruha Rachbini

Tata letak dan desain sampul: Sarwo Edhie

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Jl. Batu Merah No.45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12510

Telp. 021-7901001 Fax. 021-79194018,

Email: indef@indef.or.id; website: <http://indef.or.id>

Juni, 2026

Ringkasan Eksekutif

Paruh pertama tahun 2026 ditandai oleh meningkatnya kompleksitas risiko global yang belum pernah terjadi sejak pandemi COVID-19. Dunia menghadapi tiga guncangan besar yang saling berinteraksi dan memperkuat dampaknya terhadap perekonomian internasional. Pertama, eskalasi konflik geopolitik, terutama pecahnya perang Amerika Serikat–Iran yang memicu gangguan pasokan energi global melalui terganggunya aktivitas perdagangan di Selat Hormuz. Jalur strategis yang menjadi urat nadi distribusi minyak bumi dan gas alam tersebut mengalami penurunan aktivitas secara drastis, sehingga mendorong lonjakan harga energi, peningkatan biaya logistik, dan ketidakpastian pasokan bahan baku industri.

Kedua, fragmentasi ekonomi global semakin menguat. Jika sebelumnya globalisasi dibangun atas dasar efisiensi biaya dan integrasi rantai pasok internasional, maka dinamika geopolitik terkini mendorong negara-negara untuk mengedepankan pertimbangan keamanan nasional, kesamaan ideologi, dan kedekatan kawasan dalam menjalin kerja sama ekonomi. Kecenderungan reshoring, friend-shoring, serta regionalisasi perdagangan berpotensi mengubah peta perdagangan dunia secara permanen. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan daya saing di tengah perubahan arsitektur ekonomi global tersebut.

Ketiga, ancaman perubahan iklim semakin nyata. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan potensi terjadinya El Niño pada paruh kedua 2026 yang berisiko memicu kekeringan, gangguan produksi pangan, peningkatan inflasi pangan, hingga tekanan terhadap ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Kombinasi guncangan geopolitik, ekonomi, dan iklim menjadikan tahun 2026 sebagai periode ujian ketahanan bagi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, ekonomi domestik masih mampu tumbuh relatif kuat. Namun di sisi lain, ruang fiskal yang semakin sempit, tekanan terhadap nilai tukar rupiah,

meningkatnya biaya energi dan impor, serta melemahnya sentimen dunia usaha menunjukkan bahwa fondasi ketahanan ekonomi perlu terus diperkuat agar mampu menghadapi guncangan yang berpotensi berlangsung lebih lama.

Peningkatan ketidakpastian global akibat perang, fragmentasi perdagangan, dan risiko iklim menciptakan lingkungan eksternal yang sangat menantang. Lonjakan harga minyak dunia di atas US\$ 100 per barel memperbesar risiko inflasi, meningkatkan beban subsidi energi, dan mengganggu rantai pasok industri domestik yang masih bergantung pada impor bahan baku. Bagi Indonesia yang merupakan net importir minyak, kondisi ini dapat mempersempit surplus perdagangan, meningkatkan tekanan terhadap rupiah, dan memperbesar risiko terhadap APBN.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, tertinggi dalam lebih dari satu dekade di luar masa pandemi. Namun, pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan faktor bulan puasa dan hari raya lebaran. Dimana ini biasa menjadi puncak pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan. Momentum bulan puasa dan lebaran menopang konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan sektor-sektor konsumsi. Di sisi lain pertumbuhan pada triwulan I 2026 juga sudah mulai ditopang oleh belanja pemerintah, termasuk percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di balik capaian tersebut, sejumlah indikator menunjukkan tekanan yang perlu diwaspadai. Realisasi pembiayaan anggaran meningkat tajam, ruang fiskal semakin terbatas, inflasi menunjukkan tren naik, rupiah terus melemah melampaui asumsi APBN, cadangan devisa menurun, dan surplus perdagangan menyusut secara signifikan.

Industri manufaktur Indonesia menghadapi tekanan biaya akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor dan energi fosil. Sekitar 71 persen impor Indonesia masih didominasi bahan baku dan barang penolong, sementara seperempat kebutuhan bahan baku industri manufaktur dipenuhi melalui impor.

Industri alat angkutan, tekstil, elektronik, mesin, kimia, farmasi, plastik, dan karet merupakan sektor yang paling rentan terhadap kenaikan harga input global. Tekanan biaya tersebut mulai tercermin pada kontraksi produksi

industri, pelemahan PMI manufaktur, serta menurunnya profitabilitas perusahaan. Apabila tekanan berlangsung berkepanjangan, terdapat risiko penurunan investasi, pengurangan kapasitas produksi, bahkan percepatan deindustrialisasi prematur.

Meskipun tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran masih menunjukkan perbaikan berdasarkan data terakhir, indikator berfrekuensi tinggi memberikan sinyal pelemahan daya beli masyarakat.

Indeks Keyakinan Konsumen mengalami penurunan, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Indeks Penjualan Riil juga melemah setelah momentum Ramadan dan Lebaran berakhir. Kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan karena tidak memperoleh perlindungan sosial seperti kelompok miskin, namun sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup dan risiko kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, tekanan ekonomi global berpotensi menggerus kesejahteraan masyarakat apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia memasuki periode guncangan global 2026 dengan modal ketahanan yang cukup rentan. Pertumbuhan ekonomi masih positif, sektor keuangan tetap stabil, inflasi masih terkendali, serta indikator kesejahteraan belum mengalami pemburukan yang signifikan.

Namun, ketahanan tersebut bukanlah sesuatu yang otomatis dan tidak terbatas. Ketahanan ekonomi Indonesia saat ini lebih menyerupai "resiliensi defensif", yakni kemampuan bertahan menghadapi tekanan jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh transformasi struktural yang mampu meningkatkan daya tahan dalam jangka panjang.

Ketergantungan pada impor energi dan bahan baku, terbatasnya ruang fiskal, lemahnya diversifikasi ekspor, serta tingginya sensitivitas terhadap sentimen global menjadi sumber kerentanan utama yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, momentum guncangan global saat ini harus dimanfaatkan sebagai katalis untuk mempercepat reformasi struktural ekonomi nasional.

Pada akhirnya, tahun 2026 merupakan momentum penting untuk menguji sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Tantangan

global memang semakin berat, tetapi dengan kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi jangka panjang, Indonesia tidak hanya mampu bertahan menghadapi guncangan, melainkan juga memanfaatkannya sebagai peluang untuk membangun fondasi pertumbuhan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Gambari	ix
Daftar Tabel	xiii
BAB 1. DINAMIKA PEREKONOMIAN GLOBAL DAN RISIKO UTAMA	1
1.1. Geopolitik dan Fragmentasi Global	1
1.2. Volatilitas Energi dan Komoditas	4
1.3. Risiko Iklim: El Niño, Kekeringan, dan Gangguan Produksi	6
1.4. Outlook Ekonomi Global Di Tengah Ketidakpastian	9
1.5. Gejolak Global dan Transmisinya ke Indonesia	13
BAB 2. KETAHANAN EKONOMI MAKRO DAN KESEJAHTERAAN	21
2.1. Uji Ketahanan Ekonomi Makro Indonesia	22
2.2. Menavigasi Guncangan Kesejahteraan	3
BAB 3. RISIKO GEOPOLITIK DAN PERUBAHAN IKLIM: MENGUJI KETAHANAN PANGAN	47
3.1. Dinamika Harga Pangan Global: Dari Stabilitas Menuju Era Volatilitas	48
3.2. Distribusi Pangan, Stabilitas Harga, dan Inflasi Pangan	52
3.3. Risiko Perubahan Iklim dan Dinamika Global terhadap Ketahanan Pangan Nasional	59
3.4. Analisis Komoditas Strategis Pangan dan Tantangan Hilirisasi Agribisnis	62
3.5. Rekomendasi Sektor Pangan	65
BAB 4. KETERGANTUNGAN ENERGI INDONESIA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL	71
4.1. Guncangan Global dan Beban Energi yang Kita Tanggung	71
4.2. Transisi Energi Tidak Bisa Ditunda Lagi	75
4.3. Sejauh Mana Kita Sudah Melangkah Menuju Transisi Energi?	76
4.3.1. Target Kelistrikan dan EBT	77
4.3.2. Mengapa Gap Ini Terjadi: Hambatan Struktural	79

4.4. Dilema Program Biodiesel: Trade off Pangan dan Energi
(Trade-off Pangan Versus Energi)

80

BAB 5. INDUSTRI MANUFAKTUR DI TENGAH BADAI GLOBAL:	
MENGUJI DAYA SAING DAN PROSPEK TRANSFORMASI EKONOMI	89
5.1. Tekanan Biaya Industri (Energi & Bahan Baku)	90
5.2. Risiko Deindustrialisasi Prematur	97
5.3. Investasi dan Urgensi Penguatan Struktur Industri	100
5.4. Struktur Ketergantungan Impor Bahan Baku	104
5.5. Implikasi dan Rekomendasi	105
BAB 6. DAMPAK DAN IMPLIKASI RISIKO GLOBAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI INDONESIA	107
6.1. Kerangka Asumsi Dalam Analisis Dampak Risiko Global	107
6.2. Model Ekonomi (Computable General Equilibrium) dan Skenario	109
6.3. Skenario Shock 1: Lonjakan Harga Minyak (USD 100–120/bbl)	111
BAB 7. PENUTUP: REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI KETAHANAN	121
7.1. Kesimpulan	121
7.2. Rekomendasi Kebijakan: Strategi Ketahanan Ekonomi	122
Daftar Pustaka	127

Daftar Gambar

Gambar 1.1. World Uncertainty Index, GDP weighted average, January 2008 to April 2026	2
Gambar 1.2. Geopolitical Risk Index Jun 2025- Present	3
Gambar 1.3. Jumlah Tankers dan Volume Perdagangan Melewati Selat Hormuz	5
Gambar 1.4. Perkembangan Harga Komoditas Dunia	6
Gambar 1.5. Harga Komoditas Serta Peristiwa El Nino dan La Nina	7
Gambar 1.6. Rata-rata Produksi Komoditas Pangan Global	8
Gambar 1.7. Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	9
Gambar 1.8. Proyeksi Dampak Peningkatan Harga Energi Terhadap Biaya Produksi dan Fiskal (APBN)	14
Gambar 1.9. Peranan Nilai Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari–April 2026	19
Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1-2023 s.d. Q1-2026	23
Gambar 2.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Pengeluaran Q1-2023 s.d. Q1-2026 (dalam persen; yoy)	24
Gambar 2.3. Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tiap Tahun Per Kuartal 1, 2023 s.d. 2026 (dalam persen)	25
Gambar 2.4. Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tiap Tahun Per Bulan Mei, 2023 s.d. 2026 (dalam persen)	26
Gambar 2.5. Realisasi Anggaran (Triliun) dan Pertumbuhan Realisasi Anggaran (%) Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026	28
Gambar 2.6. Tingkat inflasi, inflasi inti, inflasi harga yang diatur pemerintah, dan inflasi harga bergejolak di Indonesia, Januari 2024 s.d. Mei 2026 (dalam persen; yoy)	29
Gambar 2.7. Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar dan Real Effective Exchange Rate, Januari 2024 s.d. April 2026 (dalam persen; yoy)	31

Gambar 2.8. Tingkat Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan The Funds Rate Amerika Serikat, Januari 2024 s.d. Juni 2026 (dalam persen)	32
Gambar 2.9. Tingkat Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan Negara Selevel Lainnya di Dunia, Per 19 Juni 2026 (dalam persen)	32
Gambar 2.10. Tingkat pertumbuhan kredit dan rasio non-performing loan kredit bank komersial di Indonesia, Januari 2024 s.d. Maret 2026 (dalam persen; yoy)	33
Gambar 2.11. Cadangan Devisa (dalam miliar US\$) serta Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah (dalam bulan), Januari 2024 s.d. Maret 2026	34
Gambar 2.12. Neraca Perdagangan Total, Neraca Perdagangan Migas, dan Neraca Perdagangan Non Migas Indonesia, Januari 2024 s.d. April 2026 (dalam miliar US\$)	35
Gambar 2.13. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Keyakinan Konsumen Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga, Januari 2024 s.d. April 2026	37
Gambar 2.14. Indeks Penjualan Riil, Januari 2024 s.d. April 2026	38
Gambar 2.15. Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil, Januari 2024 s.d. April 2026 (dalam persen; yoy)	39
Gambar 2.16. Presentase Penduduk Miskin, September 2022 s.d. September 2025 (dalam persen)	40
Gambar 2.17. Presentase Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Provinsi, September 2025 (dalam persen)	41
Gambar 2.18. Rasio Gini Indonesia, September 2022 s.d. September 2025	42
Gambar 2.19. Rasio Gini Indonesia Berdasarkan Provinsi, September 2025	42
Gambar 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia, Februari 2024 s.d. Februari 2026 (dalam persen)	43
Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Berdasarkan Provinsi, Februari 2026 (dalam persen)	44
Gambar 3.1 Food Price Index	49
Gambar 3.2 Harga Cabai Rawit antar Daerah di Pasar Tradisional 19 Juni 2026 (Rp/Kilogram)	53
Gambar 3.3 Perubahan Harga Komoditas Pangan April 2026 (%; yoy)	55

Gambar 3.4	Pergerakan Harga Komoditas Pangan Utama di Bulan Ramadhan (% , m-to-m)	56
Gambar 3.5	Pergerakan Inflasi Volatile Food Januari - Mei 2026 (% , yoy)	57
Gambar 3.6	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Mei 2026 (% , m-to-m)	58
Gambar 3.7	Pergerakan Produksi Padi 2018-2025 (Ton)	60
Gambar 3.8	Neraca Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia 2020-2024 (Ribu US\$)	65
Gambar 4.1.	Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi	72
Gambar 4.2.	Perkembangan Perdagangan Minyak dan Gas (Neraca dan Pertumbuhan)	73
Gambar 4.3.	Subsidi Energi dan Kompensasi	74
Gambar 4.4.	Biaya Pembangkitan Diesel vs Harga Jual Rata-rata PLN (Rp/kWh)	76
Gambar 4.5.	Impor Metanol Indonesia Berdasarkan Pemasok Utama (Ribu US\$)	83
Gambar 5.1.	Keterkaitan Disrupsi Rantai Pasok Global dan Kenaikan Harga Komoditas	90
Gambar 5.2	Struktur Biaya Input Industri Manufaktur di Indonesia	91
Gambar 5.3.	Ketergantungan Industri pada Bahan Baku Impor	92
Gambar 5.4.	Perbandingan Pemakaian Energi Manufaktur di Indonesia	93
Gambar 5.5.	Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang	94
Gambar 5.6.	Perbandingan earning per share antar Industri di Indonesia	9
Gambar 5.7.	Pangsa PDB Industri Pengolahan di Indonesia 2010 - Triwulan I 2026	98
Gambar 5.8.	Pertumbuhan PDB Menurut 17 Sektor	100
Gambar 5.9.	Realisasi Investasi Menurut Sektor (dalam Triliun Rp)	101
Gambar 5.10.	Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia	102
Gambar 5.11.	Impor Indonesia Berdasarkan Golongan Penggunaan Barang (US\$ Miliar)	105

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Asia	12
Tabel 1.2.	Respon Kebijakan Pemerintah di ASEAN Atas Melonjaknya Harga Minyak	16
Tabel 4.1.	Kesenjangan Ambisi vs. Kapasitas Implementasi: Target Energi Indonesia	78
Tabel 4.2.	Linimasa Kebijakan Biodiesel	80
Tabel 4.3.	Analisis Trade-off Program Biodiesel B40/B50	86
Tabel 6.1.	Dampak Guncangan Ekonomi Global Terhadap Indikator Makro Ekonomi Indonesia (dalam persen)	117

BAB 1.

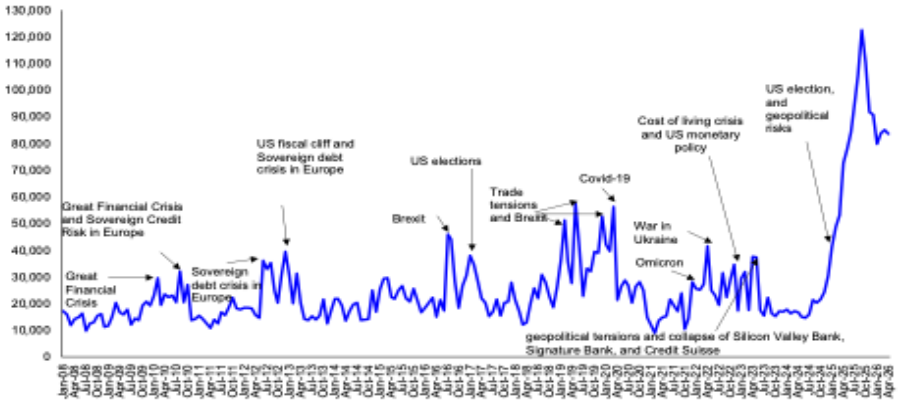
DINAMIKA PEREKONOMIAN GLOBAL DAN RISIKO UTAMA

Memasuki semester pertama 2026, ekonomi Global menghadapi tiga lapisan tekanan yang saling berinteraksi, yaitu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu guncangan pasokan energi terbesar dalam sejarah, fragmentasi tatanan perdagangan global akibat kebijakan tarif yang belum sepenuhnya mereda, dan risiko iklim yang diperkirakan terus meningkat frekuensinya. Hal ini membuat arah kebijakan ekonomi global berubah terutama dengan ketegangan geopolitik yang menyebabkan fragmentasi kubu antar pihak semakin nyata.

Bagi Indonesia, hal ini menambah tekanan baru pada ekonomi domestik yang sedang tidak baik-baik saja. Ketatnya ruang fiskal yang menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menahan *shock* rambatan dari peningkatan harga minyak bumi dan komoditas bahan baku industri. Di sisi lain, kebijakan moneter juga perlu sigap dalam menahan dampak rambatan dari inflasi dan tekanan nilai tukar.

1.1. Geopolitik dan Fragmentasi Global

Ketidakpastian global terus berlangsung pada level yang tinggi, meski sempat menunjukkan penurunan paska kebijakan tarif resiprokal Trump, namun demikian pada 28 Februari tren-nya kembali meningkat karena pecahnya perang AS dengan Iran. Dampak dari kebijakan tarif resiprokal terhadap fragmentasi global masih berjalan yang didasarkan pada kerjasama ekonomi dan efisiensi biaya, ketika perang AS dengan Iran pecah, fragmentasi global terakselerasi lebih cepat dengan alasan yang lebih mendasar yaitu kesamaan ideologi dan keamanan regional. Peta geopolitik global semakin jelas menguatkan fragmentasi global yang mempengaruhi ekonomi secara global. Negara-negara yang paling terdampak dari semua ini adalah negara-negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan *emerging market*, terutama berada di wilayah Asia dan Afrika.



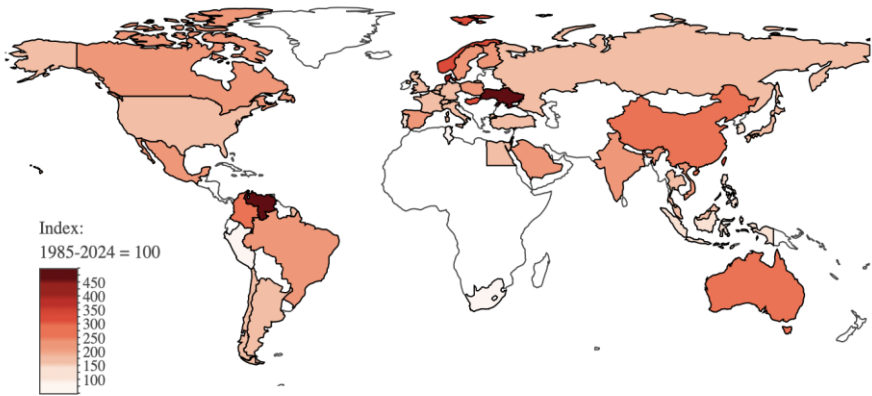
Gambar 1.1. World Uncertainty Index, GDP weighted average, January 2008 to April 2026

Sumber: <https://worlduncertaintyindex.com> (2026)

Pecahnya perang AS dengan Iran menjadi katalisator yang mempercepat fragmentasi global karena melibatkan banyak negara yang mendukung dua kubu berbeda. Di sisi lain, ekonomi mendapat guncangan yang signifikan salah satunya akibat penutupan Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan vital utamanya untuk jalur perdagangan bahan bakar energi utama yaitu minyak bumi dan gas alam.

Upaya mengamankan rantai pasok akibat kebijakan tarif resiprokal menjadi lebih kuat lagi sehingga banyak negara memperkuat hubungan bilateral terutama dengan negara-negara yang masih satu wilayah dibandingkan dengan hubungan multilateral dengan negara yang berbeda wilayah. Upaya memperkuat hubungan bilateral dengan negara yang dianggap lebih aman juga terjadi. Hal ini dapat memberikan tekanan pada negara-negara yang daya saing-nya lemah secara global.

Ketidakpastian global yang meningkat tajam dan bertengger di level tinggi sejak 2025 ini diprediksi belum akan membaik karena risiko geopolitik yang masih tinggi, ditambah lagi dengan fragmentasi global yang menguat. Situasi ini akan tentu akan berdampak luas terhadap perekonomian di berbagai kawasan termasuk Asia Tenggara khususnya Indonesia.



Gambar 1.2. Geopolitical Risk Index Jun 2025- Present

Sumber: https://www.matteoiacoviello.com/gpr_country.htm (2026)

Indeks Risiko Geopolitik yang dibangun Caldara and Iacoviello (2022) serta IMF (2026) menunjukkan bahwa risiko geopolitik meningkat pada dekade 2020-an dibandingkan dengan dekade 2000 dan dekade 2010. Lanskap indeks risiko geopolitik (Caldara and Iacoviello, 2022) menunjukkan bahwa wilayah yang risikonya tinggi adalah di wilayah Amerika Utara, Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Timur, dan Australia. Sementara itu dapat kita lihat bahwa peta geopolitik dengan konflik secara fisik yang terbuka yang saat ini tengah berlangsung diantaranya Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, dan AS-Iran, meskipun pada Juni ini sudah ada upaya perdamaian yang kian nyata dari AS-Iran namun dampaknya terhadap iklim perekonomian dunia masih harus dibuktikan.

Kendati demikian perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tekanan di pasar energi global mulai mereda seiring tercapainya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran pada pertengahan Juni 2026. Kesepakatan tersebut belum merupakan perjanjian damai permanen, melainkan kerangka transisi menuju penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh. Beberapa poin utama yang disepakati meliputi penghentian permusuhan selama 60 hari, normalisasi kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, serta dimulainya negosiasi lanjutan mengenai program nuklir Iran dan pelonggaran sanksi ekonomi secara bertahap. Namun, implementasi seluruh komitmen tersebut masih bergantung pada keberhasilan proses

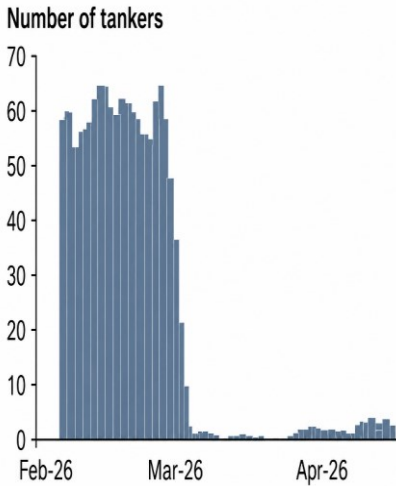
verifikasi dan negosiasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung dalam dua bulan ke depan.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan ruang perbaikan (*temporary relief*) terhadap tekanan harga energi, tetapi belum menghilangkan risiko struktural yang dihadapi. Pasalnya, stabilisasi harga minyak masih sangat bergantung pada keberlanjutan implementasi MoU tersebut. Apabila proses negosiasi gagal atau eskalasi geopolitik kembali terjadi, gangguan terhadap Selat Hormuz berpotensi muncul kembali dan mendorong harga minyak ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan ketergantungan impor minyak Indonesia yang masih mendekati satu juta barel per hari, kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional tetap rentan terhadap dinamika geopolitik eksternal dan memerlukan strategi mitigasi jangka panjang yang melampaui respons fiskal jangka pendek.

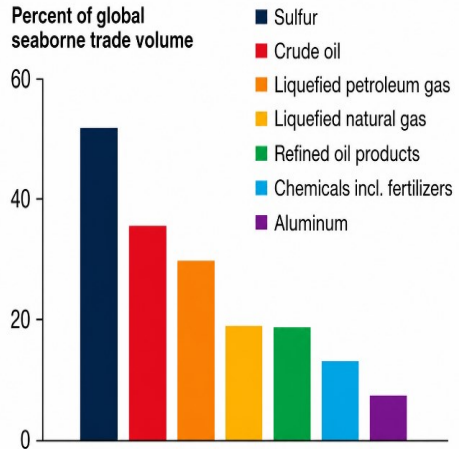
1.2. Volatilitas Energi dan Komoditas

Pecahnya perang AS-Iran menyebabkan penutupan Selat Hormuz memberikan dampak pada tingginya volatilitas harga energi dan komoditas. Hal ini terjadi karena Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan utama terutama untuk pasokan minyak bumi dan gas alam menuju Asia dan sebagian kecil Eropa. Akibat penutupan Selat Hormuz, negara-negara di Asia Tenggara akan mendapat dampak salah satunya berupa terbatasnya aliran supply energi dan bahan baku industri. Bahkan beberapa negara di ASEAN telah mengumumkan bahwa negaranya mengalami kesulitan pasokan seperti Thailand dan Filipina.

Menurut World Bank (2026) bahwa per April 2026 terjadi penurunan frekuensi lalu lintas tanker yang melewati Selat Hormuz. Pada Februari-Maret 2026 jumlah tanker yang melintasi selat Hormuz rata-rata sekitar 60 tanker. Jumlah ini menyusut menjadi rata-rata kurang dari 10 tanker sejak pertengahan Maret hingga April 2026. World Bank mencatat Selat Hormuz sebagai salah satu jalur minyak paling strategis di dunia dan menunjukkan bahwa konflik regional dapat menekan lalu lintas maritim secara signifikan. Dalam laporan sebelumnya, World Bank juga mencatat penurunan aktivitas maritim di Selat Hormuz akibat spillover konflik di kawasan Timur Tengah.



(a) Jumlah Tankers yang Melewati Selat Hormuz



(b) Volume Perdagangan Maritim yang Melewati Selat Hormuz

Gambar 1.3 Jumlah Tankers dan Volume Perdagangan Melewati Selat Hormuz

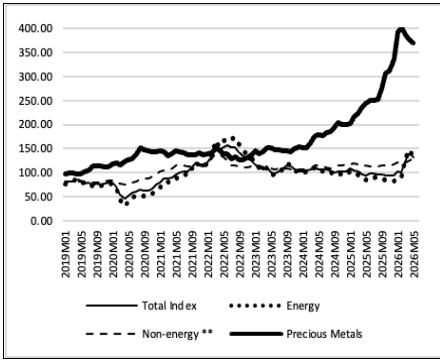
Sumber: World Bank (2026)

Note : Gambar (b), grafik batang dari kiri ke kanan berturut-turut adalah Sulfur, Crude oil, Liquefied petroleum gas, Liquefied natural gas, Refined oil products, Chemicals incl.fertilizer, Alumunium.

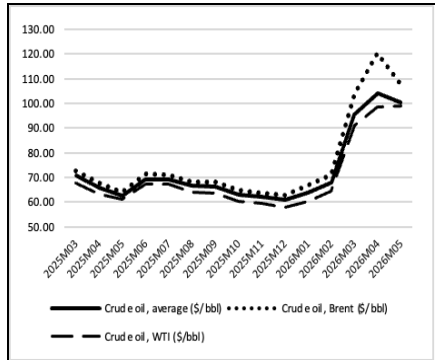
Menurut International Energy Agency (IEA), pada tahun 2025 sekitar 25 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Dari besarnya lalu lintas perdagangan minyak yang melewati selat tersebut, 80 persen diantaranya menuju pasar Asia. Sehingga penutupan Selat Hormuz akan memberikan dampak yang besar terutama pada Asia. Selanjutnya hal tersebut akan berdampak pada berbagai negara di dunia karena Asia yang merupakan bagian dari rantai pasok produksi dan bahkan pusat produksi (pada beberapa sektor industri) dunia.

Gangguan pada rantai pasok akibat ketegangan di Selat Hormuz menyebabkan tersendatnya aliran berbagai komoditas yang berimplikasi pada peningkatan harga. Indeks harga komoditas menunjukkan bahwa harga rata-rata mengalami tren kenaikan terutama pada kelompok logam mulia terutama didorong oleh harga emas, sementara itu harga minyak rata-rata masih tetap tinggi pada 100.43 US\$/barrel per Mei 2026. Belum tercapainya kesepakatan

antara AS dengan Iran hingga Mei 2026, menyebabkan proyeksi harga bahan bakar energi masih akan bertengger tinggi. Namun demikian, memasuki Juni 2026, AS-Iran kembali melakukan upaya kesepakatan damai kembali dan harga minyak mentah dunia turun menyentuh angka 80 US\$/barrel pada 19 Juni 2026.



(a) Indeks Harga Komoditas



(b) Perkembangan Harga Minyak Dunia

Gambar 1.4 Perkembangan Harga Komoditas Dunia

Sumber: World Bank (2026)

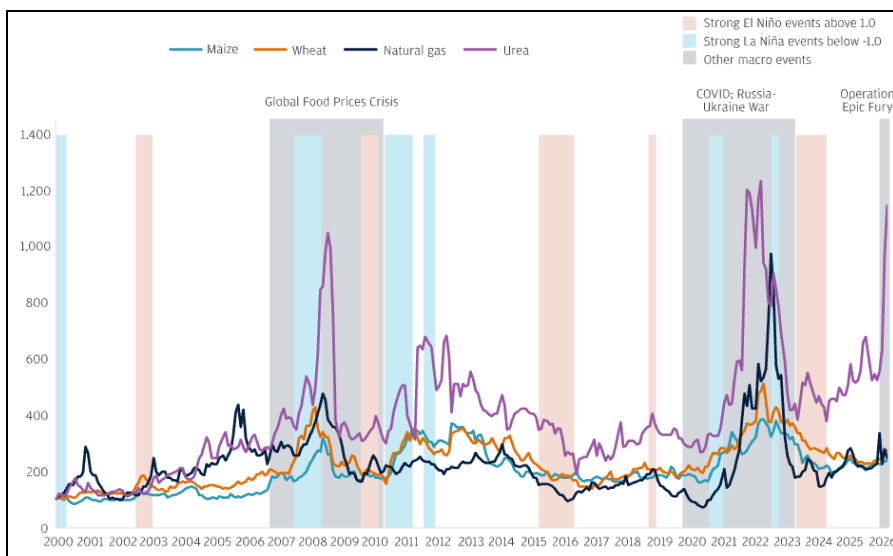
1.3 Risiko Iklim: El Niño, Kekeringan, dan Gangguan Produksi

Di tengah ketegangan geopolitik dan tingkat ketidakpastian yang masih tinggi, dunia juga dihadapkan pada risiko perubahan iklim yang semakin serius. Saat ini dunia tengah bersiap menghadapi El Niño, fase hangat dari pola iklim El Niño-Southern Oscillation (ENSO) yang melibatkan fluktuasi suhu laut di Pasifik khatulistiwa tengah dan timur, ditambah dengan perubahan di atmosfer di atasnya (World Meteorological Organization, 2026).

Menurut WMO, Fenomena El Niño mempengaruhi pola suhu dan curah hujan di berbagai wilayah dan biasanya memiliki efek pemanasan pada iklim global. WMO juga mengumumkan bahwa El Niño kemungkinan besar akan terjadi pada Juni-Agustus 2026. Menurut WMO, akan terjadi peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Amerika Selatan bagian selatan, Amerika Serikat bagian selatan, sebagian wilayah Tanduk Afrika dan Asia Tengah, serta kondisi yang lebih kering di Amerika Tengah, Amerika Selatan bagian utara, Karibia, Australia, Indonesia, dan sebagian wilayah Asia Selatan.

Perubahan cuaca ekstrem, baik itu peningkatan curah hujan maupun kekeringan dapat menjadi ancaman bagi produksi tanaman pangan. Produksi

tanaman pangan dapat berkurang karena bencana hidrometeorologi basah (banjir, longsor, puting beliung, dan lain-lain) maupun bencana hidrometeorologi kering (kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain). Penurunan produksi pangan dapat mendorong lonjakan harga. Penutupan Selat Hormuz ikut memicu gangguan pada produksi pangan global karena jalur distribusi urea nitrogen terhambat dan mendorong peningkatan harga pupuk urea, sehingga dapat mendorong penurunan produksi pangan global dan mendorong harga pangan global. Gambar 1.5 menunjukkan bahwa ketika harga gas alam (bahan baku pupuk) meningkat, maka harga pupuk urea ikut meningkat yang diikuti oleh peningkatan harga komoditas pangan.



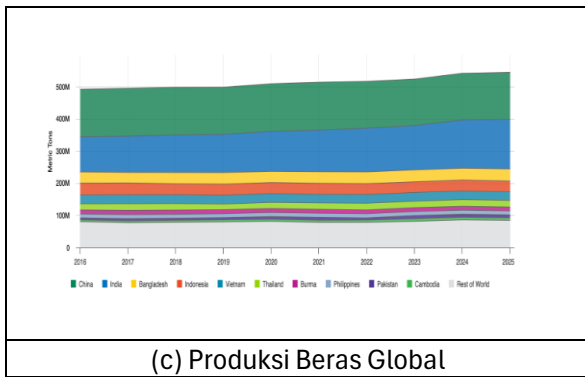
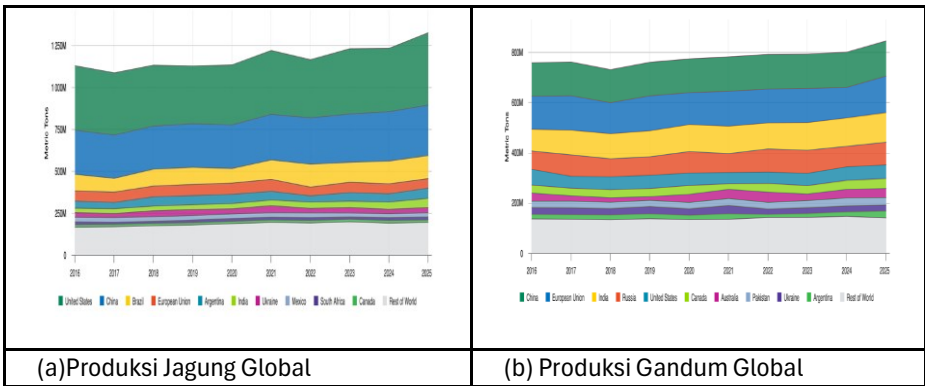
Gambar 1.5 Harga Komoditas Serta Peristiwa El Nino dan La Nina

Sumber: <https://www.jpmorgan.com/insights/sustainability/climate/food-security-under-pressure> (2026)

Note: Maize-Jagung, Wheat-Gandum, Natural Gas-Gas Alam, Urea-Pupuk Urea

Sementara itu produksi komoditas pangan dunia seperti beras, jagung dan gandum dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Hal ini terlepas dari terjadinya El Nino di 2022-2023 dan La Nina di 2024. Meskipun demikian, negara-negara produsen pangan dunia perlu memitigasi jika dampak El Nino di 2026 yang diprediksi lebih berat dibandingkan sebelumnya.

Menurut FAO (2026), Produksi tiga pangan pokok dunia (beras, jagung, dan gandum) masih berada pada tingkat tinggi, tetapi semakin rentan terhadap gangguan iklim. Risiko utamanya mencakup kekeringan, gelombang panas, banjir, perubahan pola hujan, serta fenomena El Niño/La Niña. Karena ketiga komoditas ini menjadi basis pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri, gangguan produksi di negara produsen besar dapat segera mendorong kenaikan harga pangan internasional. FAO menilai bahwa kondisi pasokan sereal global masih relatif memadai karena produksi dan stok meningkat, tetapi risiko iklim tetap menjadi faktor utama yang dapat mengubah proyeksi secara cepat.



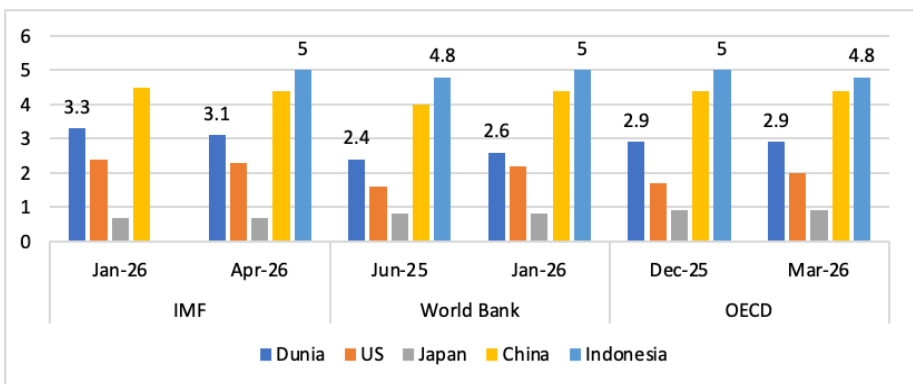
Gambar 1.6 Rata-rata Produksi Komoditas Pangan Global
 Sumber: <https://www.fas.usda.gov/data/production> (2026)

1.4. Outlook Ekonomi Global Di Tengah Ketidakpastian

Pada April 2026, IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,3 persen di Januari 2026 menjadi 3,1 persen. Hal ini terjadi karena disrupsi rantai pasok global akibat perang Iran-AS. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan beberapa faktor seperti harga komoditas global, ekspektasi inflasi, dan sentimen pada pasar keuangan. Peningkatan harga komoditas dapat mendorong peningkatan biaya produksi, sehingga dapat menekan pertumbuhan terutama pada negara-negara peng-eksport.

Lebih lanjut, tingginya harga bahan bakar energi akan menekan pertumbuhan terutama bagi negara peng-impor. Lebih jauh lagi dampaknya pada penurunan konsumsi lewat peningkatan inflasi, kemudian tekanan pada pengeluaran pemerintah terutama pada subsidi bahan bakar energi dan potensi penurunan pajak, serta tekanan pada investasi karena ketidakpastian dan sentimen pasar.

Sementara itu, OECD masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,9 persen. Koreksi perlambatan pertumbuhan terutama di kawasan Eropa karena harga energi yang tinggi. Sementara itu World Bank belum mengeluarkan proyeksi ekonomi global setelah Januari 2026, namun mengeluarkan proyeksi terbaru untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik pada April 2026. Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan melambat di 2026 dari 4,3 persen pada Oktober 2025 menjadi 4,2 persen.



Gambar 1.7. Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia memperlihatkan bahwa Asia masih akan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi global hingga 2027. Namun, pertumbuhan ekonomi kawasan secara umum diperkirakan mengalami moderasi, dari 4,4 persen pada 2026 menjadi 4,2 persen pada 2027. Perlambatan ini mencerminkan meningkatnya tekanan dari ketidakpastian geopolitik, pelemahan perdagangan global, fluktuasi harga energi, fragmentasi rantai pasok, serta penyesuaian kebijakan ekonomi di berbagai negara.

Kelompok Asia maju (Advanced Asia) diproyeksikan mengalami perlambatan cukup signifikan, dengan pertumbuhan turun dari 2,0 persen pada 2026 menjadi 1,6 persen pada 2027. Jepang diperkirakan tumbuh 1,7 persen pada 2026, namun melambat tajam menjadi hanya 0,6 persen pada 2027. Korea Selatan diproyeksikan masih tumbuh relatif stabil dari 1,9 persen menjadi 2,1 persen, terutama ditopang oleh sektor teknologi, elektronik, dan semikonduktor. Australia juga diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan dari 2,0 persen pada 2026 menjadi 3,7 persen pada 2027, sementara Taiwan mengalami perlambatan dari 5,2 persen menjadi 3,0 persen seiring normalisasi permintaan global terhadap produk teknologi tinggi.

Singapura diproyeksikan tumbuh 3,5 persen pada 2026 dan melambat menjadi 2,7 persen pada 2027, sedangkan Hong Kong SAR tumbuh stabil di kisaran 2,4 persen. Perlambatan di negara-negara Asia maju menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih dibayangi oleh lemahnya permintaan eksternal, tingginya ketergantungan pada ekspor, serta perlambatan ekonomi mitra dagang utama, khususnya China dan Amerika Serikat.

Di sisi lain, kelompok Asia berkembang dan emerging Asia masih menjadi sumber utama pertumbuhan kawasan. Pertumbuhan kelompok ini diproyeksikan mencapai 4,9 persen pada 2026 dan sedikit melambat menjadi 4,8 persen pada 2027. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Asia maju, menunjukkan bahwa negara-negara berkembang Asia masih memiliki daya dorong ekonomi yang kuat melalui konsumsi domestik, investasi

infrastruktur, urbanisasi, bonus demografi, dan pengembangan industri manufaktur.

China diproyeksikan tumbuh 4,4 persen pada 2026 dan melambat menjadi 4,0 persen pada 2027. Perlambatan China menjadi perhatian penting karena negara tersebut masih berperan besar dalam perdagangan, investasi, dan rantai pasok regional. Pelemahan ekonomi China berpotensi mengurangi permintaan terhadap komoditas, bahan baku, dan produk manufaktur dari negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia.

India tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di Asia. Ekonomi India diproyeksikan tumbuh 6,5 persen pada 2026 dan tetap berada pada level yang sama pada 2027. Pertumbuhan India didorong oleh konsumsi domestik yang besar, pembangunan infrastruktur, ekspansi sektor digital, serta penguatan industri manufaktur. Posisi India semakin strategis dalam konteks diversifikasi rantai pasok global, terutama ketika banyak perusahaan internasional mulai mengurangi ketergantungan pada satu negara pemasok.

Di sisi lain, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan dapat mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil, yaitu 5,0 persen pada 2026 dan meningkat tipis menjadi 5,1 persen pada 2027. Stabilitas pertumbuhan tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh konsumsi domestik, investasi, pembangunan infrastruktur, serta peluang hilirisasi sumber daya alam. Namun demikian, Indonesia tetap menghadapi risiko dari perlambatan ekonomi China, ketidakpastian harga komoditas, pelemahan ekspor, serta tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Di kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 4,1 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 4,4 persen pada 2027. Vietnam diperkirakan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu 7,1 persen pada 2026 dan 6,7 persen pada 2027, didukung oleh ekspor manufaktur, investasi asing langsung, dan keterlibatan yang kuat dalam rantai pasok global. Filipina diproyeksikan tumbuh dari 4,1 persen pada 2026 menjadi 5,8 persen pada 2027, menunjukkan potensi pemulihan yang cukup kuat.

Malaysia diperkirakan tumbuh 4,7 persen pada 2026 dan melambat menjadi 4,3 persen pada 2027, sedangkan Thailand menghadapi

pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 1,5 persen pada 2026 dan 2,1 persen pada 2027. Perlambatan Thailand mencerminkan tantangan struktural, lemahnya konsumsi domestik, serta ketergantungan terhadap sektor pariwisata dan ekspor.

Tabel 1.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Asia

	Real GDP		
	2025	Projections	
		2026	2027
Asia	5.0	4.4	4.2
Advanced Asia	2.5	2.0	1.6
Japan	1.2	0.7	0.6
Korea	1.0	1.9	2.1
Singapore	5.0	3.5	2.7
Emerging and Developing Asia	5.5	4.9	4.8
China	5.0	4.4	4.0
India ⁴	7.6	6.5	6.5
Indonesia	5.1	5.0	5.1
Thailand	2.4	1.5	2.1
Vietnam	8.0	7.1	6.7
Malaysia	5.2	4.7	4.3
Philippines	4.4	4.1	5.8
Other Emerging and Developing Asia⁵	3.4	4.2	4.0
Memorandum			
ASEAN-5 ⁶	4.5	4.1	4.4
Emerging Asia ⁷	5.6	5.0	4.8

Sumber: IMF (2026)

⁴ Data and forecasts are presented on a fiscal year basis and output growth is based on GDP at market prices. Fiscal year data for India are mapped to calendar years as follows: FY2026/27 = 2026, etc.

⁵ Other Emerging and Developing Asia includes Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, Kiribati, Lao P.D.R., Maldives, Marshall Islands, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Sri Lanka, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu.

⁶ ASEAN-5 includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam.

⁷ Emerging Asia includes ASEAN-5, China, and India.

Secara keseluruhan, proyeksi 2026–2027 menunjukkan bahwa Asia masih akan menjadi kawasan dengan pertumbuhan relatif tinggi, tetapi dengan pola pertumbuhan yang semakin tidak merata. Negara-negara seperti India, Vietnam, Indonesia, dan Filipina diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan baru, sementara China mengalami perlambatan struktural dan negara-negara Asia maju menghadapi pertumbuhan yang lebih rendah. Dalam kondisi tersebut, Indonesia perlu memperkuat produktivitas industri, memperluas diversifikasi ekspor, mempercepat hilirisasi, serta meningkatkan ketahanan rantai pasok agar mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah ketidakpastian global.

1.5. Gejolak Global dan Transmisinya ke Indonesia

a. Harga Energi dan Dampaknya ke Sektor Industri, APBN, Serta Penduduk Berpendapatan Menengah

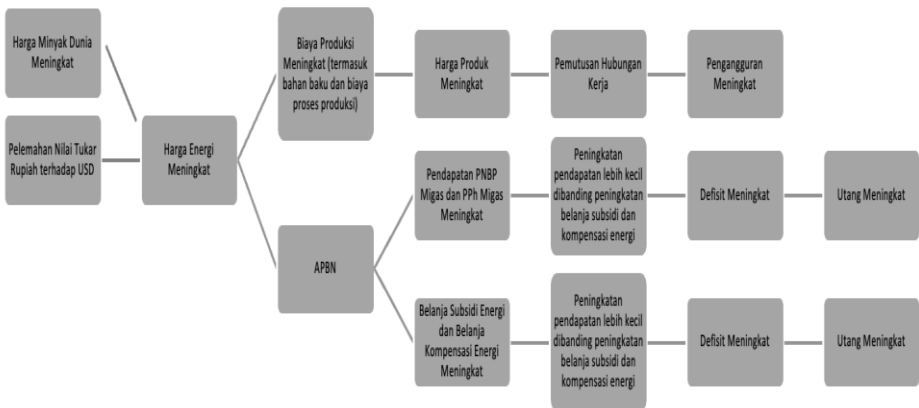
Peningkatan harga energi di tingkat dunia akan mendorong lonjakan biaya yang harus ditanggung oleh dunia bisnis, baik dalam produksi barang maupun jasa. Secara umum peningkatan harga energi akan juga meningkatkan biaya produksi (termasuk harga bahan baku yang sebagian besar masih impor dan biaya proses produksi) dan biaya operasional untuk pusat bisnis. Peristiwa tersebut diperparah dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang berimplikasi pada naiknya harga barang-barang impor baik produk energi maupun non energi. Hal ini dapat mendorong inflasi yang lebih tinggi dan tekanan pada konsumsi masyarakat.

Kenaikan biaya impor secara langsung meningkatkan harga bahan baku, komponen, mesin, dan barang modal yang digunakan oleh industri domestik. Industri manufaktur seperti elektronik, otomotif, kimia, farmasi, tekstil, mesin, alat kesehatan, dan industri makanan-minuman umumnya masih menggunakan input impor dalam proses produksinya. Ketika harga input impor meningkat, perusahaan menghadapi kenaikan biaya produksi. Perusahaan kemudian memiliki tiga pilihan utama yakni menaikkan harga jual produk, mengurangi margin keuntungan, atau menekan biaya produksi lainnya. Dalam banyak kasus, perusahaan akan melakukan kombinasi dari ketiga strategi tersebut. Akibatnya, daya saing industri dapat menurun,

terutama bagi sektor yang berorientasi ekspor. Produk Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan produk dari negara pesaing yang memiliki akses bahan baku dan komponen dengan harga lebih rendah.

Salah satu upaya untuk menekan biaya produksi adalah melakukan efisiensi tenaga kerja melalui pengurangan jam kerja, tidak memperpanjang kontrak, atau penyesuaian jumlah pekerja. Pemutusan hubungan kerja juga seringkali menjadi hal yang sulit dihindari bagi perusahaan, apalagi di tengah masifnya mekanisasi dan digitalisasi (termasuk penggunaan AI).

Lebih lanjut, kondisi fiskal dalam APBN harus bersiap dengan lonjakan subsidi energi dan belanja kompensasi energi yang merupakan bagian dari Belanja Lain-lain. Hal ini perlu diantisipasi dengan baik karena ruang fiskal APBN 2026 sangat terbatas di tengah lonjakan belanja dan penurunan perpajakan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi penggunaan BBM dalam negeri, namun dampaknya belum terasa. Harga bahan bakar pertalite ditegaskan pemerintah tidak akan berubah hingga akhir tahun 2026, yang artinya pemerintah perlu mempersiapkan pundi-pundi subsidi di tengah depresiasi rupiah terus terjadi. Maka beban subsidi energi berpotensi akan meningkat karena harga minyak dunia yang tinggi ditambah dengan depresiasi rupiah.



Gambar 1.8. Proyeksi Dampak Peningkatan Harga Energi Terhadap Biaya Produksi dan Fiskal (APBN)

Sumber: INDEF (2026)

Lonjakan biaya yang disebabkan karena faktor harga energi, depresiasi dan perubahan iklim tentu akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun perlu menyadari bahwa dari tiga klasifikasi penduduk berdasarkan pendapatan, golongan pendapatan menengah (terutama pekerja) merupakan yang paling rentan terhadap peningkatan harga energi. Penduduk berpendapatan menengah ini tidak mendapat perlindungan dan bantuan sosial, sehingga pendapatannya akan tergerus oleh peningkatan harga energi yang diikuti kenaikan harga-harga lainnya. Penduduk berpendapatan menengah ini juga mempunyai risiko tinggi untuk di-PHK karena peningkatan biaya produksi yang harus dihadapi sektor industri manufaktur, terutama. Kebijakan yang diambil pemerintah sejauh ini belum merangkul penduduk berpendapatan menengah yang menjadi tulang punggung penerimaan pajak pemerintah.

Lebih lanjut, respon kebijakan terhadap peningkatan harga energi oleh negara-negara di dunia cukup bervariasi. Pemerintah Indonesia berfokus pada penduduk berpendapatan rendah dengan menjaga subsidi energi. Sementara itu Malaysia melakukan pembebasan pajak pada UMKM dan Singapura memberikan potongan PPh perusahaan untuk 2026.

Gejolak global pada 2026 memperlihatkan bahwa perdagangan internasional tidak lagi hanya dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan harga komoditas, tetapi juga oleh konflik geopolitik, kebijakan tarif, gangguan jalur pelayaran, kenaikan harga energi, serta fragmentasi rantai pasok global. Ketegangan di Timur Tengah, gangguan di jalur pelayaran strategis, dan meningkatnya proteksionisme perdagangan berpotensi menaikkan biaya pengiriman, premi asuransi, waktu tempuh logistik, serta harga bahan baku dan barang antara. IMF menilai bahwa pengalihan rute kapal tanker dan kontainer telah meningkatkan ongkos angkut serta asuransi, sekaligus memperpanjang waktu pengiriman berbagai komoditas dan input produksi.

Bagi Indonesia, transmisi pertama terjadi melalui kenaikan biaya impor. Struktur industri nasional masih bergantung pada impor bahan baku, barang antara, komponen, mesin, dan teknologi. Ketika tarif global meningkat, jalur logistik terganggu, atau harga energi melonjak, biaya impor akan naik. Kenaikan tersebut kemudian diteruskan ke biaya produksi industri domestik, terutama pada sektor elektronik, otomotif, kimia, farmasi, mesin, tekstil, plastik, alat kesehatan, serta industri pengolahan yang menggunakan bahan baku impor.

Tabel 1.2. Respon Kebijakan Pemerintah di ASEAN Atas Melonjaknya Harga Minyak

Brunei
Membatasi pembelian bahan bakar untuk kendaraan asing dan kendaraan domestik yang meninggalkan negara.
Kamboja
Rapat daring untuk pegawai negeri sipil. Anjuran pembatasan suhu pendingin pada 24-25 derajat di kantor-kantor pemerintah. Mengurangi perjalanan dinas jarak jauh dan hindari perjalanan pada jam sibuk. Perusahaan listrik milik negara mendesak masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik. Pemotongan PPN bahan bakar. Peningkatan pengawasan pemerintah untuk mencegah praktik penentuan harga bahan bakar secara berlebihan. Kurangi tarif impor kendaraan listrik, kompor listrik, peralatan rumah tangga, dan energi terbarukan.
Indonesia
Bekerja dari rumah pada hari Jumat untuk pegawai negeri sipil. Batasi perjalanan pejabat publik. Dorong strategi penghematan energi di gedung-gedung kantor pemerintah. Percepat program biodiesel dan batasi pembelian bahan bakar bersubsidi. Tingkatkan anggaran negara untuk subsidi bahan bakar, termasuk tabung LPG 3kg bersubsidi (dan berpotensi CNG). Naikkan biaya tambahan bahan bakar penerbangan tetapi kurangi PPN pada tiket kelas ekonomi. Mempercepat konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi sepeda motor listrik. Mempercepat penerapan kompor listrik untuk mengurangi konsumsi LPG.. Mempercepat konversi pembangkit listrik berbahan bakar diesel menjadi tenaga surya. Secara bertahap mengganti LPG dengan CNG produksi dalam negeri.
Laos
Kerja jarak jauh dan sistem shift bergilir untuk pegawai negeri sipil. Mempersingkat hari bersekolah dari lima menjadi tiga hari setiap minggu. Meminta masyarakat untuk menghemat bahan bakar dalam kampanye. Mendorong penggunaan transportasi umum. Kurangi bea cukai bahan bakar dan turunkan bea impor bahan bakar. Alokasikan dana dari program subsidi untuk menstabilkan harga. Rencanakan untuk menghubungkan sistem Bus Rapid Transit dengan stasiun kereta api dan bandara dengan lebih baik. Turunkan biaya dan pajak pada kendaraan listrik. Dorong penggunaan truk listrik. Promosikan infrastruktur pengisian daya. Promosikan penggunaan energi terbarukan di kalangan petani dan bisnis.
Malaysia
Kerja jarak jauh untuk pegawai negeri sipil. Dorong dewan lokal untuk membatasi suhu hingga 24 derajat. Batasi perjalanan pejabat publik, izinkan dan dorong jalur penerbangan yang lebih langsung. Instruksikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan energi bangunan. Pasang panel surya dan lampu LED. Memberikan paket dukungan keuangan untuk usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) termasuk jaminan pinjaman pemerintah, keringanan regulasi, serta pembebasan pajak dan impor. Merekomendasikan agar pemerintah daerah memasang lampu LED. Merekomendasikan agar pemerintah daerah memasang panel surya fotovoltaik.
Myanmar
Wajibkan kerja jarak jauh pada hari Rabu untuk pejabat publik. Bergantian hari mengemudi. Batasi penggunaan bahan bakar dengan kuota berdasarkan ukuran mesin. Perkenalkan skema tukar tambah kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) dengan kendaraan listrik. Kaitkan impor kendaraan listrik dengan penghapusan kendaraan berbahan bakar fosil.
Philippine
Minggu kerja 4 hari untuk pejabat publik. Anjuran pembatasan suhu hingga 24 derajat di kantor-kantor publik. Batasi perjalanan pemerintah yang tidak penting. Nyatakan keadaan darurat energi nasional. Lembaga publik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan konsumen untuk membatasi permintaan. Sediakan perjalanan bus gratis untuk siswa dan pekerja di kota-kota terpencil. Berikan subsidi bahan bakar untuk pengemudi bus, taksi, pengantar barang, pengemudi ojek online, dan pekerja transportasi, termasuk dengan bermitra dengan bank milik negara. Berikan subsidi bahan bakar dan pupuk untuk petani dan perikanan. Berikan subsidi bahan bakar untuk kendaraan angkutan umum di seluruh negeri. Kurangi pajak cukai bahan bakar dan tawangkan pajak cukai LPG. Intensifkan audit energi di seluruh kantor pemerintahan.
Singapura
Anjurkan menaikkan titik pengaturan suhu AC hingga 25 derajat, prioritaskan penggunaan kipas angin. Ajak masyarakat untuk menghemat energi dan menggunakan peralatan yang efisien. Luncurkan kampanye "Mari Hemat Energi Bersama". Dorong penggunaan skema voucher iklim. Dorong pengurangan penggunaan mobil pribadi, peningkatan penggunaan transportasi umum, dan berbagi kendaraan. Meningkatkan potongan pajak penghasilan perusahaan untuk tahun 2026. Memberikan bantuan tunai umum kepada rumah tangga. Memberikan dukungan tambahan yang ditargetkan untuk pengemudi taksi dan platform lainnya. Membantu sementara menutupi kenaikan biaya untuk layanan bis penting. Perluas hibah efisiensi energi ke semua sektor.
Thailand
Dorong kerja jarak jauh dan konferensi video di semua sektor publik dan swasta. Hindari perjalanan ke luar negeri untuk pejabat publik. Minta pekerja kantor untuk membatasi permintaan (termasuk menggunakan tangga, mematikan perangkat). Kurangi penerangan jalan di daerah pedesaan. Dorong penggunaan kendaraan bersama dan batasi perjalanan yang tidak perlu. Pastikan bensin dengan kandungan biofuel yang lebih tinggi lebih murah. Bekukan harga bahan bakar untuk memasak hingga Mei. Berikan subsidi bahan bakar di bawah dana bahan bakar minyak. Pinjaman darurat yang ditargetkan untuk rumah tangga dan transisi energi.
Vietnam
Dorong kerja jarak jauh. Batasi perjalanan pejabat publik. Minta pemerintah daerah untuk membantu menghemat energi. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi, promosikan transportasi umum/berbagi kendaraan. Kurangi tarif impor bahan bakar. Berikan dana tambahan untuk mekanisme stabilisasi harga bahan bakar yang sudah ada. Kurangi pajak konsumsi khusus pada kendaraan listrik.

Sumber: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/2026-energy-crisis-policy-response-tracker> (2026)

b. Perdagangan & Rantai Pasok

Transmisi kedua adalah melalui kenaikan biaya logistik dan gangguan ketersediaan input. Gangguan pada jalur pelayaran internasional dapat memperpanjang lead time pengiriman bahan baku dan komponen. Industri yang menerapkan sistem produksi berbasis *just-in-time* akan lebih rentan karena keterlambatan bahan baku dapat menghentikan atau menurunkan kapasitas produksi. Tekanan rantai pasok global pada Mei 2026 masih berada pada level tinggi, sejalan dengan gangguan jalur energi dan perdagangan internasional.

Transmisi ketiga terjadi melalui pelemahan permintaan ekspor. Perlambatan ekonomi global, terutama di negara mitra dagang utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, akan menurunkan permintaan terhadap ekspor Indonesia. Dampak paling besar dapat terjadi pada komoditas dan produk manufaktur seperti batu bara, minyak sawit, karet, besi baja, produk kimia, tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, dan produk otomotif. Ketika negara mitra dagang mengalami perlambatan, volume pesanan ekspor dapat menurun, harga komoditas melemah, dan utilisasi kapasitas industri domestik berkurang.

China menjadi salah satu kanal transmisi yang sangat penting karena memiliki posisi sentral dalam perdagangan dan rantai pasok Asia. Perlambatan ekonomi China dapat mengurangi permintaan terhadap bahan mentah, mineral, energi, dan produk antara dari Indonesia. Di sisi lain, pelemahan permintaan domestik China juga dapat mendorong limpahan produk manufaktur murah ke pasar regional, termasuk Indonesia. Kondisi ini meningkatkan risiko persaingan impor yang lebih ketat bagi industri domestik.

Transmisi keempat adalah melalui kenaikan harga energi dan bahan baku global. Konflik di Timur Tengah dan gangguan jalur distribusi energi dapat mendorong kenaikan harga minyak, gas, pupuk, bahan kimia, dan biaya transportasi. IMF dalam proyeksi April 2026 menggunakan asumsi kenaikan harga energi sekitar 19 persen dalam skenario dasar, yang berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan global dan kenaikan inflasi. Bagi Indonesia, kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, biaya listrik industri, biaya bahan baku petrokimia, serta harga pangan dan pupuk. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor industri, tetapi juga oleh sektor pertanian, perikanan, distribusi, dan jasa logistik.

Dalam perdagangan internasional, gejolak global juga dapat memicu fragmentasi perdagangan dan relokasi rantai pasok. Negara-negara besar semakin mendorong kebijakan *friend-shoring*, *near-shoring*, pembatasan ekspor teknologi, penguatan industri strategis, serta subsidi domestik. Perusahaan global cenderung mengurangi ketergantungan pada satu negara pemasok dan mencari lokasi produksi alternatif.

c. Investasi dan Pasar Keuangan

Dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, investor akan semakin berhati-hati dan sensitif terhadap sentimen pasar. Di sisi lain, bank sentral di seluruh dunia dihadapkan pada ancaman stagflasi (inflasi tinggi yang diiringi dengan stagnasi ekonomi). Lonjakan inflasi karena konflik di Selat Hormuz, mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan atau menahannya di level tinggi jauh lebih lama (*higher for longer*). The Fed baru-baru ini mengeluarkan sinyal peningkatan suku bunga yang dapat menjadi tantangan bagi negara berkembang terutama dalam menerima aliran kas dari pasar keuangan. Hal ini akan memberikan dampak rambatan pada indikator makro lainnya, termasuk tingkat kesejahteraan.

Bagi ekonomi domestik yang masih dalam tahap penguatan fundamental, tentu hal ini merupakan tantangan besar. Aliran dana keluar terus terjadi baik itu pada pasar saham maupun obligasi. Pemerintah mendapat tantangan besar pada investasi dan pasar keuangan karena nilai *outlook* dari lembaga pemeringkat investasi yang negatif. Lembaga pemeringkat rating investasi ini menyoroti fiskal yang rapuh karena defisit APBN yang hampir mendekati batas maksimum dan belanja tidak produktif yang tinggi. Meskipun pemerintah telah berupaya menekan belanja dan meningkatkan suku bunga acuan, ditambah capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang tinggi, namun upaya itu belum bisa menahan aliran modal keluar dan depresiasi rupiah yang terus melemah. Baik investor asing maupun investor dalam negeri saat ini khawatir dengan kebijakan pemerintah yang terus berubah (kebijakan ekspor satu pintu, pajak UMKM, dan lainnya) tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi dunia usaha.

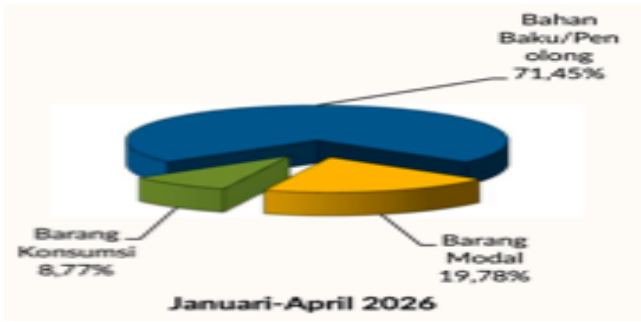
Peningkatan suku bunga acuan yang dilakukan di satu sisi dibutuhkan untuk menahan laju depresiasi dan menahan investor asing keluar, namun di sisi lain hal ini memberikan biaya mahal yang harus diemban APBN.

Peningkatan suku bunga acuan mendorong peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah, bahkan obligasi pemerintah tenor satu tahun saat ini sudah lebih tinggi dari tenor 10 tahun. Disamping itu obligasi tenor 1 tahun ini lebih disukai oleh investor dibandingkan tenor 10 tahun saat ini. Hal ini perlu menjadi perhatian karena akan mendorong peningkatan beban bunga utang yang semakin tinggi tahun depan.

d. Ketergantungan Impor Bahan Baku

Tingginya ketergantungan impor bahan baku industri manufaktur domestik berpotensi meningkatkan biaya produksi yang tinggi karena ditutupnya Selat Hormuz. Peningkatan biaya produksi ini dapat mendorong peningkatan harga barang dan jasa yang diterima konsumen hingga pada akhirnya akan menimbulkan inflasi yang lebih tinggi.

Data terakhir menunjukkan bahwa nilai impor bahan baku penolong mengalami peningkatan sebesar 24,56 persen pada April 2026. Sementara itu secara kumulatif, impor bahan baku penolong mendominasi barang impor sebesar 71,45 persen pada periode Januari-April 2026.



Gambar 1.9. Peranan Nilai Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari–April 2026

Sumber: BPS (2026)

Ketergantungan impor bahan baku industri dapat meningkatkan risiko biaya produksi, melemahkan daya saing, menghambat investasi, dan membatasi penciptaan nilai tambah serta tenaga kerja di dalam negeri. Karena itu, pengurangan ketergantungan impor perlu dilakukan secara selektif dan strategis melalui penguatan industri hulu, pengembangan komponen domestik, serta peningkatan kapasitas teknologi nasional.

BAB 2.

KETAHANAN EKONOMI MAKRO DAN KESEJAHTERAAN

Ketahanan ekonomi makro Indonesia pada 2026 diuji oleh meningkatnya gejala global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada volatilitas harga energi, gangguan jalur perdagangan internasional, serta peningkatan ketidakpastian pasar keuangan. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dunia karena kawasan tersebut merupakan pusat produksi minyak dan gas global serta menjadi jalur utama perdagangan energi. Gangguan pada Selat Hormuz, misalnya, dapat menghambat distribusi minyak mentah, gas alam cair, produk kilang, pupuk, dan bahan kimia ke kawasan Asia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan harga minyak dunia, biaya logistik, premi asuransi, serta harga bahan baku industri.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi dalam dua triwulan terakhir, ujian ketahanan ekonomi yang sesungguhnya diperkirakan baru semakin terlihat pada triwulan II 2026. Kinerja pertumbuhan sebelumnya masih banyak ditopang oleh faktor musiman konsumsi Ramadan–Lebaran, *low-base effect*, serta percepatan belanja pemerintah. Memasuki triwulan II, dampak eskalasi konflik Amerika Serikat–Iran mulai merambat lebih nyata ke perekonomian domestik melalui lonjakan harga energi, gangguan jalur perdagangan, peningkatan biaya logistik, dan memburuknya sentimen pasar keuangan.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi kanal transmisi paling cepat dan paling signifikan. Konflik tersebut sempat mengganggu pasokan energi dan lalu lintas tanker di Selat Hormuz, jalur yang sangat penting bagi perdagangan minyak dan gas menuju Asia. Harga minyak Brent sempat mendekati US\$120 per barel pada Maret 2026 sebelum kemudian menurun, tetapi harga energi tetap berada di atas level sebelum konflik dan proses normalisasi pasokan diperkirakan membutuhkan waktu. Bagi Indonesia sebagai net importir minyak, kondisi ini meningkatkan nilai impor migas, mempersempit surplus

perdagangan, menambah tekanan terhadap rupiah, serta memperbesar risiko kenaikan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.

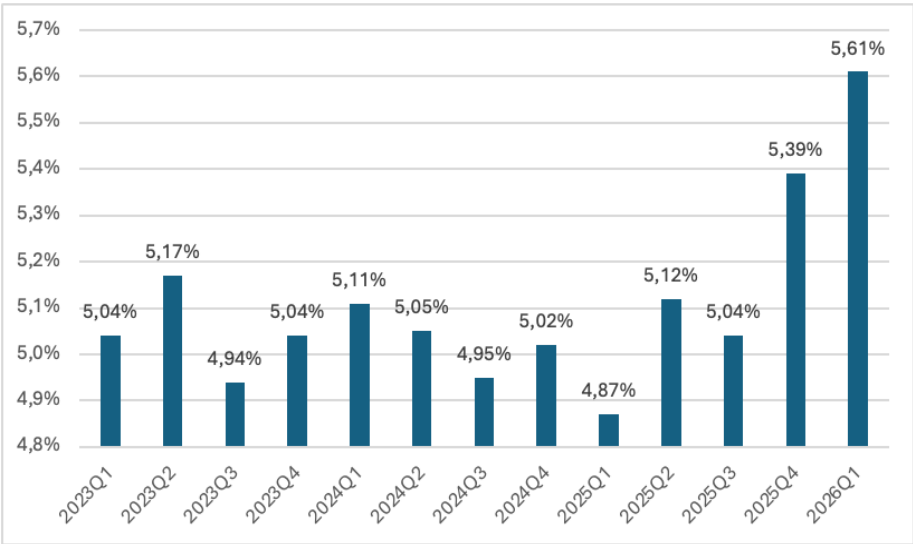
Rambatan harga minyak kemudian meluas ke biaya produksi industri, transportasi, logistik, pupuk, pangan, dan harga barang konsumsi. Industri yang bergantung pada bahan baku impor—seperti kimia, farmasi, tekstil, plastik, elektronik, otomotif, dan mesin—akan menghadapi kenaikan biaya input yang lebih besar. Jika perusahaan tidak mampu meneruskan kenaikan biaya ke harga jual, margin keuntungan akan tertekan; sebaliknya, jika biaya diteruskan ke konsumen, inflasi akan meningkat dan daya beli rumah tangga melemah. Risiko ini menjadi lebih besar karena harga energi juga memengaruhi biaya distribusi dan harga pangan melalui kenaikan biaya pupuk, transportasi, serta pengolahan.

Tekanan juga terlihat melalui kanal nilai tukar dan pasar keuangan. Ketidakpastian geopolitik mendorong investor global meningkatkan preferensi terhadap aset aman, sehingga negara berkembang menghadapi risiko arus modal keluar dan depresiasi mata uang. Sejak awal triwulan II 2026, rupiah dilaporkan mengalami depresiasi sekitar 4,92 persen, dipengaruhi oleh risiko geopolitik AS–Iran, kenaikan harga minyak, kebutuhan dolar domestik, serta tekanan neraca pembayaran. Pelemahan rupiah memperbesar biaya impor energi dan bahan baku, sehingga menciptakan efek pengganda terhadap inflasi dan biaya produksi domestik.

2.1. Uji Ketahanan Ekonomi Makro Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada rata-rata 5 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026, yaitu 5,61 persen, merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam masa setelah pandemi, bahkan dalam sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan dengan tren peningkatan yang signifikan terlihat sejak triwulan IV tahun 2025 yaitu 5,39 persen y.o.y (Gambar 2.1). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dua kuartal terakhir ini apakah mencerminkan ketahanan ekonomi secara fundamental dan dapat terus dipertahankan tumbuh sepanjang tahun 2026?

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi pada 2 triwulan terakhir, namun ujian sesungguhnya baru dapat dirasakan pada triwulan II 2026, dimana dampak dari eskalasi perang AS-Iran sudah mulai terasa pada berbagai indikator, seperti melambungnya harga minyak dunia yang merambat ke berbagai indikator lainnya. Pertumbuhan tinggi pada dua triwulan terakhir belum sepenuhnya mencerminkan ketahanan ekonomi yang kuat secara fundamental karena ditopang faktor musiman. Triwulan II 2026 menjadi fase penting untuk menilai apakah ekonomi Indonesia mampu menyerap guncangan eksternal tanpa mengalami perlambatan tajam, lonjakan inflasi, pelemahan daya beli, dan peningkatan tekanan fiskal. Respons kebijakan perlu diarahkan pada stabilisasi harga energi dan pangan, penguatan nilai tukar, perlindungan daya beli kelompok rentan dan kelas menengah, pengamanan pasokan bahan baku industri, serta pengendalian risiko fiskal agar gejolak global tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi domestik yang lebih luas.

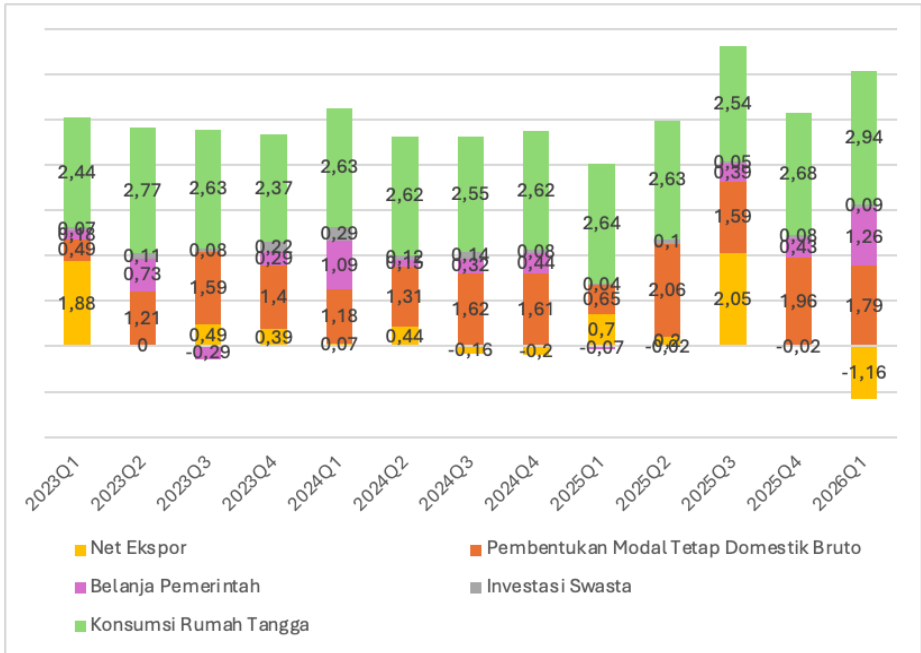


Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1-2023 s.d. Q1-2026

Sumber: BPS (2026; diolah)

Jika dilihat berdasarkan sumber pertumbuhan pada komponen pengeluaran, terdapat peningkatan signifikan pada kontribusi pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 2026, dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya (Gambar 2.2). Hal ini disebabkan

setidaknya karena dua alasan. *Pertama*, adanya *low-base effect* dimana pada kuartal 1 tahun 2025 pertumbuhan ekonomi hanya 4,87 persen. Pada saat itu, pemerintah sedang memulai efisiensi anggaran sehingga belanja pemerintah direlokasi ke program prioritas Presiden yang baru saja dilantik pada kuartal keempat tahun 2024. *Kedua*, efek musiman lebaran yang terjadi pada bulan Maret 2026. Pada periode ini, masyarakat cenderung mengeluarkan lebih banyak konsumsi pada masa libur lebaran dan pemerintah membelanjakan uangnya dengan mengirimkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN.

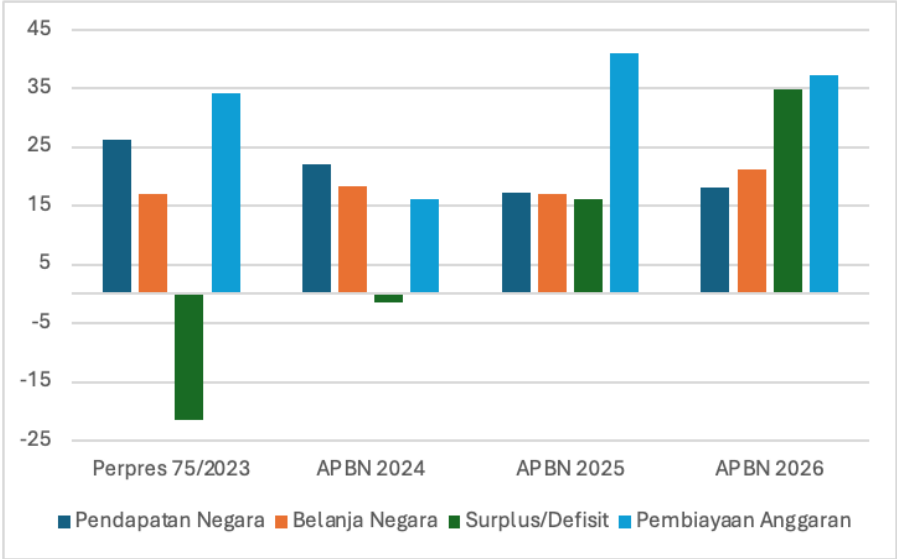


Gambar 2.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Pengeluaran Q1-2023 s.d. Q1-2026 (dalam persen; yoy)

Sumber: BPS (2026; diolah)

Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap sumber pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026 dapat terlihat dari semakin besarnya persentase realisasi belanja negara per Maret 2026. Pada Gambar 2.3 dapat terlihat bahwa persentase realisasi belanja per bulan Maret pada tahun 2026, yakni sebesar 21,2 persen, lebih besar dibandingkan realisasi belanja per bulan Maret pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, persentase realisasi belanja negara tersebut lebih besar dibandingkan persentase realisasi pendapatan negara pada periode waktu yang sama, yakni

hanya sebesar 18,2 persen. Pada satu sisi, implikasinya adalah pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain, dan hal ini dapat terlihat dari persentase pembiayaan anggaran yang telah terealisasi sebesar 37,3 persen per Maret 2026. Di sisi lain, pemerintah menanggguhkan waktu pelaporan pajak pribadi dan perusahaan yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret 2026 agar tetap dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai target pendapatan negara tahun 2026.

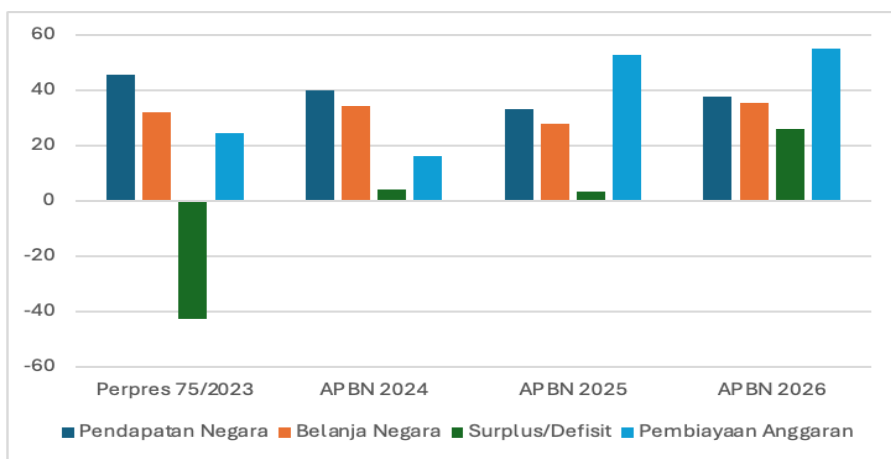


Gambar 2.3. Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tiap Tahun Per Kuartal 1, 2023 s.d. 2026 (dalam persen)

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah, 2026)

Dampak dari penangguhan waktu pembayaran pajak tersebut dapat terlihat pada akselerasi realisasi pendapatan negara, khususnya dari penerimaan pajak, pada Mei 2026 dibandingkan dengan realisasinya pada Maret 2026. Pada kuartal 1-2026, persentase realisasi penerimaan pajak dan pendapatan negara masing-masing sebesar 16,7 persen dan 18,2 persen. Sedangkan persentase realisasi penerimaan pajak dan pendapatan negara pada Mei 2026 secara berurutan adalah 35,4 persen dan 37,6 persen, atau naik masing-masing lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya.

Walaupun persentase realisasi belanja per Mei 2026 sudah tidak lagi lebih besar daripada persentase realisasi pendapatan negara, persentase realisasi pembiayaan anggaran per Mei 2026 semakin melesat hingga 55,1 persen. Sebagai catatan, angka tersebut merupakan persentase realisasi pembiayaan anggaran terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode waktu yang sama. Pada tahun 2023 hingga 2025, persentase realisasi pembiayaan anggaran masing-masing secara berurutan adalah 24,7 persen, 16,18 persen, dan 53 persen. Selain itu, pembiayaan utang dan pembiayaan non utang sebagai dua komponen pembiayaan anggaran juga memiliki persentase realisasi yang jauh berbeda. Per Mei 2026, persentase realisasi pembiayaan utang telah mencapai 46,4 persen dan persentase realisasi pembiayaan non utang baru sebesar 4,4 persen dari pagu APBN 2026. Dengan demikian, Kementerian Keuangan harus mengevaluasi aspek pembiayaan non utang ini untuk menilai apakah target yang ditetapkan dalam APBN 2026 terlalu tinggi atau apakah kinerja pembiayaan non utang belum optimal.



Gambar 2.4. Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tiap Tahun Per Bulan Mei, 2023 s.d. 2026 (dalam persen)

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

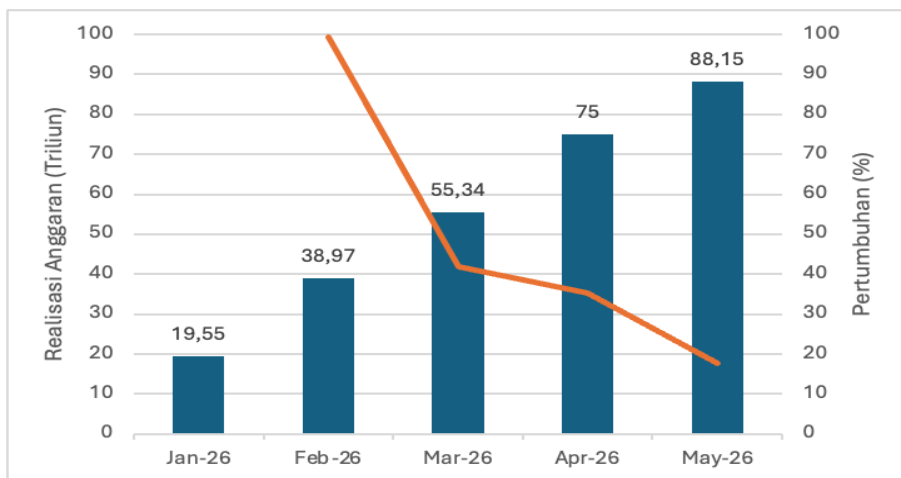
Di satu sisi, persentase tersebut dapat menjadi alarm bagi pemerintah bahwa terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pembiayaan anggaran di atas angka yang telah ditetapkan dalam dokumen APBN 2026. Sebab persentase realisasi pembiayaan anggaran tersebut telah melebihi separuh pada saat APBN baru berjalan selama separuh tahun. Di sisi lain, surplus

APBN pada Mei 2026 yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada periode waktu yang sama di tahun-tahun sebelumnya, yakni 26,2 persen, berasal dari besarnya pembiayaan anggaran yang telah direalisasikan oleh pemerintah hingga Mei 2026.

Selain itu, aspek belanja negara juga naik dengan persentase realisasinya sebesar 35,5 persen per Mei 2026. Persentase tersebut merupakan persentase realisasi belanja terbesar pada bulan Mei dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 hingga 2025, persentasenya secara berurutan masing-masing sebesar 32,2 persen, 34,4 persen, dan 28,1 persen. Salah satu faktor yang mempercepat realisasi belanja negara adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden.

Anggaran program MBG dalam APBN 2026 sebesar 335 triliun. Alokasi anggaran yang besar tersebut membuat pemerintah harus membelanjakan anggaran dengan cepat agar dampak kebijakan program dapat mencapai target. Per Mei 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 88,15 triliun. Jadi, dalam lima bulan berjalannya program ini pada tahun 2026, anggaran baru terealisasi sebesar 26,31 persen. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan pada awal Juni 2026 mengumumkan bahwa anggaran MBG pada tahun 2026 dipangkas sebesar Rp 67 triliun, sehingga menjadi Rp 268 triliun.

Walaupun Kementerian Keuangan telah memangkas anggaran MBG tersebut, terdapat dua alasan mengapa anggaran MBG yang telah dipangkas tetap tidak dapat terealisasi sepenuhnya hingga akhir tahun 2026. Pertama, realisasi anggaran MBG per bulan pada tahun 2026 ini menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan penyerapan anggaran setiap bulan. Pada bulan Februari 2026, anggaran MBG terealisasi sebesar 38,97 triliun atau bertumbuh 99 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran MBG pada bulan Januari 2026 sebesar 19,55 triliun. Pada bulan Maret hingga Mei 2026, pertumbuhan realisasi anggaran secara berturut-turut sebesar 41,99 persen, 35,33 persen, dan 17,53 persen. Jadi, tren penurunan pertumbuhan realisasi anggaran MBG tersebut seharusnya memberi sinyal kepada pemerintah bahwa kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyerap seluruh anggaran MBG sangat terbatas.



Gambar 2.5. Realisasi Anggaran (Triliun) dan Pertumbuhan Realisasi Anggaran (%) Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

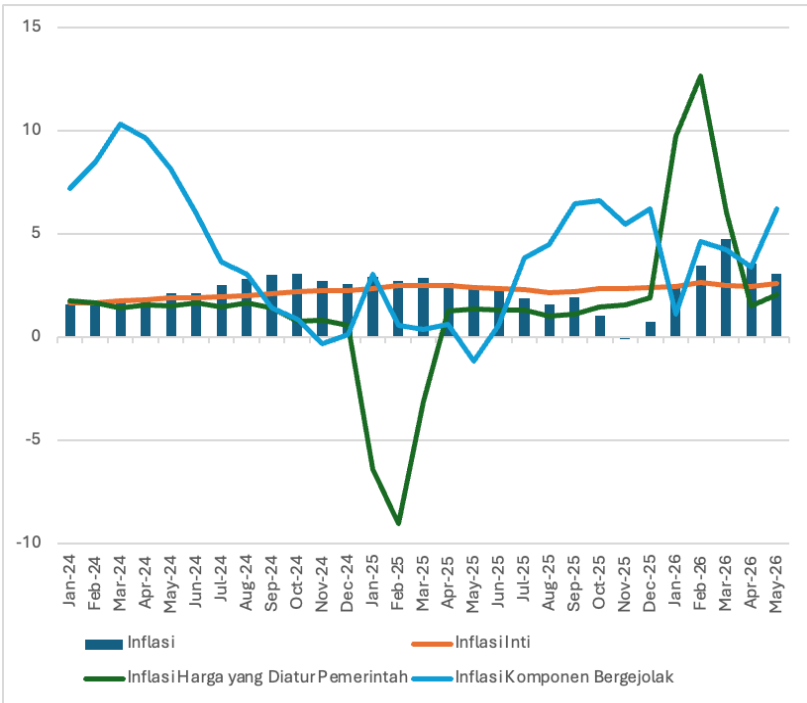
Sumber: Kementerian Keuangan (2026; diolah)

Kedua, BGN pada awal Juni 2026 juga telah mengumumkan empat kebijakan baru, yakni pemberlakuan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, penguatan pelayanan dan jangkauan SPPG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), peningkatan kemampuan pegawai dan fasilitas yang sudah ada, serta *refocusing* penerima manfaat MBG. Oleh karena adanya perubahan fokus kebijakan MBG dari perluasan penerima manfaat menjadi peningkatan kualitas layanan dan tata kelola, pemerintah harus sudah mulai memikirkan pengalihan sebagian alokasi anggaran MBG yang tidak akan terpakai tersebut ke sektor dan prioritas lain yang juga membutuhkan tambahan anggaran.

Pada aspek moneter, target utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah melalui dua dimensi, yakni inflasi dan nilai tukar. Dalam hal ini, angka inflasi pada lima bulan pertama tahun 2026 menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Sejak Januari hingga Mei 2026, tingkat inflasi setiap bulan (yoy) berada dalam rentang jangkauan antara 2,42 persen hingga 4,76 persen. Padahal, inflasi kelima bulan tersebut tahun sebelumnya relatif stabil di sekitar angka 2 persen hingga 3 persen. Bahkan, pada awal tahun 2024, rentang jangkauan

tingkat inflasi pada periode yang sama ialah antara 1,55 persen hingga 2,12 persen.

Kemudian, ketika ditelaah lebih detail pada komponen inflasi inti sebagai gambaran tren ekonomi jangka panjang, angka inflasi inti juga menunjukkan peningkatan yang persisten setidaknya dalam dua tahun terakhir. Pada paruh pertama tahun 2024, angka inflasi inti berada antara 1,5 persen dan 2 persen. Selanjutnya, angka tersebut naik secara perlahan hingga akhir tahun 2025 dengan rentang 2 persen hingga 2,5 persen. Berikutnya, angka inflasi inti telah berada di atas 2,5 persen dalam beberapa bulan awal tahun 2026. Jadi, angka inflasi umum dan inflasi inti yang secara bertahap meningkat harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak menggerus daya beli masyarakat ke depan.



Gambar 2.6. Tingkat inflasi, inflasi inti, inflasi harga yang diatur pemerintah, dan inflasi harga bergejolak di Indonesia, Januari 2024 s.d. Mei 2026 (dalam persen; yoy)

Sumber: BPS (2026; diolah)

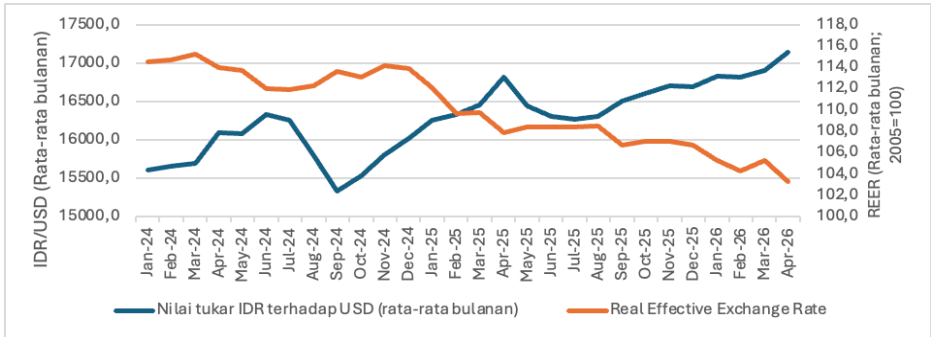
Adapun angka inflasi harga yang diatur oleh pemerintah pada kuartal pertama 2026 sempat tinggi, masing-masing sebesar 9,71 persen, 12,66 persen, dan 6,08 persen. Kemudian, angka tersebut turun secara signifikan menjadi 1,53 persen dan 2,07 persen pada April dan Mei 2026. Tingginya angka tersebut pada kuartal pertama 2026 dapat terjadi karena rendahnya angka inflasi harga yang diatur oleh pemerintah pada kuartal pertama 2025 yang mencapai angka minus atau kurang dari 0 persen. Maka, rendahnya perbandingan angka pada tahun sebelumnya tersebut menyebabkan tingginya angka inflasi harga yang diatur oleh pemerintah pada kuartal pertama 2026. Kemudian, kembali rendahnya inflasi harga yang diatur oleh pemerintah pada April dan Mei 2026 merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang tetap menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan gas elpiji di tengah gejolak harga minyak dan gas dunia, saat terjadi krisis di Selat Hormuz akibat perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Jika krisis tersebut kian mengikis kemampuan fiskal pemerintah dan akhirnya pemerintah hendak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan gas elpiji, pemerintah harus mengantisipasi kenaikan inflasi yang akan diatur oleh pemerintah.

Pada angka inflasi komponen bergejolak, angka pada lima bulan pertama tahun 2026 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan harga komoditas pangan menjadi faktor utama terjadinya kecenderungan peningkatan jenis inflasi ini pada awal 2026. Beberapa penyebab kenaikan harga pangan, seperti cabai merah, tomat, dan bawang merah, di antaranya adalah cuaca ekstrem seperti kekeringan di beberapa daerah, serangan hama dan penyakit, peningkatan permintaan akibat masa Ramadan, serta hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hal ini, cuaca ekstrem seperti El Niño yang kemungkinan besar terjadi pada paruh kedua 2026 harus diantisipasi oleh pemerintah agar angka inflasi pada komponen yang bergejolak tidak melonjak drastis.

Dalam hal nilai tukar, nilai tukar rupiah terhadap US Dollar menunjukkan tren pelemahan yang konsisten sejak akhir tahun 2024 hingga saat ini. Pada November 2024, rata-rata bulanan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar adalah Rp 15.812. Angka tersebut kian melemah di sekitar Rp 16.000 sepanjang tahun 2025, lalu mencapai Rp 17.140 pada April 2026. Di satu sisi, ada benarnya bahwa pelemahan terhadap US Dollar juga dialami oleh mata uang negara lain. Namun, tingkat pelemahan yang dialami rupiah merupakan

salah satu yang paling parah. Hal ini dapat tercermin dari tingkat *Real Effective Exchange Rate* (REER), yakni rata-rata tertimbang nilai mata uang suatu negara terhadap sejumlah mata uang negara lain yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi.

Dengan patokan indeks senilai 100 pada tahun 2005, angka indeks REER mata uang rupiah terhadap US Dollar terus menurun dari 114,2 pada November 2024 menjadi 103,3 pada April 2026. Artinya, upaya penguatan mata uang rupiah dalam dua dekade terakhir justru mengalami tren yang berbalik arah hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir. Terlebih, angka psikologis baru senilai Rp 17.000 telah terbentuk pada awal 2026, jauh di atas asumsi makro APBN 2026 sebesar Rp 16.500. Bahkan, berdasarkan tren pelemahan rupiah tersebut, terdapat kecenderungan rupiah mencapai angka psikologis terbaru pada level Rp 18.000 dan Rp 19.000 pada tahun ini.

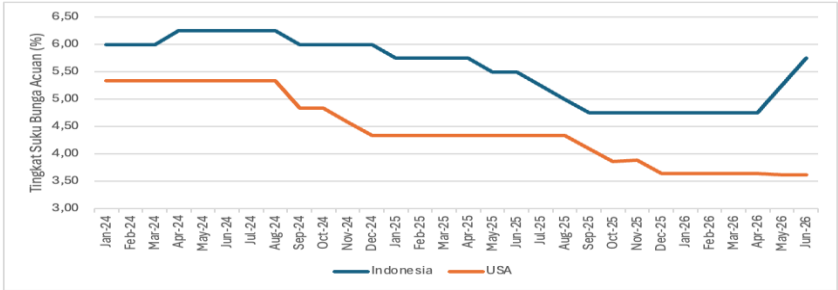


Gambar 2.7. Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar dan *Real Effective Exchange Rate*, Januari 2024 s.d. April 2026 (dalam persen; yoy)

Sumber: CEIC (2026; diolah)

Dalam rangka menahan tren pelemahan rupiah tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai respons kebijakan. Salah satu di antaranya adalah menaikkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia atau *7-Day Reverse Repo Rate* (7DRR) pada bulan Mei dan Juni 2026 sebanyak 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen. Harapannya, para investor pemegang rupiah tidak terus menjual rupiah ke pasar, sehingga memilih tetap menyimpan rupiah dengan adanya peningkatan suku bunga tersebut. Dengan begitu, laju pelemahan rupiah dapat melambat. Padahal, selama ini terdapat kecenderungan bahwa tingkat 7DRR di Indonesia mengikuti perkembangan

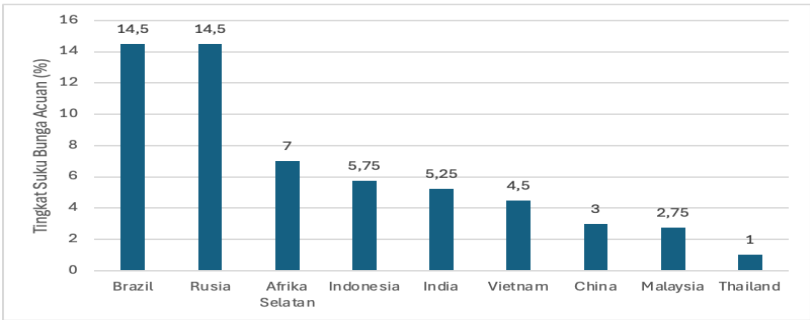
tingkat *The Fed Funds Rate* (The Fed) di Amerika Serikat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8. Tingkat Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan The Funds Rate Amerika Serikat, Januari 2024 s.d. Juni 2026 (dalam persen)

Sumber: Bank Indonesia dan *Federal Reserve Board* (2026; diolah)

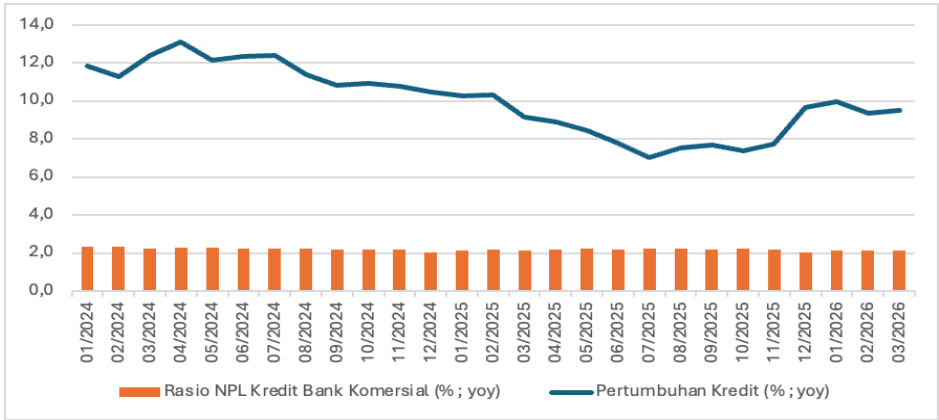
Adapun tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 5,75 persen tersebut relatif masih berada di tengah dibandingkan dengan negara selevel lainnya di dunia. Sebagai perbandingan, Brasil dan Rusia memiliki tingkat suku bunga acuan bank sentral masing-masing sebesar 14,5 persen. Kemudian, Afrika Selatan memiliki persentase suku bunga acuan sebesar 7 persen. Sementara itu, India memiliki level suku bunga acuan yang sedikit di bawah Indonesia, yakni 5,25 persen. Di sisi lain, sejumlah negara selevel di kawasan seperti Vietnam, China, Malaysia, dan Thailand memiliki tingkat suku bunga acuan yang lebih rendah, yakni masing-masing sebesar 4,5 persen, 3 persen, 2,75 persen, dan 1 persen.



Gambar 2.9. Tingkat Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan Negara Selevel Lainnya di Dunia, Per 19 Juni 2026 (dalam persen)

Sumber: CEIC (2026; diolah)

Pada kuartal pertama tahun 2026, tingkat pertumbuhan kredit kembali menguat di atas 9 persen, yakni secara berurutan dari Januari hingga Maret 2026 sebesar 10 persen, 9,4 persen, dan 9,5 persen. Sebelumnya, khususnya sejak kuartal kedua 2024, terdapat kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan kredit secara bertahap dari puncaknya pada April 2024 sebesar 13,1 persen menjadi sekitar 7 persen pada paruh kedua 2025. Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan kredit yang kembali meningkat pada kuartal pertama tahun 2026 ini menunjukkan adanya peningkatan aliran dana ke sektor swasta agar dapat melakukan ekspansi usaha dan masyarakat dapat menggunakannya untuk mendongkrak daya beli. Penurunan suku bunga acuan sejak akhir 2024 hingga 2025 berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan kredit secara bertahap yang telah dimulai pada paruh kedua tahun 2025. Di sisi lain, rasio kredit macet bank komersial tetap terjaga stabil di sekitar 2 persen hingga 2,3 persen dengan angka persis pada ketiga bulan pertama tahun 2026 sebesar 2,1 persen. Kondisi naiknya tingkat pertumbuhan kredit tersebut disertai dengan rasio *non-performing loan* yang relatif konstan, sehingga memastikan sektor keuangan tetap terjaga dengan manajemen risiko yang kuat dan terukur.

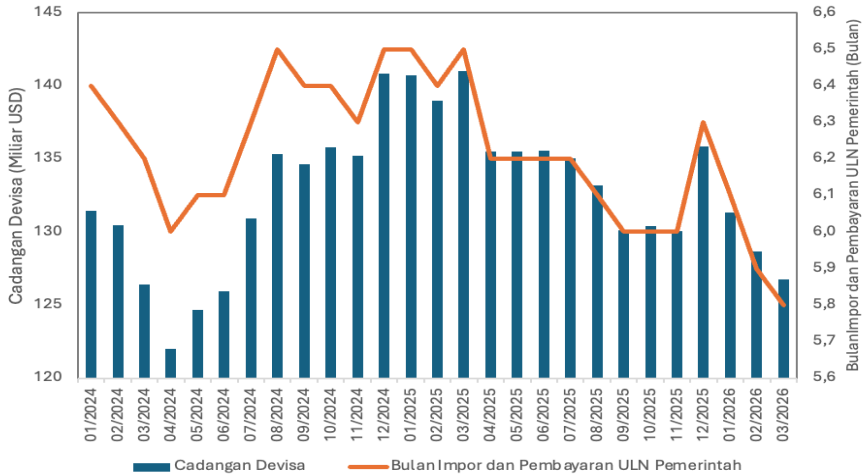


Gambar 2.10. Tingkat pertumbuhan kredit dan rasio *non-performing loan* kredit bank komersial di Indonesia, Januari 2024 s.d. Maret 2026 (dalam persen; yoy)

Sumber: BI dan OJK (2026; diolah)

Selain kebijakan menaikkan tingkat suku bunga acuan, Bank Indonesia turut mengintervensi pasar valuta asing untuk menahan laju pelemahan nilai

tukar rupiah. Implikasinya, cadangan devisa serta bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah anjlok pada kuartal pertama 2026 dibandingkan dengan posisi terakhir pada Desember 2025. Sepanjang tahun 2025, posisi cadangan devisa senantiasa berada dalam rentang US\$ 130 miliar hingga US\$ 140 miliar. Angka tersebut turun drastis dari US\$ 135 miliar pada akhir 2025 menjadi US\$ 126 miliar pada Maret 2026. Selain itu, bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah sepanjang tahun 2025 berada dalam rentang 6 hingga 6,5 bulan. Angka tersebut turun drastis dari 6,3 bulan pada Desember 2025 menjadi 5,8 bulan pada Maret 2026.



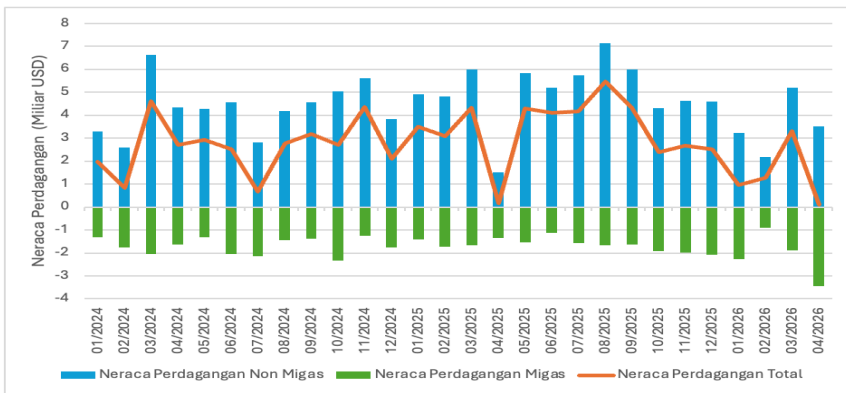
Gambar 2.11. Cadangan Devisa (dalam miliar US\$) serta Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah (dalam bulan), Januari 2024 s.d. Maret 2026

Sumber: Bank Indonesia (2026; diolah)

Penurunan cadangan devisa serta jumlah bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, khususnya di tengah gejolak geopolitik yang salah satunya membuat harga minyak tinggi, membuat perekonomian Indonesia menjadi sangat rentan. Akibat yang dapat ditimbulkan dari semakin rendahnya kedua indikator tersebut adalah semakin terbatasnya kemampuan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, penurunan kepercayaan investor asing, peningkatan biaya impor yang berimplikasi pada kenaikan harga barang impor dan kemudian inflasi secara umum, serta semakin sulit memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri dan pembiayaan impor dalam jangka pendek. Maka, Bank Indonesia dari sisi

moneter tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan fiskal yang kredibel dan konsisten harus turut diprioritaskan oleh pemerintah agar pasar kembali percaya pada rupiah.

Kemudian, anjloknya neraca perdagangan turut berkontribusi terhadap terkurasnya cadangan devisa tersebut serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 89,1 juta pada April 2026 merupakan angka surplus paling kecil selama 72 bulan tren surplus neraca perdagangan berlangsung sejak Mei 2020. Secara bulanan, surplus neraca perdagangan April 2026 anjlok dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan Maret 2026 sebesar US\$ 3,3 miliar. Terdapat dua faktor penyebab surplus neraca perdagangan tersebut turun drastis. Pertama, neraca perdagangan nonmigas yang turun dari US\$ 5,2 miliar pada Maret 2026 menjadi US\$ 3,5 miliar pada April 2026 cukup memberikan kontribusi besar terhadap tipisnya surplus neraca perdagangan. Kedua, defisit neraca perdagangan migas yang semakin signifikan, dari US\$ -1,8 miliar pada Maret 2026 menjadi US\$ -3,4 miliar pada April 2026, sangat menggerus surplus neraca perdagangan Indonesia. Dalam hal ini, khususnya di tengah tren pelemahan rupiah yang sedang berlangsung, pemerintah harus menggenjot ekspor ke berbagai negara di dunia agar mampu meningkatkan kembali surplus neraca perdagangan, sehingga dapat meningkatkan kembali cadangan devisa dan turut menstabilkan nilai tukar rupiah.



Gambar 2.12. Neraca Perdagangan Total, Neraca Perdagangan Migas, dan Neraca Perdagangan Non Migas Indonesia, Januari 2024 s.d. April 2026 (dalam miliar US\$)

Sumber: BPS (2026; diolah)

2.2. Menavigasi Guncangan Kesejahteraan

Guncangan global yang berasal dari konflik geopolitik, kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga pangan tidak hanya memengaruhi indikator makroekonomi, tetapi juga langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketika harga minyak, pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok meningkat, beban hidup rumah tangga ikut bertambah. Dampak tersebut terutama dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah, kelompok rentan, pekerja informal, serta kelas menengah yang memiliki pengeluaran rutin tinggi tetapi tidak selalu memperoleh perlindungan sosial yang memadai.

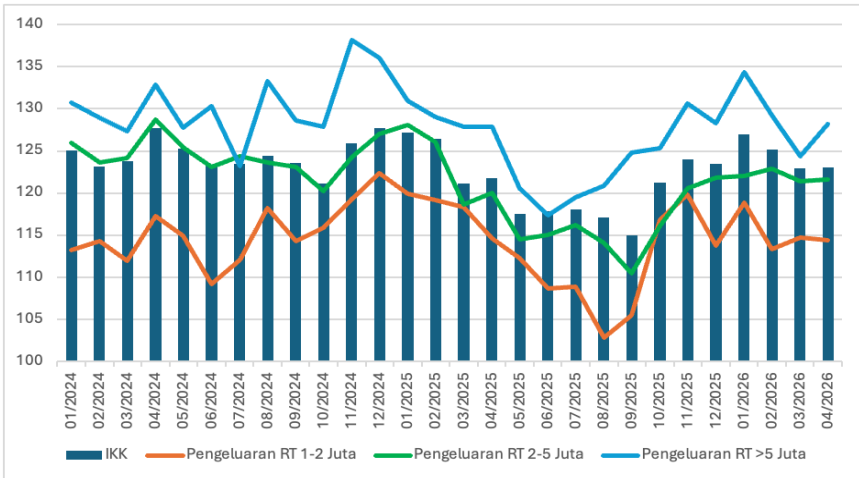
Kelompok masyarakat miskin dan rentan menghadapi risiko penurunan daya beli karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan dasar, terutama pangan, energi, transportasi, dan perumahan. Kenaikan harga bahan pokok dapat secara cepat mengurangi kualitas konsumsi rumah tangga, mendorong pengurangan belanja pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan risiko kemiskinan baru. Dalam situasi tekanan ekonomi yang berkepanjangan, rumah tangga rentan dapat mengandalkan utang konsumtif atau menjual aset produktif untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, kelas menengah menghadapi bentuk kerentanan yang berbeda. Kelompok ini umumnya tidak masuk dalam sasaran utama bantuan sosial, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup, cicilan kredit, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan risiko kehilangan pekerjaan. Kenaikan harga energi dan bahan baku dapat menekan industri, terutama manufaktur dan sektor padat karya, sehingga perusahaan dapat mengurangi lembur, membatasi perekrutan, tidak memperpanjang kontrak kerja, atau melakukan efisiensi tenaga kerja. Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan riil dan memperbesar risiko penurunan kelas ekonomi.

Guncangan kesejahteraan juga dapat muncul melalui perlambatan dunia usaha dan pasar tenaga kerja. Ketika biaya produksi meningkat dan permintaan melemah, investasi cenderung tertunda dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi lebih lambat. Pekerja informal, pekerja harian, pekerja kontrak, serta tenaga kerja muda menjadi kelompok yang paling cepat terdampak karena memiliki perlindungan kerja dan kepastian pendapatan

yang lebih rendah. Dalam jangka panjang, perlambatan kesempatan kerja dapat memperlebar ketimpangan dan menghambat mobilitas sosial.

Di tengah tekanan pada sisi kesejahteraan, persepsi masyarakat terhadap optimisme kondisi perekonomian turut cenderung menurun pada kuartal pertama tahun 2026. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebagai indikator untuk mengukur tingkat optimisme publik terhadap kondisi keuangan, penghasilan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan pada April 2026 cenderung menurun dibandingkan dengan skor indeks pada Januari 2026. Pada awal tahun ini, IKK menunjukkan penguatan kembali ke skor 127 setelah terjadinya kerusuhan di berbagai daerah pada September 2025 yang menyebabkan skor IKK anjlok pada bulan tersebut, yakni 115.



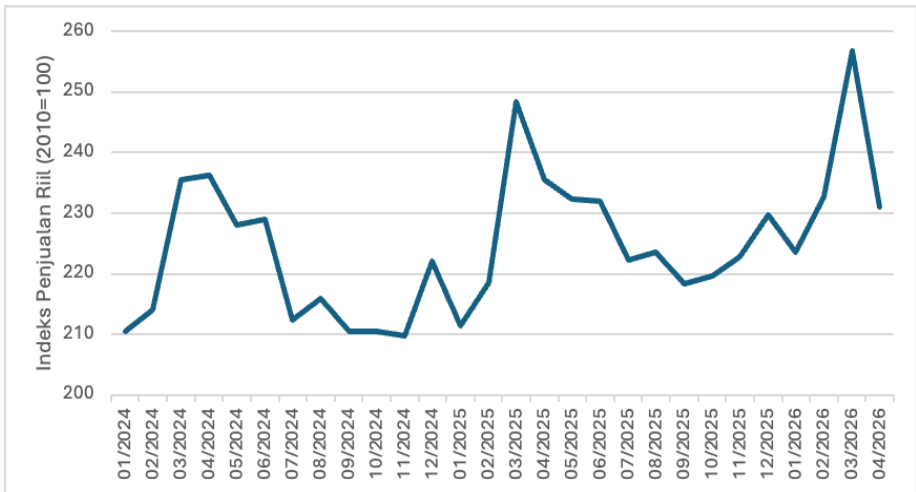
Gambar 2.13. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Keyakinan Konsumen Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga, Januari 2024 s.d. April 2026

Sumber: Bank Indonesia (2026; diolah)

Meskipun demikian, tren peningkatan IKK pada kuartal keempat 2025 hingga mencapai puncaknya pada Januari 2026 tidak berlanjut. Sebab, skor IKK pada Februari hingga April 2026 cenderung turun dengan skor 125,2; 122,9; dan 123. Tren penurunan skor IKK tersebut terlihat utamanya pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga sebesar 1 juta hingga 2 juta per bulan, yakni dari skor 118,8 pada Januari 2026 menjadi 114,4 pada April 2026. Kelompok masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga

sebesar 2 juta hingga 5 juta per bulan turut mengalami penurunan skor IKK dari 122,1 pada Januari 2026 menjadi 121,6 pada April 2026. Sementara itu, kelompok masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga lebih dari 5 juta per bulan turut mengalami tren penurunan skor IKK dari 134,4 pada Januari 2026 menjadi 124,4 pada Maret 2026, meski kemudian naik sedikit menjadi 128,2 pada April 2026.

Selain itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa di sektor riil, yang dapat diukur melalui Indeks Penjualan Riil (IPR), juga menunjukkan kecenderungan menurun pada April 2026. Selepas pandemi, skor IPR secara umum menunjukkan tren peningkatan walaupun terdapat fluktuasi dalam periode waktu tertentu. Pada kuartal pertama 2026, skor IPR menunjukkan peningkatan signifikan dari 223,6 pada Januari 2026 menjadi 256,7 pada Maret 2026. Walaupun demikian, skor tersebut turun kembali pada April 2026 menjadi 231. Pelemahan daya beli yang terjadi secara signifikan pada bulan April 2026 dibandingkan dengan bulan sebelumnya jangan sampai terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya di paruh kedua tahun 2026.

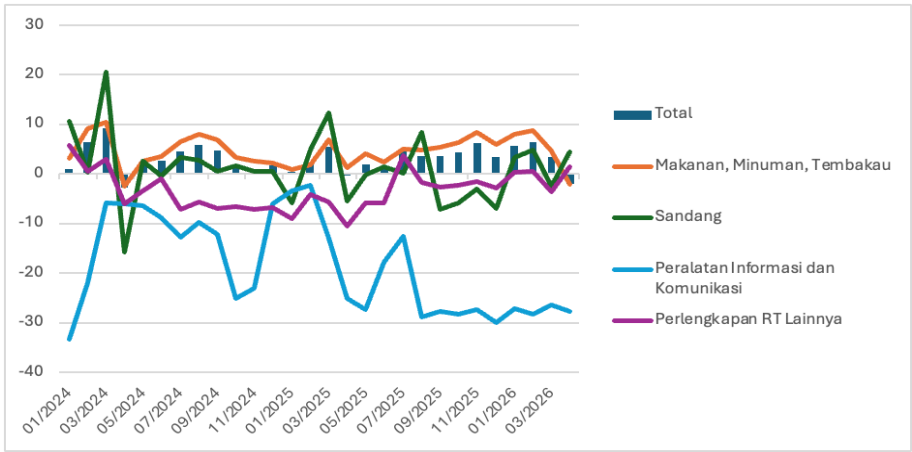


Gambar 2.14. Indeks Penjualan Riil, Januari 2024 s.d. April 2026

Sumber: Bank Indonesia (2026; diolah)

Secara lebih detail, Gambar 2.15 mengilustrasikan adanya pertumbuhan IPR secara umum yang positif pada kuartal pertama 2026, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan negatif pada bulan April 2026 sebesar -1,9 persen. Adapun beberapa komponen penghitungan IPR menunjukkan

dinamika yang bervariasi pada tahun 2026. Komponen makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal pertama, bahkan mencapai 8,8 persen pada Februari 2026. Namun, capaian tersebut justru berbalik arah pada April 2026 dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,1 persen. Berikutnya, komponen sandang menggambarkan fluktuasi pertumbuhan IPR dengan raihan pertumbuhan positif pada Januari, Februari, dan April 2026, walau memberikan kontribusi pertumbuhan negatif sebesar -2,4 pada Maret 2026. Tren yang sama terjadi pada komponen perlengkapan rumah tangga lainnya, dengan tiga bulan yang sama mengalami pertumbuhan IPR positif. Selain itu, komponen peralatan informasi dan komunikasi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil di sekitar angka -27 persen selama 4 bulan pertama tahun ini. Jadi, tren penurunan pertumbuhan IPR, baik secara umum maupun pada komponen makanan, minuman, dan tembakau yang terjadi sejak Februari lalu, harus diantisipasi oleh pemerintah karena mengindikasikan berkurangnya penjualan eceran dan konsumsi masyarakat secara umum, serta secara spesifik pada aspek pangan.

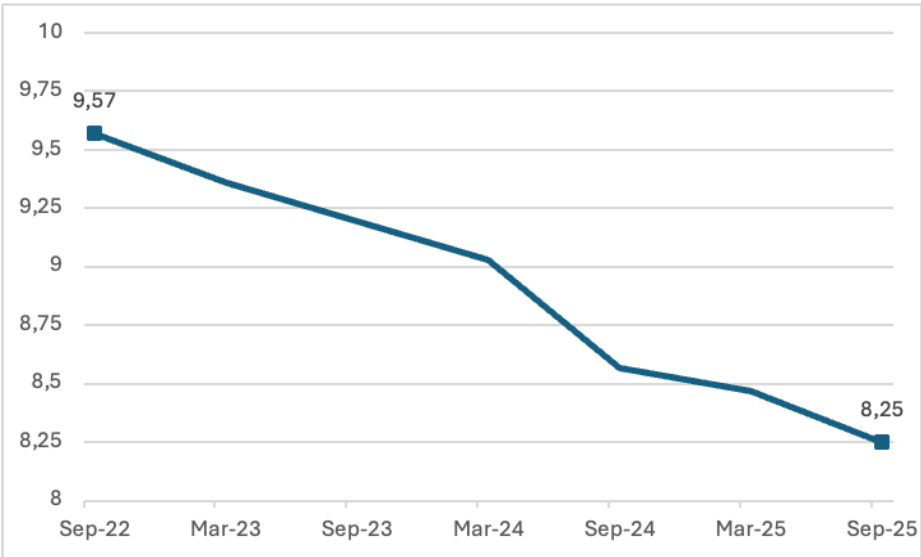


Gambar 2.15. Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil, Januari 2024 s.d. April 2026 (dalam persen; yoy)

Sumber: Bank Indonesia (2026; diolah)

Di tengah penurunan beberapa indikator daya beli dan persepsi masyarakat terhadap perekonomian, beberapa indikator kesejahteraan belum mampu menangkap tren terbaru tersebut. Pasalnya, indikator kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran hanya diukur dua kali dalam setahun sehingga tidak dapat menangkap fenomena kesejahteraan masyarakat terkini.

Sebagai gambaran, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami tren penurunan setelah masa pandemi. Pada September 2022, terdapat sebanyak 9,57 persen penduduk miskin yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Angka tersebut terus menurun hingga mencapai 8,25 persen pada September 2025. Meskipun demikian, capaian tersebut belum mencapai target persentase penduduk miskin yang tertuang dalam APBN 2025, yaitu 7 persen hingga 8 persen. Artinya, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan agar terjadi akselerasi penurunan jumlah penduduk miskin.

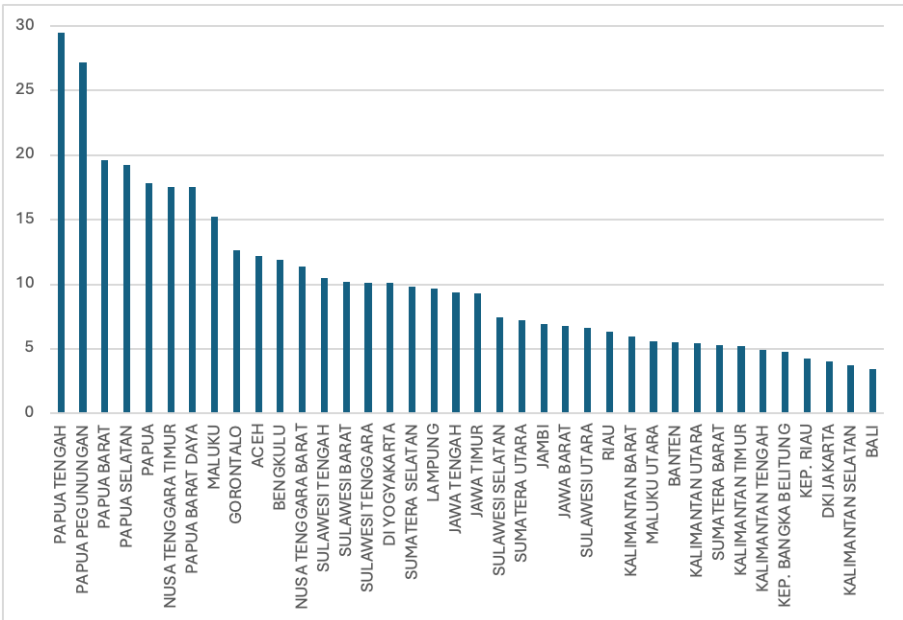


Gambar 2.16. Presentase Penduduk Miskin, September 2022 s.d. September 2025 (dalam persen)

Sumber: BPS (2026; diolah)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan adalah intervensi kebijakan berbasis spasial. Sebab delapan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kawasan Timur Indonesia, dengan persentase di atas 15 persen dari total penduduk di provinsi tersebut. Kedelapan provinsi tersebut adalah Papua Tengah (29,45 persen), Papua Pegunungan (27,21 persen), Papua Barat (19,58 persen), Papua Selatan (19,26 persen), Papua (17,82 persen), Nusa Tenggara Timur (17,5 persen), Papua Barat Daya (17,5 persen), dan Maluku (15,25 persen). Kemudian, delapan provinsi lain yang memiliki persentase penduduk miskin

antara 10 persen hingga 15 persen adalah Gorontalo (12,62 persen), Aceh (12,22 persen), Bengkulu (11,88 persen), Nusa Tenggara Barat (11,38 persen), Sulawesi Tengah (10,52 persen), Sulawesi Barat (10,18 persen), Sulawesi Tenggara (10,14 persen), dan DI Yogyakarta (10,08 persen).

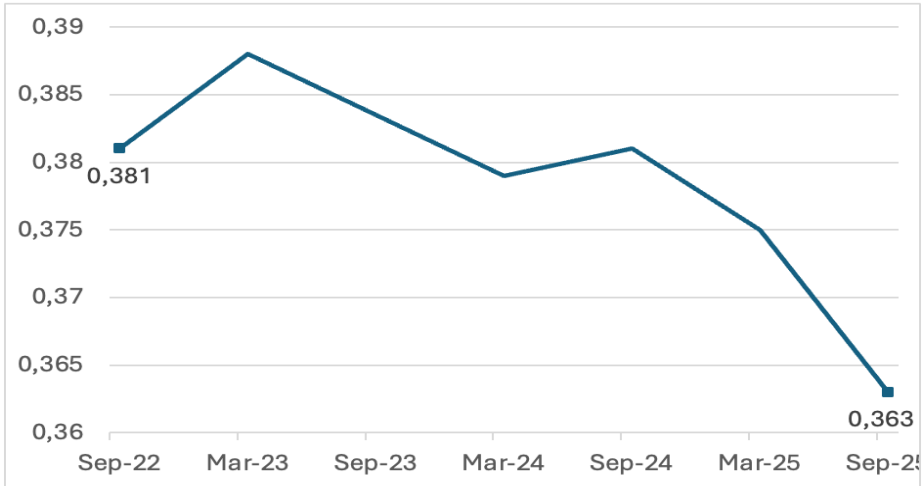


Gambar 2.17. Presentase Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Provinsi, September 2025 (dalam persen)

Sumber: BPS (2026; diolah)

Kemudian, rasio gini, sebagai salah satu pengukuran ketimpangan ekonomi, menunjukkan tren menurun setelah pandemi, dari 0,381 pada September 2022 menjadi 0,363 pada September 2025. Capaian tersebut melanjutkan tren pada periode penghitungan sebelumnya dengan angka 0,381 pada September 2024 dan 0,375 pada Maret 2025. Selain itu, raihannya 0,363 pada September 2025 tersebut juga melampaui target rasio gini yang ditetapkan dalam APBN 2025, yaitu sebesar 0,379 hingga 0,382. Meskipun demikian, satu catatan penting dalam hal ini adalah bahwa rasio gini mengukur kesenjangan ekonomi berdasarkan pengeluaran, bukan berdasarkan pendapatan maupun kekayaan. Jadi, terdapat urgensi agar Badan Pusat Statistik juga dapat mampu menghitung kesenjangan ekonomi

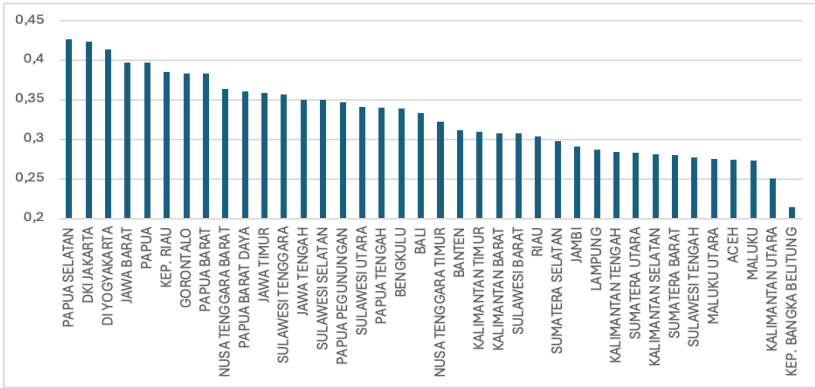
berdasarkan pendapatan dan kekayaan agar dapat memotret fenomena kesenjangan ekonomi secara lebih utuh dan komprehensif di Indonesia



Gambar 2.18. Rasio Gini Indonesia, September 2022 s.d. September 2025

Sumber: BPS (2026; diolah)

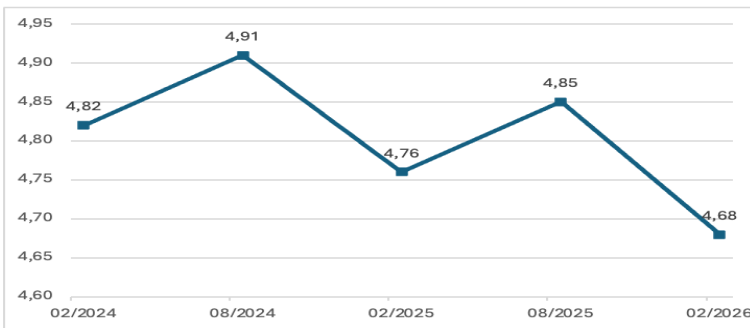
Selanjutnya, terdapat beberapa provinsi yang memiliki rasio gini di atas angka 0,363 secara nasional. Tiga provinsi yang memiliki rasio gini di atas angka 4,0 per September 2025 adalah Papua Selatan (0,426), DKI Jakarta (0,423), dan DI Yogyakarta (0,414). Sedangkan enam provinsi lainnya yang juga berada di atas angka nasional adalah Jawa Barat (0,397), Papua (0,397), Kepulauan Riau (0,385), Gorontalo (0,383), Papua Barat (0,383), dan Nusa Tenggara Barat (0,364). Oleh karena itu, penanganan kesenjangan ekonomi secara spasial dapat diprioritaskan pada provinsi-provinsi tersebut agar terjadi pengurangan ketimpangan dan pada akhirnya tercipta keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 2.19. Rasio Gini Indonesia Berdasarkan Provinsi, September 2025

Sumber: BPS (2026; diolah)

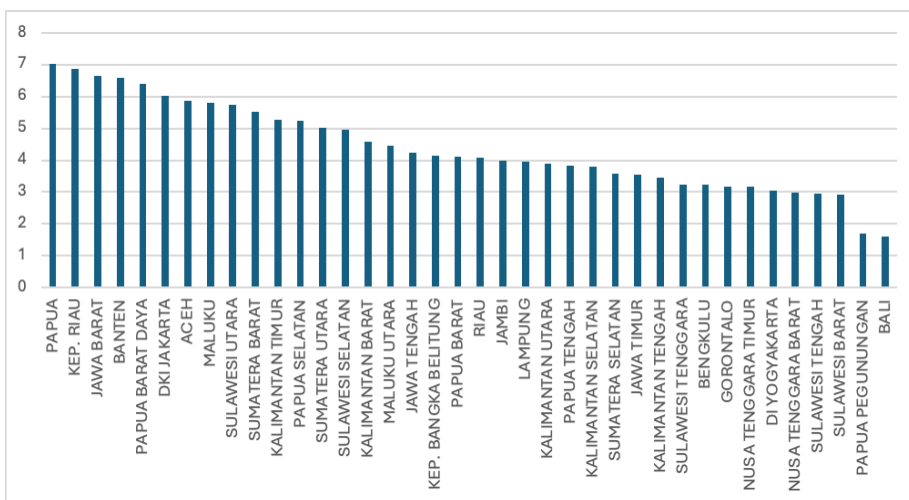
Lebih lanjut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menunjukkan tren penurunan hingga awal tahun 2026 dengan angka sebesar 4,68 persen pada Februari 2026. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan TPT pada periode sebelumnya, yakni Agustus 2025, sebesar 4,85 persen, maupun pada periode Februari 2024 dan 2025, masing-masing sebesar 4,82 persen dan 4,76 persen. Raihian TPT tersebut selaras dengan target TPT yang tertuang dalam APBN 2025, yakni sebesar 4,5 persen hingga 5 persen. Pemerintah harus senantiasa memonitor dan mengevaluasi kebijakan pengurangan pengangguran pada tahun 2026 agar dapat mencapai target TPT sebesar 4,44 persen hingga 4,96 persen sesuai dengan angka yang tercantum dalam dokumen APBN 2026.



Gambar 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia, Februari 2024 s.d. Februari 2026 (dalam persen)

Sumber: BPS (2026; diolah)

Meskipun demikian, TPT secara geografis pada Februari 2026 masih menunjukkan distribusi yang tidak merata. Sejumlah provinsi memiliki TPT yang jauh berada di atas TPT nasional sebesar 4,68 persen. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia, yakni 7,02 persen. Berikutnya, terdapat lima provinsi yang memiliki TPT antara 6 persen hingga 7 persen, yakni Kepulauan Riau (6,87 persen), Jawa Barat (6,64 persen), Banten (6,59 persen), Papua Barat Daya (6,41 persen), dan DKI Jakarta (6,03 persen). Kemudian, terdapat tujuh provinsi lainnya yang memiliki TPT antara 5 persen hingga 6 persen, yaitu Aceh (5,88 persen), Maluku (5,8 persen), Sulawesi Utara (5,75 persen), Sumatera Barat (5,51 persen), Kalimantan Timur (5,27 persen), Papua Selatan (5,25 persen), dan Sumatera Utara (5,01 persen). Jadi, intervensi kebijakan pemerintah dalam pengurangan TPT ke depannya dapat diprioritaskan pada provinsi-provinsi tersebut agar tren penurunan TPT secara nasional dapat terus berlanjut.



Gambar 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Berdasarkan Provinsi, Februari 2026 (dalam persen)

Sumber: BPS (2026; diolah)

Dalam hal ini, pemerintah harus mewaspadaai tren perbaikan pada tiga indikator kesejahteraan tersebut tidak berlanjut pada tahun 2026. Sebab beberapa indikator perekonomian lainnya yang mampu menangkap potret perkembangan ekonomi dan keuangan terkini di atas menunjukkan adanya tren yang patut menjadi perhatian bagi pemerintah. Pemerintah harus

menunjukkan kredibilitasnya dalam mengelola perekonomian negara dengan mengeluarkan kebijakan berbasis bukti dan rasional. Penguatan tata kelola kebijakan juga patut diperhatikan agar pelaku pasar memiliki kepercayaan terhadap seluruh pengambil keputusan ekonomi di Indonesia.

Menavigasi guncangan kesejahteraan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga pada perlindungan daya beli dan ketahanan rumah tangga. Pemerintah perlu memperkuat bantuan sosial adaptif, menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperluas perlindungan bagi pekerja rentan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja produktif. Kebijakan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada kelas menengah melalui pengendalian inflasi, perlindungan pasar kerja, akses pembiayaan yang terjangkau, dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kualitas hidup di tengah gejolak global.

BAB 3.

RISIKO GEOPOLITIK DAN PERUBAHAN IKLIM: MENGUJI KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan Indonesia pada 2026 menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat pertemuan antara risiko geopolitik global dan perubahan iklim. Konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat–Iran dan gangguan jalur perdagangan di Selat Hormuz, berpotensi menghambat distribusi energi, pupuk, bahan kimia, dan komoditas pangan dunia. Pada saat yang sama, ancaman El Niño meningkatkan risiko kekeringan, penurunan produksi pertanian, gangguan ketersediaan air, serta kenaikan harga pangan domestik. Kombinasi kedua faktor tersebut dapat menciptakan tekanan inflasi pangan yang lebih besar dibandingkan guncangan ekonomi biasa.

Risiko geopolitik ditransmisikan ke sektor pangan terutama melalui kenaikan harga energi dan pupuk. Minyak bumi dan gas alam merupakan input penting dalam proses produksi, pengolahan, transportasi, serta distribusi pangan. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya pengangkutan hasil pertanian dari sentra produksi ke pasar konsumen. Sementara itu, kenaikan harga gas alam berpotensi meningkatkan harga pupuk, khususnya pupuk urea yang menggunakan gas sebagai bahan baku utama. Ketika harga pupuk meningkat, biaya produksi petani naik dan berpotensi menurunkan penggunaan pupuk, produktivitas lahan, serta hasil panen.

Gangguan rantai pasok global juga berisiko memengaruhi ketersediaan pangan dan bahan pendukung pertanian di Indonesia. Keterlambatan pengiriman pupuk, pestisida, benih, bahan pakan ternak, maupun komoditas pangan impor dapat memicu kelangkaan pasokan di pasar domestik. Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor pada beberapa komoditas strategis, seperti gandum, kedelai, gula, bawang putih, serta

sejumlah bahan baku pakan dan pangan olahan. Ketika harga internasional meningkat atau jalur perdagangan terganggu, harga pangan dalam negeri dapat terdorong naik, terutama pada komoditas yang tidak dapat segera digantikan oleh produksi domestik.

Di sisi lain, perubahan iklim menjadi ancaman struktural bagi ketahanan pangan nasional. Fenomena El Niño berpotensi menyebabkan curah hujan di Indonesia lebih rendah dari normal, memperpanjang musim kemarau, dan meningkatkan risiko kekeringan di wilayah sentra produksi pangan. Kondisi ini dapat mengganggu pola tanam, menurunkan luas panen, meningkatkan serangan hama dan penyakit, serta menurunkan produktivitas padi, jagung, hortikultura, dan komoditas perkebunan. Risiko tersebut semakin besar apabila kekeringan terjadi bersamaan dengan keterbatasan pasokan air irigasi dan lemahnya kesiapan cadangan pangan daerah.

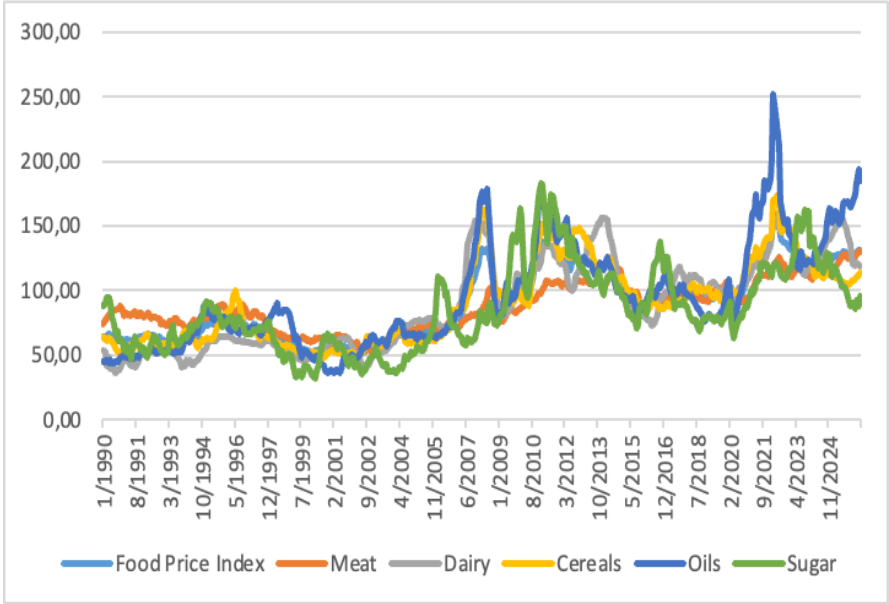
Dampak akhirnya akan dirasakan oleh rumah tangga melalui kenaikan harga pangan dan penurunan daya beli. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak karena proporsi belanja pangan dalam pengeluaran rumah tangga mereka jauh lebih besar. Kenaikan harga beras, cabai, bawang, minyak goreng, telur, daging, dan bahan pangan lainnya dapat meningkatkan angka inflasi pangan, memperburuk kualitas konsumsi, serta meningkatkan risiko kemiskinan dan kerawanan pangan. Kelas menengah juga dapat terdampak melalui kenaikan biaya hidup yang mengurangi ruang konsumsi untuk pendidikan, kesehatan, dan tabungan.

3.1. Dinamika Harga Pangan Global: Dari Stabilitas Menuju Era Volatilitas

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat sekaligus pondasi stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, isu pangan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kemampuan memproduksi bahan makanan, melainkan juga menyangkut dinamika pasar global yang semakin kompleks. Perubahan iklim, gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perubahan pola konsumsi dunia telah menjadikan harga pangan semakin rentan terhadap berbagai guncangan eksternal.

Data *Food Price Index* (FPI) dunia menunjukkan bahwa sepanjang periode 1990–2005 harga pangan global relatif berada dalam kondisi yang

cukup stabil. Indeks harga pangan FAO bergerak pada kisaran 50–82 poin dengan fluktuasi yang masih terkendali. Pada periode tersebut, pasar pangan internasional masih didukung oleh kondisi produksi yang relatif seimbang dengan permintaan sehingga tekanan harga belum terlalu besar. Meski terjadi beberapa gejolak pada komoditas tertentu, seperti minyak nabati dan gula, dampaknya terhadap indeks pangan global secara keseluruhan masih terbatas.



Gambar 3.1 Food Price Index

Sumber: Food and Agriculture Organization (2026)

Memasuki pertengahan dekade 2000-an, dinamika di sektor pangan membawa implikasi terhadap berbagai perubahan. Kenaikan harga energi dunia, meningkatnya penggunaan komoditas pertanian untuk biofuel, serta pertumbuhan permintaan pangan dari negara-negara berkembang mendorong kenaikan harga berbagai komoditas pangan strategis. Indeks harga pangan dunia meningkat dari sekitar 70 poin pada tahun 2005 menjadi lebih dari 115 poin pada akhir 2007. Lonjakan paling tajam terjadi pada kelompok sereal yang naik dari sekitar 60 poin menjadi lebih dari 130 poin dalam waktu kurang dari tiga tahun. Fenomena ini menandai munculnya era baru volatilitas harga pangan global.

Krisis pangan global tahun 2007–2008 menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah ketahanan pangan dunia. Pada Maret 2008, *Food Price Index* mencapai sekitar 132 poin, hampir empat kali lipat dibandingkan awal dekade 2000-an. Harga sereal melonjak hingga lebih dari 160 poin pada tahun 2008, sementara harga minyak nabati mendekati 180 poin. Lonjakan tersebut memicu keresahan sosial di berbagai negara berkembang karena meningkatnya biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk pangan. Krisis ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi domestik, tetapi juga oleh stabilitas pasar pangan global.

Setelah mengalami penurunan pascakrisis keuangan global 2008–2009, harga pangan dunia kembali meningkat pada periode 2010–2012. Kekeringan di sejumlah negara produsen utama, meningkatnya harga energi, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem mendorong indeks harga pangan mencapai rekor baru sebesar hampir 138 poin pada Februari 2011. Pada periode ini, harga gula mencapai lebih dari 180 poin, sedangkan harga minyak nabati dan sereal juga berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan iklim dan faktor cuaca semakin berperan dalam menentukan ketersediaan serta harga pangan dunia.

Sepanjang periode 2013–2019, pasar pangan global memasuki fase normalisasi. Indeks harga pangan cenderung menurun dan bergerak pada kisaran 90–125 poin. Meskipun demikian, volatilitas tetap terjadi pada beberapa komoditas tertentu. Harga produk susu mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada 2013–2014, sementara harga sereal, minyak nabati, dan gula relatif mengalami penurunan akibat melimpahnya pasokan global. Periode ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara produksi dan permintaan masih mampu menjaga stabilitas harga pangan secara relatif, meskipun risiko gangguan tetap ada.

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada tahun 2020 kembali mengubah lanskap pangan global. Pembatasan mobilitas, gangguan logistik internasional, serta ketidakpastian ekonomi menyebabkan tekanan baru pada rantai pasok pangan dunia. Walaupun pada awal pandemi indeks harga pangan sempat menurun hingga sekitar 91 poin pada Mei 2020, pemulihan

ekonomi global yang berlangsung cepat kemudian mendorong lonjakan permintaan pangan dan bahan baku pertanian. Akibatnya, indeks harga pangan meningkat tajam menjadi lebih dari 135 poin pada akhir 2021.

Tekanan harga pangan mencapai puncaknya pada tahun 2022 ketika konflik Rusia–Ukraina mengganggu pasokan gandum, jagung, minyak bunga matahari, pupuk, dan energi dunia. Pada Maret 2022, *Food Price Index* mencapai sekitar 160 poin, menjadi level tertinggi sepanjang sejarah pencatatan data modern. Harga minyak nabati melonjak hingga lebih dari 250 poin, sedangkan harga sereal mencapai sekitar 170 poin. Peristiwa ini menegaskan bahwa geopolitik telah menjadi faktor yang semakin menentukan kondisi ketahanan pangan global. Konflik yang terjadi di satu kawasan dapat memengaruhi harga pangan dan inflasi di hampir seluruh negara dunia.

Meskipun tekanan harga mulai mereda pada 2023 dan 2024, indeks harga pangan dunia masih bertahan pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan dekade 1990-an dan awal 2000-an. Hingga Mei 2026, indeks harga pangan global masih berada di kisaran 131 poin. Menariknya, penurunan harga tidak terjadi secara merata di seluruh komoditas. Harga minyak nabati justru kembali meningkat hingga mencapai sekitar 185 poin pada Mei 2026, sementara harga daging juga menunjukkan tren kenaikan. Sebaliknya, sereal cenderung mengalami moderasi dibandingkan puncaknya pada 2022.

Perjalanan panjang harga pangan global selama lebih dari tiga dekade tersebut menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks. Jika pada masa lalu isu pangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor produksi pertanian, saat ini harga pangan ditentukan oleh interaksi berbagai faktor global, mulai dari perubahan iklim, energi, perdagangan internasional, kebijakan negara-negara produsen, hingga konflik geopolitik. Dalam konteks ini, ketahanan pangan tidak lagi sekadar persoalan meningkatkan produksi, tetapi juga kemampuan suatu negara mengelola risiko, memperkuat sistem distribusi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Oleh karena itu, memahami dinamika harga pangan global menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan kebijakan pangan

nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian dunia yang terus meningkat.

3.2. Distribusi Pangan, Stabilitas Harga, dan Inflasi Pangan

Distribusi pangan menjadi salah satu penentu utama stabilitas harga dan pengendalian inflasi pangan di Indonesia. Ketersediaan produksi pangan yang cukup di tingkat nasional tidak selalu menjamin harga yang stabil di tingkat konsumen. Perbedaan lokasi sentra produksi dan pusat konsumsi, keterbatasan infrastruktur logistik, tingginya biaya transportasi, panjangnya rantai distribusi, serta ketimpangan informasi harga sering menyebabkan disparitas harga antarwilayah. Akibatnya, ketika pasokan di satu daerah melimpah, harga dapat tetap tinggi di daerah lain karena hambatan distribusi dan keterlambatan pengiriman.

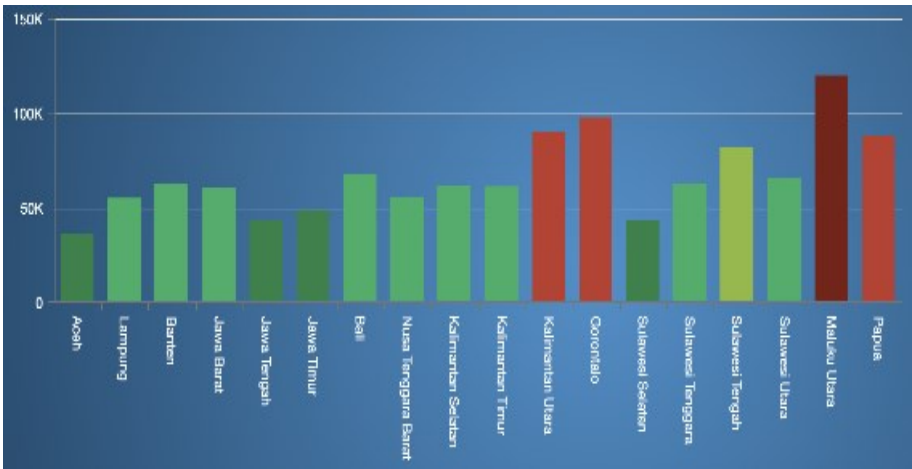
Gangguan distribusi pangan berpotensi semakin besar di tengah gejolak global dan perubahan iklim. Kenaikan harga energi meningkatkan biaya transportasi, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan. Sementara itu, cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, gelombang tinggi, dan kerusakan infrastruktur dapat menghambat arus barang dari sentra produksi ke pasar. Gangguan pada jalur perdagangan global juga dapat meningkatkan harga pupuk, pakan ternak, benih, dan bahan pangan impor, yang pada akhirnya mendorong kenaikan biaya produksi dan harga pangan domestik.

Akibat adanya gangguan pada rantai distribusi pangan maka menimbulkan salah satu paradoks, dimana muncul kondisi ketika peningkatan produksi dan surplus stok pangan nasional tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan harga di tingkat konsumen. Secara teoritis, ketika produksi meningkat dan pasokan melimpah, harga seharusnya mengalami penyesuaian akibat melalui mekanisme pasar. Namun, fakta menunjukkan bahwa meskipun produksi beras meningkat secara signifikan dan cadangan beras pemerintah mencapai level tertinggi dalam sejarah, harga sejumlah komoditas pangan strategis masih mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama ketahanan pangan Indonesia tidak lagi semata-mata terletak pada aspek produksi, melainkan juga pada efektivitas sistem distribusi pangan. Dengan kata lain, persoalan pangan Indonesia saat ini lebih banyak berkaitan dengan

bagaimana pangan berpindah dari sentra produksi menuju pusat-pusat konsumsi secara cepat, merata, dan efisien. Ketika distribusi tidak berjalan optimal, surplus produksi nasional tidak mampu ditransmisikan menjadi harga yang lebih rendah bagi konsumen.

Permasalahan distribusi tercermin dari masih tingginya disparitas harga antar wilayah. Komoditas strategis seperti cabai rawit, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi memiliki rentang harga yang sangat lebar antar daerah. Pada komoditas cabai rawit, misalnya, perbedaan harga antar wilayah dapat mencapai hampir tiga kali lipat. Harga cabai rawit di Aceh berada pada kisaran Rp36.250,00 sementara harga cabai rawit Maluku Utara mencapai Rp120.000,00. Disparitas yang sangat besar ini mengindikasikan bahwa pasar pangan nasional belum terintegrasi secara optimal sehingga kelebihan pasokan di suatu wilayah tidak dapat dengan cepat mengoreksi kekurangan pasokan di wilayah lain.



Gambar 3.2 Harga Cabai Rawit antar Daerah di Pasar Tradisional 19 Juni 2026 (Rp/Kilogram)

Sumber: Bank Indonesia (2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa salah satu hambatan, yaitu distribusi, masih menjadi faktor dominan dalam pembentukan harga pangan. Keterbatasan infrastruktur logistik, tingginya biaya transportasi antar wilayah, ketergantungan pada jalur distribusi tertentu, serta belum meratanya fasilitas penyimpanan dan rantai dingin (*cold chain*) menyebabkan biaya distribusi tetap tinggi. Selain itu, asimetri informasi pasar dan struktur perdagangan

yang cenderung terkonsentrasi pada sejumlah pelaku juga memperlemah efisiensi mekanisme pasar. Akibatnya, meskipun stok nasional mencukupi, konsumen tetap menghadapi harga yang tinggi.

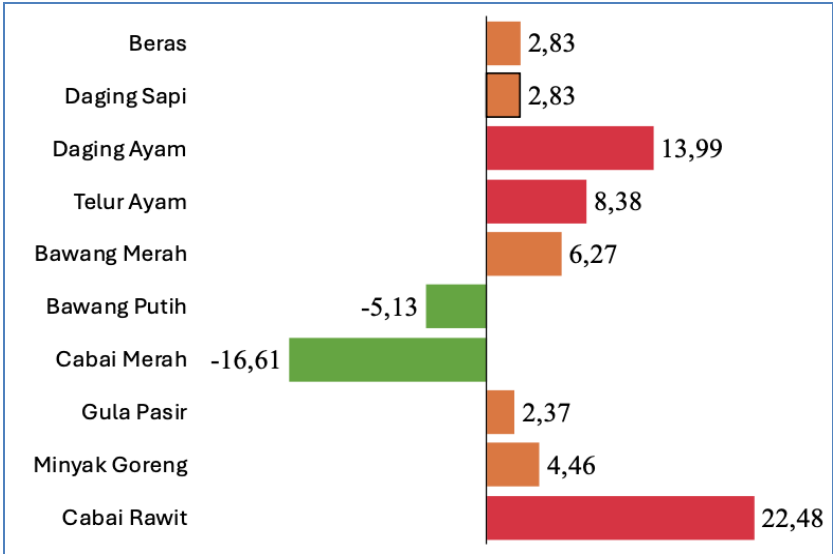
Dalam sistem pangan yang terintegrasi, guncangan pasokan di suatu wilayah seharusnya dapat diimbangi oleh pasokan dari wilayah lain sehingga gejolak harga dapat diminimalkan. Namun, kondisi Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme penyeimbang tersebut belum berjalan secara optimal. Akibatnya, gangguan pasokan yang relatif kecil dapat menghasilkan kenaikan harga yang cukup besar pada tingkat regional.

Pola yang sama juga terlihat pada momentum musiman seperti Ramadan dan Hari Raya Idul Adha. Hampir setiap tahun harga cabai, bawang merah, dan sejumlah komoditas pangan lainnya mengalami lonjakan menjelang hari besar keagamaan. Fenomena yang berulang ini menunjukkan bahwa sistem pangan nasional masih memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi peningkatan permintaan yang bersifat periodik. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi bukan sekadar masalah produksi, melainkan lemahnya kemampuan sistem distribusi dan manajemen pasokan dalam merespons lonjakan kebutuhan secara cepat dan merata.

Padahal, stabilitas harga merupakan salah satu dimensi utama ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan dalam jumlah cukup, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dan relatif stabil sepanjang waktu. Oleh karena itu, tingginya volatilitas harga pangan menjadi indikasi bahwa sistem pangan nasional masih menghadapi tantangan struktural yang cukup serius.

Stabilitas harga pangan tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan produksi atau operasi pasar yang bersifat jangka pendek. Diperlukan reformasi yang lebih mendasar pada sistem logistik pangan nasional, termasuk penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan transparansi informasi pasar, penguatan sistem peringatan dini pasokan, serta digitalisasi rantai pasok pangan. Upaya tersebut akan mempercepat transmisi surplus produksi ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan sehingga disparitas harga dapat ditekan.

Ketika distribusi pangan tidak berjalan optimal dan stabilitas harga terganggu, dampak akhirnya dapat tercermin dalam meningkatnya inflasi pangan. Pada April 2026, sejumlah komoditas pangan strategis mencatat kenaikan harga yang cukup tinggi secara tahunan. Harga cabai rawit meningkat 22,48 persen (*year-on-year/yo*y), daging ayam ras naik 13,99 persen (*yo*y), dan telur ayam meningkat 8,38 persen (*yo*y). Kenaikan ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi pangan masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi nasional.



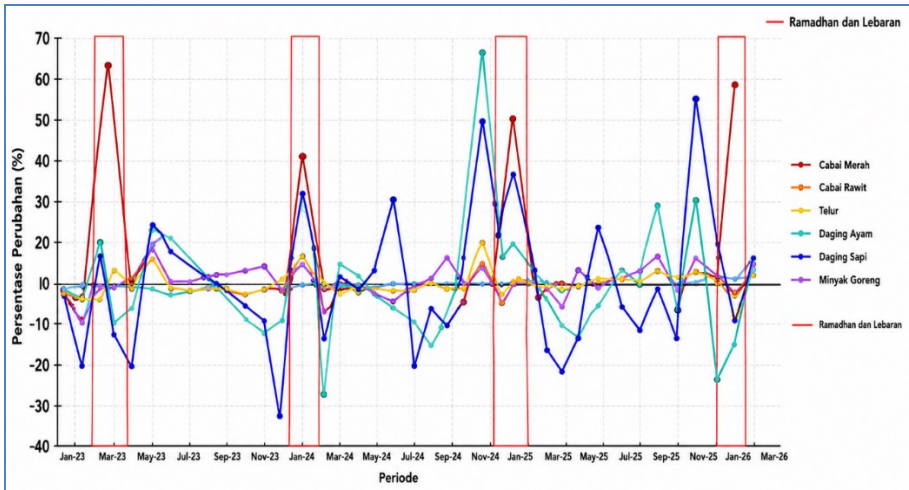
Gambar 3.3 Perubahan Harga Komoditas Pangan April 2026 (%; yoy)

Sumber: Bank Indonesia (2026)

Karakteristik inflasi pangan pada periode tersebut menunjukkan dominasi faktor *cost-push inflation*. Kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh distribusi yang belum efisien, tetapi juga oleh meningkatnya biaya produksi, terutama pada sektor peternakan. Naiknya harga jagung dan kedelai sebagai bahan baku pakan ternak meningkatkan biaya produksi daging ayam dan telur, yang kemudian diteruskan ke harga konsumen. Dengan demikian, tekanan inflasi pangan berasal dari kombinasi faktor distribusi dan peningkatan biaya produksi.

Tekanan inflasi pangan juga kerap terjadi ketika menjelang perayaan hari besar keagamaan. Sejumlah komoditas pangan memiliki pola musiman yang cukup kuat, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Pada Ramadhan di

tahun 2026 ini, fluktuasi harga terbesar terjadi pada kelompok cabai, khususnya cabai merah dan cabai rawit yang mengalami perubahan harga yang jauh lebih besar dibandingkan komoditas pangan lainnya.



Gambar 3.4 Pergerakan Harga Komoditas Pangan Utama di Bulan Ramadhan (% , m-to-m)

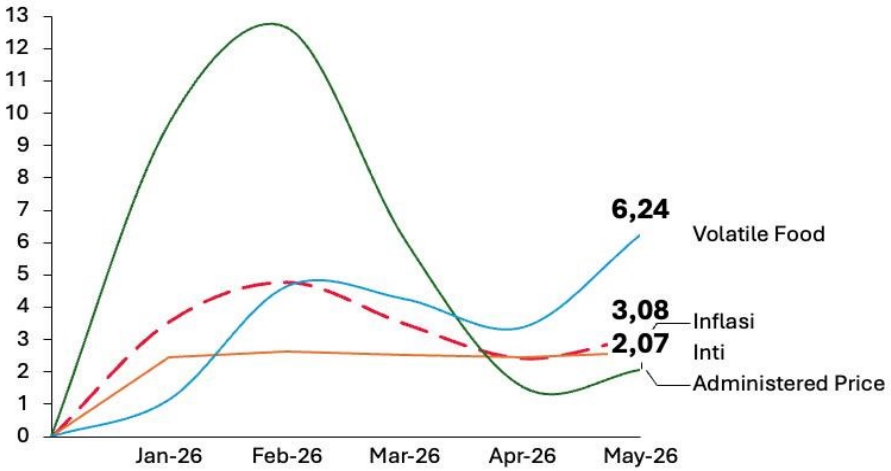
Sumber: Bank Indonesia (2026)

Cabai merah dan cabai rawit secara konsisten menunjukkan volatilitas harga yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada beberapa periode, kenaikan harga bulanan kedua komoditas tersebut mencapai lebih dari 40 persen, bahkan mendekati 60 persen. Sebaliknya, komoditas seperti minyak goreng, telur, dan daging sapi cenderung mengalami fluktuasi yang lebih moderat.

Pola tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan nasional masih sangat dipengaruhi oleh komoditas hortikultura. Meskipun harga pangan pokok relatif terkendali, gejolak harga cabai sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga pangan. Tantangan pengendalian harga pangan tidak hanya berkaitan dengan menjaga kecukupan pasokan, tetapi juga memastikan stabilitas pasokan komoditas yang memiliki volatilitas tinggi.

Tekanan inflasi pangan juga semakin terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Inflasi kelompok *volatile food* yang pada awal tahun relatif rendah mulai meningkat sejak Februari dan mencapai 6,24 persen (*yoy*) pada Mei 2026. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya permintaan

masyarakat menjelang hari raya, terutama untuk komoditas peternakan dan bahan pangan pelengkap konsumsi rumah tangga.



Gambar 3.5 Pergerakan Inflasi *Volatile Food* Januari - Mei 2026 (% , yoy)

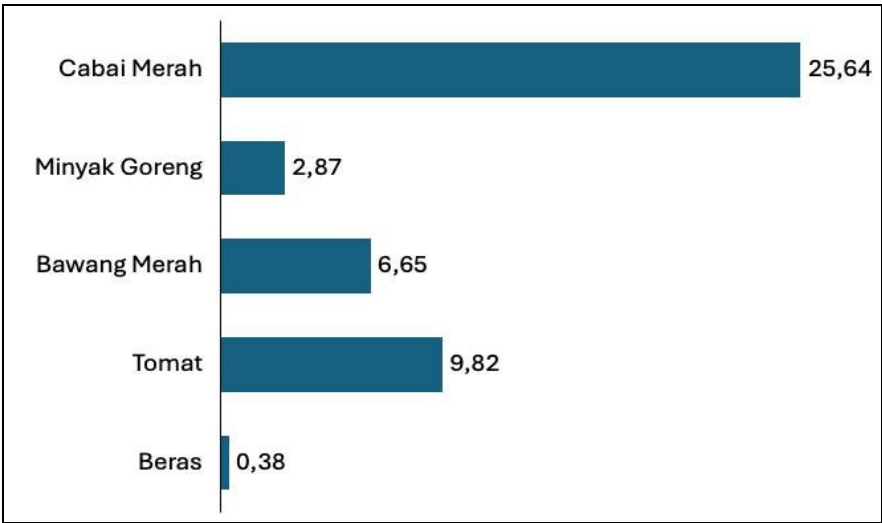
Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Menariknya, pada saat inflasi *volatile food* mencapai 6,24 persen (yoy), inflasi umum hanya berada pada kisaran 3,08 persen (yoy), sedangkan kelompok *administered prices* tercatat sekitar 2,07 persen (yoy). Perbedaan yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa sumber utama tekanan inflasi nasional berasal dari kelompok pangan, bukan dari penyesuaian harga energi, transportasi, maupun komponen yang diatur pemerintah. Dengan kata lain, persoalan inflasi Indonesia pada periode tersebut bersifat sangat sektoral dan terkonsentrasi pada pangan.

Dari perspektif ketahanan pangan, kondisi tersebut memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, meningkatnya inflasi *volatile food* mengindikasikan bahwa sistem pangan nasional masih rentan terhadap guncangan musiman, terutama pada saat hari besar keagamaan. Ketergantungan terhadap pola produksi dan distribusi yang belum sepenuhnya fleksibel menyebabkan peningkatan permintaan musiman langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keterjangkauan (*food affordability*) dalam ketahanan pangan masih menghadapi tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang proporsi pengeluaran pangannya relatif besar.

Kedua, lonjakan inflasi pangan menjelang Hari Raya Idul Adha mencerminkan adanya tekanan pada dimensi ketersediaan (*food availability*). Meskipun secara nasional stok pangan kemungkinan berada dalam kondisi cukup, distribusi antar daerah dan kecepatan respons rantai pasok belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan konsumsi dalam waktu singkat. Keterbatasan infrastruktur logistik, konsentrasi produksi pada wilayah tertentu, serta tingginya biaya distribusi dapat memperbesar disparitas harga antar wilayah dan memperkuat tekanan inflasi pangan.

Ketiga, fenomena ini menegaskan pentingnya penguatan aspek stabilitas (*food stability*) dalam ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari kecukupan produksi, tetapi juga dari kemampuan sistem pangan menjaga stabilitas pasokan dan harga ketika menghadapi guncangan permintaan yang bersifat periodik seperti Hari Raya Idul Adha. Tingginya inflasi *volatile food* menunjukkan bahwa mekanisme stabilisasi pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah, operasi pasar, penguatan distribusi, dan koordinasi pengendalian inflasi daerah, masih perlu diperkuat agar gejolak harga tidak berulang pada setiap momentum hari besar keagamaan.



Gambar 3.6 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Mei 2026 (% , m-to-m)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Lebih lanjut, tekanan inflasi menjelang Idul Adha juga terutama berasal dari komoditas hortikultura. Pada Mei 2026, harga cabai merah meningkat 25,64 persen (*month to month/m-to-m*), tomat naik 9,82 persen (*m-to-m*), dan bawang merah meningkat 6,65 persen (*m-to-m*). Sebaliknya, inflasi beras hanya mencapai 0,38 persen (*m-to-m*), hal ini menunjukkan bahwa pasokan pangan pokok utama relatif terjaga. Fakta ini memperlihatkan bahwa kerentanan inflasi pangan Indonesia saat ini semakin terkonsentrasi pada komoditas hortikultura yang memiliki karakteristik produksi musiman, mudah rusak, dan sangat bergantung pada kelancaran distribusi.

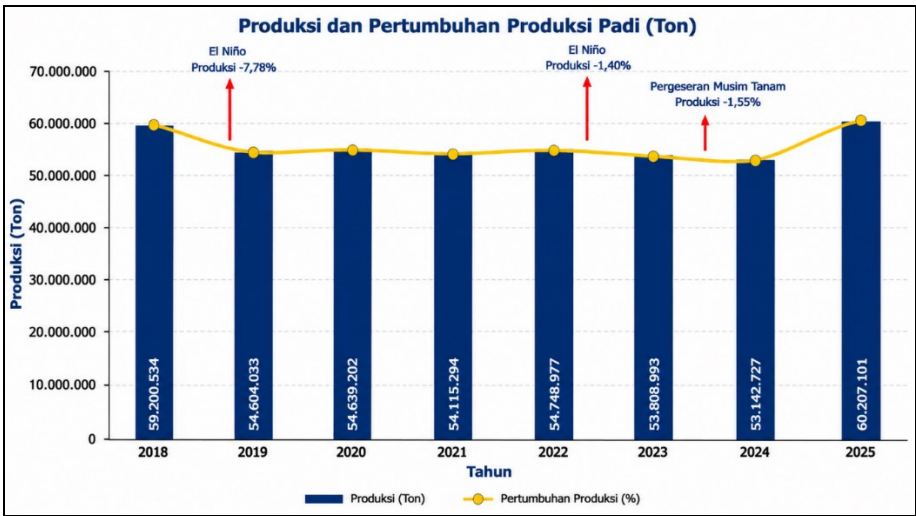
Dari perspektif ketahanan pangan, tingginya inflasi pangan memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, inflasi pangan secara langsung menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk pangan. Kedua, inflasi pangan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar ketimpangan sosial karena dampaknya lebih besar terhadap kelompok rentan. Ketiga, tingginya inflasi pangan menunjukkan bahwa dimensi *food affordability*, *food availability*, dan *food stability* masih menghadapi tantangan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan.

3.3. Risiko Perubahan Iklim dan Dinamika Global terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Keberhasilan pembangunan sektor pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi pada kondisi normal, tetapi juga oleh kemampuan sistem pangan dalam menghadapi berbagai guncangan eksternal yang berpotensi mengganggu ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan. Dalam konteks tersebut, perubahan iklim dan dinamika geopolitik global menjadi dua faktor utama yang semakin memengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Berbeda dengan tantangan internal seperti produktivitas dan distribusi yang relatif dapat dikendalikan melalui kebijakan nasional, risiko iklim dan perkembangan global memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berada di luar kendali langsung pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi terhadap berbagai risiko tersebut menjadi elemen penting dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi sektor pangan Indonesia pada tahun 2026 adalah meningkatnya probabilitas terjadinya fenomena El Niño. Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam laporan, terdapat kemungkinan terjadinya El Niño dengan probabilitas antara 50 hingga 80 persen pada paruh kedua tahun 2026. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa El Niño memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian Indonesia, terutama melalui penurunan curah hujan, peningkatan kekeringan, dan terganggunya pola tanam petani.

Dampak El Niño terhadap sektor pangan dapat terjadi pada berbagai tahapan produksi. Pada tahap awal, berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan keterlambatan musim tanam dan menurunkan luas tanam petani. Pada tahap berikutnya, kekurangan air selama fase pertumbuhan tanaman dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan risiko gagal panen. Jika kondisi tersebut terjadi secara luas pada sentra produksi utama, maka total produksi nasional dapat mengalami penurunan yang signifikan. Dalam situasi yang lebih ekstrem, gangguan produksi dapat memicu kenaikan harga pangan, memperbesar tekanan inflasi, serta meningkatkan kebutuhan impor untuk menjaga stabilitas pasokan domestik.



Gambar 3.7 Pergerakan Produksi Padi 2018-2025 (Ton)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Seperti yang telah dijelaskan bahwa selain risiko iklim, sektor pangan Indonesia juga menghadapi tekanan yang berasal dari perkembangan ekonomi dan geopolitik global. Konflik yang terjadi di berbagai kawasan strategis dunia telah memengaruhi stabilitas rantai pasok pangan internasional. Gangguan jalur perdagangan, peningkatan biaya logistik global, serta ketidakpastian pasokan energi menyebabkan harga berbagai komoditas pangan dunia mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas pangan dan bahan baku produksi pertanian.

Perkembangan harga pangan global menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar internasional masih berlangsung hingga awal tahun 2026. Indeks Harga Pangan FAO (*FAO Food Price Index*) kembali mengalami kenaikan setelah sebelumnya mengalami penurunan pada beberapa periode. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya harga minyak nabati, gula, produk susu, dan daging. Walaupun Indonesia relatif mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri, perubahan harga pangan dunia tetap memberikan dampak tidak langsung terhadap pasar domestik melalui mekanisme perdagangan internasional dan biaya produksi pertanian.

Salah satu bentuk dampak yang paling nyata adalah kenaikan harga pupuk. Industri pupuk dunia sangat bergantung pada harga energi, terutama gas alam yang menjadi bahan baku utama dalam produksi pupuk nitrogen seperti urea. Ketika harga energi meningkat akibat konflik geopolitik atau gangguan pasokan global, biaya produksi pupuk juga mengalami kenaikan. Kondisi tersebut kemudian diteruskan ke tingkat petani dalam bentuk kenaikan harga input produksi. Akibatnya, biaya usaha tani meningkat dan margin keuntungan petani menjadi semakin tertekan.

Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi pupuk yang relatif besar. Kapasitas produksi urea nasional mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik berada pada kisaran 6,4 juta ton. Secara teoritis, kondisi tersebut menciptakan surplus produksi yang memungkinkan Indonesia melakukan ekspor pupuk ke pasar internasional. Namun demikian, persoalan utama yang masih dihadapi bukanlah kapasitas produksi, melainkan efektivitas distribusi pupuk hingga ke tingkat petani.

Meskipun stok pupuk nasional tersedia dalam jumlah yang cukup, berbagai keluhan mengenai kelangkaan pupuk di tingkat petani masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan nasional dan aksesibilitas di tingkat lapangan. Dalam jangka panjang, kombinasi antara perubahan iklim dan ketidakpastian global berpotensi meningkatkan volatilitas sektor pangan nasional. Oleh karena itu, strategi ketahanan pangan tidak dapat lagi hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Diperlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui pembangunan sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, diversifikasi sumber pangan, penguatan cadangan pangan strategis, serta pengembangan sistem peringatan dini yang mampu mengidentifikasi risiko produksi dan distribusi secara lebih cepat. Dengan demikian, Indonesia dapat meminimalkan dampak berbagai guncangan eksternal terhadap stabilitas pangan nasional.

3.4. Analisis Komoditas Strategis Pangan dan Tantangan Hilirisasi Agribisnis

Selain beras sebagai komoditas utama pangan nasional, stabilitas sektor pangan Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai komoditas strategis lainnya, seperti cabai, bawang merah, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan minyak kelapa sawit. Komoditas-komoditas tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap inflasi pangan, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan sistem pangan nasional. Oleh karena itu, analisis sektor pangan tidak dapat hanya berfokus pada beras, tetapi juga harus mencakup dinamika komoditas strategis lainnya yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pada April 2026, tekanan inflasi pangan nasional masih didominasi oleh kelompok *volatile food*. Berdasarkan Gambar 3.3, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan secara tahunan, terutama cabai rawit yang meningkat sebesar 22,48 persen, daging ayam ras sebesar 13,99 persen, telur ayam ras sebesar 8,38 persen, dan bawang merah sebesar 6,27 persen. Kenaikan harga tersebut menunjukkan bahwa persoalan stabilitas pangan nasional masih sangat dipengaruhi oleh komoditas hortikultura dan peternakan yang memiliki karakteristik produksi yang sensitif terhadap perubahan cuaca, distribusi, dan biaya produksi.

Komoditas cabai merupakan salah satu contoh paling jelas mengenai kerentanan sistem pangan Indonesia terhadap gangguan pasokan. Hampir setiap tahun, cabai menjadi penyumbang utama inflasi pangan, terutama pada periode Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Karakteristik produksi cabai yang tersebar, umur simpan yang pendek, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan menyebabkan pasokan sangat mudah terganggu. Ketika terjadi gangguan produksi akibat cuaca atau distribusi, harga cabai dapat meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan sektor hortikultura Indonesia tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada lemahnya sistem pascapanen dan logistik komoditas segar.

Hal yang serupa juga terjadi pada komoditas bawang merah. Meskipun Indonesia telah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan bawang merah dari produksi domestik, fluktuasi harga masih sering terjadi akibat ketidakseimbangan distribusi antarwilayah. Ketika produksi berlimpah di sentra utama seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, harga di tingkat petani sering kali jatuh. Namun pada saat yang sama, harga di daerah konsumen tetap tinggi akibat biaya distribusi dan keterbatasan akses pasar. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya integrasi pasar pangan nasional.

Pada sektor peternakan, kenaikan harga daging ayam dan telur ayam sepanjang tahun 2026 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pakan ternak. Jagung dan kedelai sebagai bahan baku utama pakan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan akibat tekanan pasar global dan meningkatnya biaya produksi domestik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor peternakan Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan dan harga bahan baku pakan. Ketika harga pakan meningkat, biaya produksi peternakan ikut naik dan pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga daging dan telur.

Persoalan lain yang semakin penting dalam konteks pangan nasional adalah dinamika industri minyak kelapa sawit. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan stabilitas pasokan minyak nabati baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar global. Pada awal tahun 2026, produksi minyak sawit mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian,

kenaikan produksi tersebut diikuti oleh peningkatan konsumsi domestik dan ekspor yang lebih tinggi sehingga menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan stok nasional.

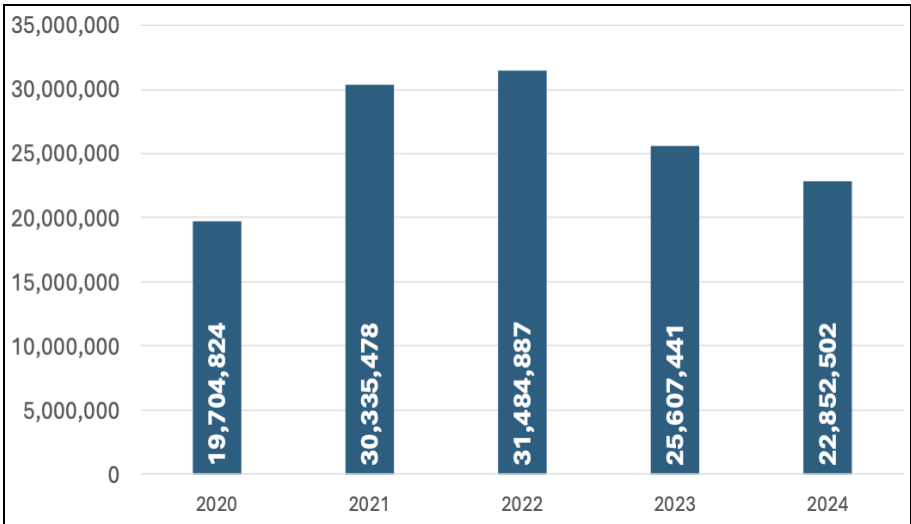
Peningkatan konsumsi domestik terutama dipicu oleh implementasi program biodiesel B50 yang membutuhkan pasokan minyak sawit dalam jumlah besar. Program tersebut memberikan manfaat bagi ketahanan energi nasional karena mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Akan tetapi, di sisi lain, peningkatan kebutuhan biodiesel menciptakan kompetisi penggunaan minyak sawit antara sektor energi, pangan, dan ekspor. Akibatnya, pasokan untuk kebutuhan minyak goreng domestik menjadi lebih terbatas dan berpotensi meningkatkan tekanan harga apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi yang memadai.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 35 persen melalui Bulog dan BUMN pangan guna menjaga keterjangkauan program Minyakita. Kebijakan DMO pada dasarnya merupakan instrumen yang penting untuk menjamin pasokan minyak goreng domestik. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan distribusi, kepatuhan pelaku usaha, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa pasokan yang dialokasikan benar-benar sampai kepada konsumen sasaran.

Dalam perspektif jangka panjang, tantangan terbesar industri sawit bukan hanya menjaga pasokan minyak goreng, tetapi juga meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Laporan menunjukkan bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi tekanan pasokan terletak pada percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), intensifikasi kebun, dan peningkatan produktivitas tanaman. Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat perluasan lahan sawit menghadapi berbagai keterbatasan lingkungan dan regulasi. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas menjadi satu-satunya cara yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi, pangan, dan ekspor secara bersamaan.

Selain perannya sebagai komoditas pangan, sawit juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap neraca perdagangan Indonesia. Nilai surplus perdagangan kelapa sawit mencapai lebih dari US\$ 22,8 miliar pada tahun 2024 dan tetap menjadi salah satu sumber devisa terbesar nasional. Meskipun demikian, ketergantungan terhadap ekspor produk primer masih

menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pengembangan industri hilir. Hilirisasi sawit menjadi produk oleofood, biodiesel, oleokimia, dan berbagai produk turunannya berpotensi meningkatkan nilai tambah domestik, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional.



Gambar 3.8 Neraca Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia 2020-2024 (Ribu US\$)

Sumber: Kementerian Pertanian (2025)

Namun demikian, upaya hilirisasi masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk fluktuasi harga global, keterbatasan teknologi pengolahan lanjut, kebutuhan investasi yang besar, serta meningkatnya tuntutan standar keberlanjutan dari pasar internasional. Oleh karena itu, pengembangan hilirisasi pangan dan agribisnis perlu didukung oleh kebijakan industri yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi.

3.5. Rekomendasi Sektor Pangan

Dalam menghadapi dinamika saat ini, kebijakan ketahanan pangan perlu diarahkan pada penguatan produksi domestik sekaligus pengamanan pasokan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk, memperkuat cadangan pangan nasional dan daerah, mempercepat rehabilitasi irigasi, memperluas penggunaan benih tahan kekeringan, serta memperbaiki sistem

peringatan dini iklim dan distribusi pangan. Diversifikasi sumber impor pangan dan pupuk juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau satu jalur perdagangan. Selain itu, stabilisasi harga melalui penguatan peran Bulog, operasi pasar yang tepat waktu, dan perlindungan pendapatan petani perlu dilakukan agar ketahanan pangan tidak hanya berarti ketersediaan pangan, tetapi juga keterjangkauan harga bagi masyarakat serta keberlanjutan usaha tani.

Ke depan, stabilitas harga pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi perlindungan kesejahteraan masyarakat. Inflasi pangan yang tinggi bukan hanya persoalan statistik ekonomi, tetapi juga dapat memperbesar kemiskinan, menurunkan kualitas konsumsi, dan memperlemah daya tahan rumah tangga. Karena itu, penguatan distribusi pangan, efisiensi rantai pasok, stabilisasi harga, dan peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan secara terpadu agar ketahanan pangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecukupan produksi, tetapi juga oleh keterjangkauan harga dan kepastian pasokan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan analisis mengenai kesejahteraan petani, distribusi pangan, stabilitas harga, risiko perubahan iklim, dinamika global, serta tantangan komoditas strategis dan hilirisasi agribisnis, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang perlu menjadi prioritas dalam penguatan ketahanan pangan nasional.

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Perbaikan Struktur Ekonomi Pertanian

Peningkatan produksi pangan nasional harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sistem pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan pendapatan petani melalui pengendalian biaya produksi, perluasan akses pembiayaan, subsidi input yang lebih tepat sasaran, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani. Selain itu, reformasi tata niaga pangan perlu dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok sehingga nilai tambah produksi dapat lebih banyak dinikmati oleh petani, bukan hanya oleh pelaku perdagangan dan distribusi.

2. *Mengurangi Ketimpangan Produktivitas Antarwilayah*

Perbedaan produktivitas yang tinggi antar provinsi menunjukkan masih adanya kesenjangan akses terhadap teknologi, irigasi, benih unggul, pupuk, dan layanan penyuluhan. Pemerintah perlu memprioritaskan investasi pertanian di wilayah dengan produktivitas rendah melalui pembangunan infrastruktur irigasi, mekanisasi pertanian, modernisasi budidaya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Pendekatan ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara lebih merata dan inklusif.

3. *Mereformasi Sistem Distribusi dan Logistik Pangan Nasional*

Tingginya disparitas harga antar wilayah menunjukkan bahwa tantangan utama sektor pangan tidak lagi semata-mata pada aspek produksi, tetapi juga pada distribusi. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan sistem logistik pangan nasional yang terintegrasi melalui pengembangan pusat distribusi regional, *cold chain system* untuk komoditas mudah rusak, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta digitalisasi rantai pasok pangan. Reformasi logistik akan memperpendek rantai distribusi, menurunkan biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi pasar pangan nasional.

4. *Memperkuat Sistem Stabilisasi Harga Pangan*

Pengendalian inflasi pangan perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih antisipatif dan berbasis data. Pemerintah perlu memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan efektivitas operasi pasar, serta memperbaiki sistem pemantauan harga dan pasokan secara *real time*. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BULOG, dan BUMN pangan juga perlu ditingkatkan agar respons terhadap gejolak harga dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

5. *Membangun Sistem Pangan yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim*

Meningkatnya risiko *El Niño* dan perubahan iklim mengharuskan pembangunan sektor pangan berorientasi pada ketahanan jangka

panjang. Pemerintah perlu memperluas implementasi pertanian adaptif iklim melalui penggunaan varietas tahan kekeringan, pengembangan teknologi hemat air, rehabilitasi jaringan irigasi, serta penguatan sistem informasi iklim bagi petani. Selain itu, perlu dikembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu mendeteksi risiko produksi dan distribusi pangan secara lebih cepat sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi gangguan pasokan.

6. *Memperkuat Ketahanan terhadap Guncangan Global*

Ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga pangan dunia menuntut Indonesia untuk mengurangi kerentanan terhadap pasar global. Upaya yang perlu dilakukan antara lain memperkuat cadangan pangan strategis, meningkatkan kemandirian produksi input pertanian, memperbaiki distribusi pupuk, serta memperluas diversifikasi sumber pangan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi pangan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gangguan global.

7. *Mengembangkan Sistem Pascapanen dan Penyimpanan Komoditas Hortikultura*

Komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah masih menjadi sumber utama volatilitas harga pangan. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar pada fasilitas penyimpanan, pengolahan pascapanen, sistem distribusi, dan gudang berpendingin yang mampu menjaga kualitas produk. Penguatan infrastruktur pascapanen akan membantu mengurangi kehilangan hasil, menjaga kontinuitas pasokan, serta mengurangi fluktuasi harga yang selama ini berulang setiap tahun.

8. *Memperkuat Kemandirian Industri Pakan dan Peternakan*

Tingginya ketergantungan sektor peternakan terhadap bahan baku pakan menyebabkan harga daging dan telur rentan terhadap gejolak global. Pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri pakan berbasis bahan baku domestik, meningkatkan produktivitas

jagung nasional, serta mendorong diversifikasi bahan pakan alternatif. Langkah ini penting untuk memperkuat daya saing peternakan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga pangan sumber protein hewani.

9. *Menyeimbangkan Kebutuhan Pangan, Energi, dan Ekspor pada Industri Sawit*

Peningkatan konsumsi sawit untuk program biodiesel perlu diimbangi dengan kebijakan yang menjamin ketersediaan minyak goreng domestik. Implementasi *Domestic Market Obligation* (DMO) harus diperkuat melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat, transparansi rantai pasok, serta peningkatan akuntabilitas pelaku usaha. Di saat yang sama, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus menjadi prioritas agar kebutuhan pangan, energi, dan ekspor dapat dipenuhi secara berkelanjutan tanpa ekspansi lahan yang berlebihan.

10. *Mendorong Hilirisasi Agribisnis Berbasis Nilai Tambah*

Transformasi sektor pangan perlu diarahkan dari sekadar peningkatan produksi menuju penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi. Pemerintah perlu memperbanyak dan mempercepat hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan melalui pengembangan industri pengolahan pangan, oleokimia, bioenergi, serta produk pangan olahan bernilai tinggi. Dukungan kebijakan industri, insentif investasi, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci untuk memperkuat daya saing agribisnis nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi sektor pangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

11. *Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Sistem*

Ke depan, paradigma pembangunan pangan perlu bergeser dari pendekatan yang berfokus pada produksi menuju pendekatan sistem pangan (*food system approach*) yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi, stabilitas harga, keberlanjutan lingkungan, dan

kesejahteraan pelaku usaha. Dengan demikian, keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya diukur dari besarnya produksi nasional, tetapi juga dari kemampuan sistem pangan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan.

BAB 4.

KETERGANTUNGAN ENERGI INDONESIA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Indonesia masih menghadapi persoalan struktural berupa tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketergantungan ini menjadi semakin rentan ketika pasar energi global mengalami gejolak akibat konflik geopolitik, gangguan jalur perdagangan, perubahan kebijakan negara produsen, serta volatilitas harga minyak dunia. Ketika harga minyak internasional meningkat, tekanan langsung muncul pada biaya impor BBM, subsidi energi, inflasi, serta defisit transaksi berjalan.

Di sektor migas, produksi domestik Indonesia cenderung menurun dalam jangka panjang akibat lapangan migas yang menua, sementara konsumsi BBM terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan, aktivitas industri, dan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia semakin bergantung pada impor minyak mentah maupun produk BBM. Ketergantungan impor ini membuat APBN sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Ketahanan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan energi domestik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko harga global, mempercepat transisi energi, menjaga stabilitas fiskal, dan memastikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat serta dunia usaha.

4.1. Guncangan Global dan Beban Energi yang Kita Tanggung

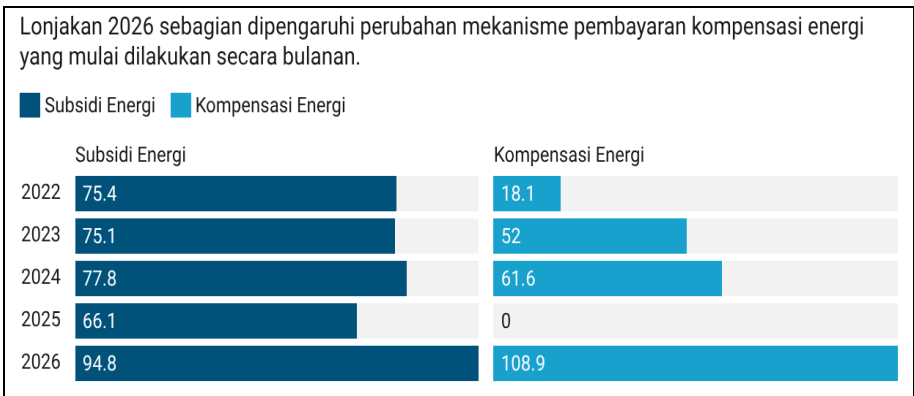
Ketika Geopolitik Menentukan Harga Energi Kita

Tekanan harga energi global seperti tergambar pada Bab 1 pada akhirnya bermuara pada satu tempat yakni belanja negara kita. Sebagai negara pengimpor neto minyak bumi, Indonesia tidak hanya menghadapi

kenaikan biaya impor energi, tetapi juga harus menanggung konsekuensi fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi domestik.

Pemerintah merespons tekanan tersebut dengan sempat mempertahankan harga BBM bersubsidi dan tarif energi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun, konsekuensinya adalah meningkatnya kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi. Hingga Mei 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun atau setara 45,6 persen dari pagu APBN 2026, yang terdiri atas subsidi sebesar Rp94,8 triliun dan kompensasi sebesar Rp108,9 triliun.

Peningkatan tersebut memang dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pembayaran kompensasi energi yang mulai dilakukan secara bulanan sejak 2026. Namun, faktor administratif tersebut tidak menutupi fakta bahwa beban fiskal sektor energi memang terus membesar. Dengan kata lain, lonjakan realisasi belanja bukan semata-mata akibat perubahan skema pembayaran, melainkan juga mencerminkan tingginya kebutuhan intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga energi di tengah gejolak pasar global. Jika tren ini berlanjut, total subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 akan terus membengkak. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh volatilitas pasar energi internasional.



Gambar 4.1. Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi

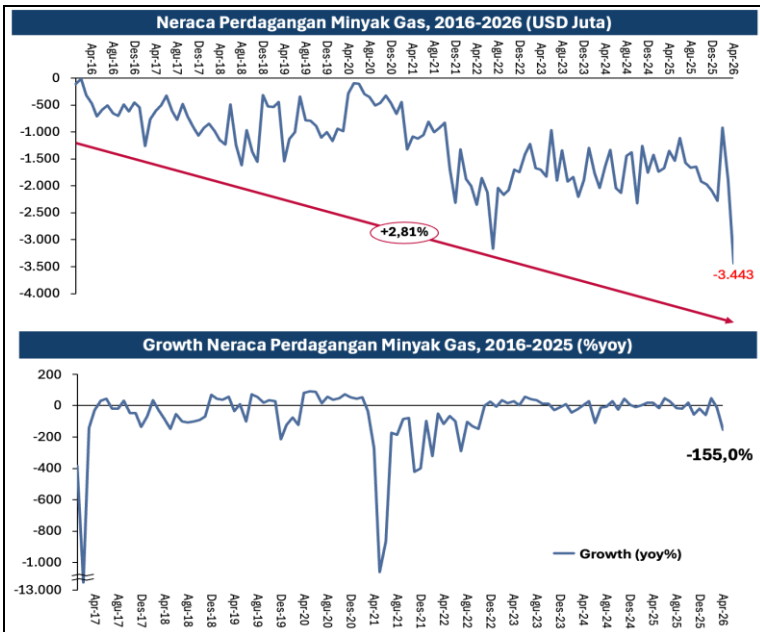
Sumber: Kementerian Keuangan (2026)

Meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi sesungguhnya merupakan gejala dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu kerentanan

struktural sektor migas Indonesia. Indonesia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Produksi (lifting) minyak domestik hanya berkisar 600-610 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia bergantung pada impor sekitar satu juta barel minyak per hari.

Ketergantungan tersebut tercermin pada kinerja neraca perdagangan migas yang terus memburuk dalam jangka panjang. Pada April 2026, defisit neraca perdagangan migas mencapai US\$3,44 miliar, menjadi salah satu titik terendah sepanjang periode 2016-2026. Secara kumulatif, dalam empat bulan pertama 2026, sektor migas mencatatkan defisit sebesar US\$8,52 miliar dan menjadi faktor utama menyusutnya surplus perdagangan nasional.

Berdasarkan data BPS, pelebaran defisit tersebut terutama didorong oleh tingginya impor minyak mentah (*crude oil*), bahan bakar minyak (BBM), dan gas alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap guncangan geopolitik global tidak hanya meningkatkan tagihan subsidi pemerintah, tetapi juga memperburuk posisi eksternal Indonesia melalui peningkatan ketergantungan impor energi.

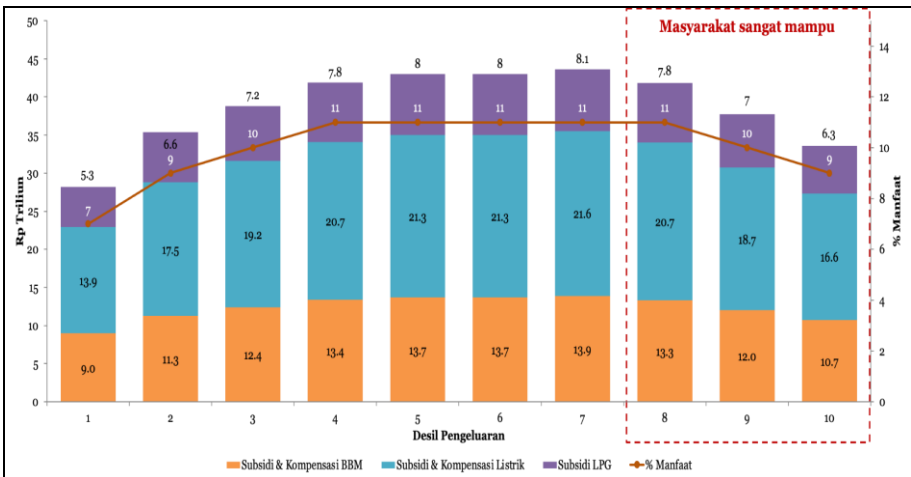


Gambar 4.2. Perkembangan Perdagangan Minyak dan Gas (Neraca dan Pertumbuhan)

Sumber: BPS, diolah (2026)

Dengan demikian, tantangan ketahanan energi Indonesia tidak lagi sekadar persoalan fluktuasi harga, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang menghubungkan tiga tekanan sekaligus: memburuknya neraca perdagangan migas, meningkatnya beban fiskal melalui subsidi dan kompensasi energi, serta semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah untuk membiayai prioritas pembangunan lainnya.

Besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya diikuti dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Data distribusi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 menunjukkan bahwa kelompok masyarakat sangat mampu (desil 8-10) masih menikmati porsi manfaat yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa skema subsidi yang masih berbasis komoditas (*commodity-based subsidy*) cenderung menguntungkan kelompok dengan tingkat konsumsi energi yang lebih tinggi. Akibatnya, ketika pemerintah meningkatkan intervensi fiskal untuk meredam dampak gejolak energi global, sebagian manfaatnya justru turut dinikmati oleh kelompok rumah tangga yang tidak menjadi target utama kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa tantangan kebijakan energi Indonesia bukan hanya terletak pada besarnya anggaran yang harus disediakan, tetapi juga pada efektivitas dan ketepatan sasaran penyalurannya.



Gambar 4.3. Subsidi Energi dan Kompensasi

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, diolah (2026)

4.2. Transisi Energi Tidak Bisa Ditunda Lagi

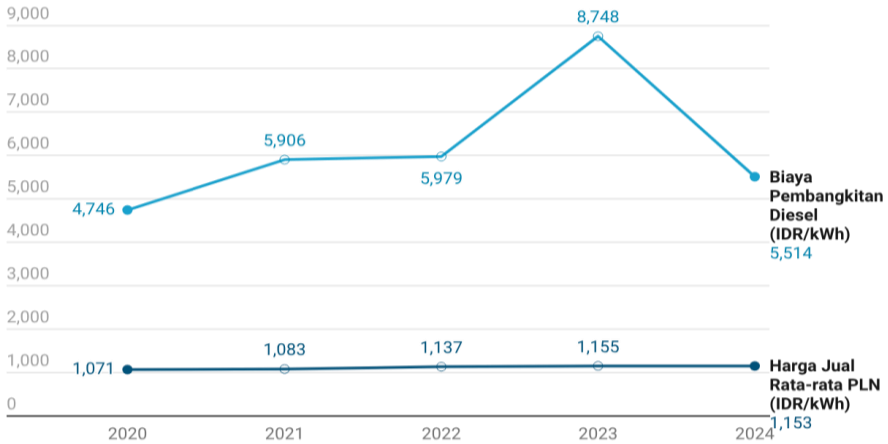
Selama bertahun-tahun, dalam kebijakan energi kita mempertanyakan *berapa biaya transisi ke EBT?* Pertanyaan ini mengandung asumsi agak keliru karena seolah mempertahankan *status quo* adalah pilihan yang gratis. Padahal tidak ada yang gratis dari *status quo* yang kita pilih selama ini. Dalam lima tahun terakhir telah dihabiskan Rp1.462 triliun untuk subsidi energi fosil uang yang tidak menghasilkan satu kilowatt pun kapasitas pembangkitan baru, tidak membangun satu kilometer pun jaringan transmisi baru, dan tidak mengurangi satu barel pun ketergantungan impor. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan bukan "berapa biaya transisi?" namun "berapa lagi kita sanggup membayar untuk tidak bertransisi?"

Indonesia menghabiskan sekitar US\$ 24 miliar untuk impor minyak neto pada 2021, dan angka ini melonjak ke kisaran US\$ 35 miliar pada 2022 ketika harga energi global melonjak pasca invasi Ukraina (IEA, 2022). Jika *path* ini tidak diubah, pada 2050 tagihan impor minyak dan gas Indonesia dalam skenario *business-as-usual* diproyeksikan mencapai US\$ 100 miliar per tahun yang artinya Indonesia akan menghabiskan porsi PDB yang lebih besar untuk membeli energi impor dibandingkan hari ini (IEA, 2022). Sebaliknya, dalam skenario transisi, beban impor minyak dan gas tersebut lebih dari tiga kali lebih rendah pada 2050.

Argumen bahwa energi terbarukan mahal juga sebetulnya tidak berlaku setidaknyanya di beberapa kasus. Secara global, LCOE *onshore wind* turun dari rata-rata US\$ 135/MWh pada 2009 menjadi kurang dari separuhnya pada 2024 (IRENA, 2024). Atas periode yang sama, harga rata-rata *utility-scale solar photovoltaic* anjlok dari US\$ 359/MWh menjadi US\$ 61,4/MWh. Penurunan 83 persen dalam 15 tahun adalah salah satu deflasi teknologi tercepat dalam sejarah ekonomi modern.

Untuk konteks Indonesia yang paling konkret dengan lebih dari 5.200 pembangkit diesel yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia saat ini menggunakan diesel bersubsidi sebagai sumber listrik utama (IEEFA, 2026). IEEFA menghitung bahwa solar plus penyimpanan baterai (*battery energy storage system/BESS*) dapat menghasilkan listrik seharga US\$ 0,08-0,20 per kWh, dibandingkan biaya diesel US\$ 0,29-0,65 per kWh. Beralih ke solar plus

BESS berpotensi menghasilkan penghematan US\$ 2 miliar dari impor diesel yang terhindarkan dan US\$ 1,5-2 miliar pengurangan subsidi tahunan.



Gambar 4.4. Biaya Pembangkitan Diesel vs Harga Jual Rata-rata PLN (Rp/kWh)

Sumber: PLN dalam IEEFA

Data PLN memperlihatkan betapa mahalnya pilihan jika tidak bertransisi energi. Biaya pembangkitan listrik berbasis diesel melonjak dari Rp 4.746 per kWh pada 2020 hingga mencapai puncaknya di Rp 8.748 per kWh pada 2023 sementara harga jual rata-rata PLN kepada konsumen nyaris tidak bergerak, terkunci di kisaran Rp 1.071-1.155 per kWh sepanjang periode yang sama. Selisih antara kedua garis itu merupakan beban yang ditanggung subsidi dan kompensasi negara untuk setiap kilowatt-hour yang dialirkan ke lebih dari 5.200 sistem terisolasi berbasis diesel di seluruh kepulauan.

Solar sudah 2-4 kali lebih murah dari diesel bahan bakar yang sama yang kita impor, subsidi, dan harganya kini melonjak akibat konflik Timur Tengah. Hambatan yang tersisa bukan lagi harga teknologi namun hambatannya adalah regulasi yang belum menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi baru ini.

4.3. Sejauh Mana Kita Sudah Melangkah Menuju Transisi Energi?

Indonesia telah memulai langkah menuju transisi energi melalui peningkatan kapasitas energi terbarukan, pengembangan kendaraan listrik,

program biodiesel, serta komitmen penghentian bertahap PLTU batu bara. Namun, laju transisi masih tidak sebanding dengan besarnya pertumbuhan kebutuhan energi nasional dan target penurunan emisi. Batu bara tetap mendominasi pembangkitan listrik, sementara ketergantungan terhadap impor minyak masih tinggi. Ke depan, percepatan investasi energi terbarukan, penguatan jaringan listrik, penyimpanan energi, serta reformasi subsidi energi menjadi kunci agar transisi energi tidak hanya menjadi komitmen, tetapi benar-benar memperkuat ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.

Kajian tengah tahun ini tidak lengkap tanpa satu pertanyaan seberapa besar jarak antara target yang dicanangkan dan trajektori implementasi yang sedang berjalan? Pertanyaan ini bukan sekadar kritik teknis dalam konteks ketahanan ekonomi, *credibility gap* kebijakan energi adalah risiko sistemik tersendiri. Ia menggerus kepercayaan investor jangka panjang, mengganggu perencanaan dunia usaha, dan menunda aliran modal yang justru dibutuhkan untuk menjalankan transisi yang dicita-citakan.

Bagian ini mengevaluasi tiga klaster: (1) target kelistrikan dan energi terbarukan, termasuk RUPTL 2025-2034 dan rencana 100 GW solar; (2) program biodiesel dan kesiapan implementasi; serta (3) capaian yang diklaim vs. definisi yang digunakan. Analisis ini menggunakan dokumen perencanaan resmi yang bersifat *operationally binding* bukan pernyataan publik atau komitmen multilateral.

4.3.1. Target Kelistrikan dan EBT

Pemerintah menggambarkan ambisi transformasi energi yang dramatis. Presiden Prabowo menyatakan bahwa target 100 persen energi terbarukan yang semula ditetapkan untuk 2040 bisa dicapai pada 2035, dan berjanji pensiunkan seluruh PLTU batu bara pada 2040. Di tingkat kementerian, rencana pemasangan 100 GW panel surya yang didistribusikan di lebih dari 80.000 desa juga diumumkan.

Namun RUPTL 2025-2034 yang diterbitkan Mei 2025 dokumen perencanaan yang menjadi dasar investasi PLN dan IPP bercerita berbeda. RUPTL ini menargetkan penambahan kapasitas total 69,5 GW, dengan 76 persen direncanakan dari EBT. Secara kumulatif, 42,6 GW EBT ditargetkan hingga akhir 2034. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia hanya menambah 717 MW kapasitas solar secara kumulatif. Untuk memenuhi target solar

RUPTL saja, Indonesia perlu menginstalasi panel surya dengan laju lebih dari sepuluh kali lipat rata-rata historisnya dan target 100 GW adalah jauh di atas angka tersebut.

**Tabel 4.1. Kesenjangan Ambisi vs. Kapasitas Implementasi:
Target Energi Indonesia**

Komitmen	Sumber Komitmen	Nilai Target	Realitas	Catatan
Bauran EBT 2025	KEN (2014)	23% dari bauran energi primer	Realisasi H1-2025: sekitar 16%	Miss -7 poin, target digeser ke 2030
Kapasitas EBT baru 2030	RUPTL 2021-2030	20,9 GW	RUPTL 2025-34 revisi turun: 18,6 GW	Diturunkan 11%
Solar-angin 2030	JETP CIPP (Nov 2023)	24,3 GW	RUPTL 2025-34: hanya 10,6 GW	Hanya 44% dari komitmen JETP
Total EBT 2034	RUPTL 2025-34	42,6 GW	>70% dijadwal mundur pasca-2030; investasi EBT H1-2024 hanya US\$565 juta	Risiko sangat tinggi
Fossil-free 2035/2040	Pernyataan Presiden (Jul 2025)	100% EBT; pensiun semua PLTU	RUPTL masih berencana bertambah 16,6 GW kapasitas fosil s.d. 2034	Tidak tercermin dalam dokumen operasional
100 GW solar (desa)	Direktif Presiden	100 GW distributed solar	belum ada RUPTL khusus	Belum ada rencana pendanaan terperinci
Pengurangan bauran batu bara	NDC Indonesia 2025; JETP	Turun ke 30% (2030); phase-out (2040)	RUPTL: batu bara masih 57% pembangkitan 2030; captive coal industri naik	Kontradiksi langsung

Komitmen	Sumber Komitmen	Nilai Target	Realitas	Catatan
Program B50 (2026)	Pernyataan Presiden; Kementerian ESDM	B50 penuh pada 2026	B45 sedang dikaji	Tertunda; realistis terlaksana di 2027-28
Investasi JETP terealisasi	JETP (G20 Bali, 2022)	US\$20 miliar (naik ke \$21,4 miliar)	Terealisasi: sekitar US\$3,1 miliar (14,5%)	Jauh dari target; Cirebon-1 dibatalkan

Sumber: RUPTL 2025-2034 (PLN/Kementerian ESDM, Mei 2025); CREA (September & November 2025); IEEFA (Juni & Desember 2025); Climate Action Tracker (2025);

4.3.2. Mengapa Gap Ini Terjadi: Hambatan Struktural

Kesenjangan antara komitmen dan implementasi bukan semata-mata masalah kapasitas teknis. Hambatan struktural berakar lebih dalam:

Insentif sistem yang bekerja melawan transisi. PLN menanggung gap antara biaya pembangkitan aktual (IDR 1.732/kWh) dan tarif konsumen (IDR 1.153/kWh) selisih IDR 579/kWh yang ditutup subsidi negara. Rezim tarif ini tidak memberikan sinyal harga yang benar kepada investor EBT. Selain itu, kontrak *take-or-pay* dengan IPP batu bara yang mengharuskan PLN membayar bahkan untuk listrik yang tidak dipakai menciptakan biaya idle IDR 33 triliun (US\$ 2 miliar) per tahun

Overkapasitas yang memparalelisasi rencana EBT. Reserve margin sistem kelistrikan Indonesia mencapai lebih dari 39 persen, jauh di atas standar PLN. Overkapasitas ini bukan karena EBT berlebih, melainkan karena PLTU yang dibangun melebihi kebutuhan. Dalam kondisi ini, setiap GW EBT baru yang masuk akan semakin memperburuk beban keuangan PLN karena harus berkompetisi dengan batu bara yang sudah terbayar di muka

Inkoherensi kebijakan antar dokumen. Pernyataan presiden tentang 100 persen EBT pada 2035, KEN 2025 yang menargetkan 19-23 persen EBT pada 2030, RUPTL yang masih menambah 16,6 GW fosil, dan JETP yang menargetkan 24,3 GW solar-angin pada 2030 semuanya berjalan secara paralel tanpa rekonsiliasi yang jelas. Investor tidak tahu dokumen mana yang harus dijadikan acuan perencanaan

Relevansi langsung dengan ketahanan 2026: Keterlambatan transisi energi memiliki implikasi biaya yang terukur. Semakin lama Indonesia bergantung pada batu bara dan minyak impor, semakin besar eksposurnya terhadap volatilitas harga global seperti yang terjadi di paruh pertama 2026. Setiap tahun yang berlalu tanpa reformasi bauran energi adalah satu tahun tambahan beban subsidi bagi APBN dan satu tahun tambahan risiko inflasi biaya produksi bagi industri.

4.4. Dilema Program Biodiesel: Trade off Pangan dan Energi (Trade-off Pangan Versus Energi)

Evolusi Program Biodiesel Indonesia

Program biodiesel berbasis kelapa sawit Indonesia merupakan salah satu kebijakan energi paling ambisius di dunia berkembang. Dimulai pada 2008 dengan campuran 2,5 persen minyak sawit, program ini berkembang secara bertahap: B30 (2020), B35 (2023), B40 (awal 2025), dan kini menargetkan B50 pada 2026. Program B40 yang baru diluncurkan di awal 2025 mensyaratkan pencampuran 40 persen biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari minyak sawit dengan 60 persen solar konvensional.

Pemerintah mengukung program ini dalam upaya mengurangi impor solar, menghemat devisa, mendukung petani sawit, dan merangsang investasi hilir industri biodiesel. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan target menghentikan impor diesel dari 2026 secara bertahap.

Tabel 4.2. Linimasa Kebijakan Biodiesel

Tahun	Mandatori	Regulasi Utama	Konteks
2006-2008	B2,5	Permen ESDM No. 32/2008; Inpres No. 1/2006	Harga minyak dunia >US\$100; program uji coba sektor transportasi
2009-2015	B10 menjadi B20	Permen ESDM No. 25/2013; No. 20/2014	Ekspansi bertahap per sektor; PSO wajib B10 (2013), B15 (2014), B20 (2015)

Tahun	Mandatori	Regulasi Utama	Konteks
2016-2019	B20 semua sektor	Permen ESDM No. 12/2015	B20 wajib seluruh sektor termasuk industri dan komersial
2020	B30	Perpres No. 66/2018; Kepmen ESDM	Perdana di dunia; didorong kelebihan pasokan CPO; Dana BPDP aktif
2023	B35	Permen ESDM No. 2/2023	El Niño 2023-2024 mulai tekan produktivitas sawit
Jan 2025	B40	Perpres/Permen ESDM 2024	Prabowo tetapkan target B40 sebagai langkah awal transisi ke B50; target impor diesel nol
2026 (target)	B50	Dalam kajian Kementerian ESDM	Status: Tertunda dan diskusi mengarah ke B45 dulu; kendala kapasitas CPO & produksi
2027-2030 (roadmap)	B50-B100	Kajian teknis (masih berlangsung)	Bersamaan dengan pengembangan pabrik HVO; target diversifikasi <i>feedstock</i>

Sumber: berbagai Sumber (2026)

Dari sisi anggaran, program biodiesel dibiayai oleh Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola BPDP melalui mekanisme pungutan ekspor CPO. Dana ini membayar selisih antara harga produksi biodiesel dan harga solar yang lebih murah, sehingga menjaga mandatori tetap layak secara ekonomi bagi produsen.

Pemerintah mengangkat program ini dalam upaya mengurangi impor solar, menghemat devisa, mendukung petani dan perusahaan sawit, serta merangsang investasi hilir industri biodiesel. Presiden Prabowo Subianto menyatakan target menghentikan impor diesel mulai 2026 secara bertahap. Namun, ambisi ini memiliki tantangan dalam hal kapasitas eksisting.

Tantangan Implementasi B50

Evaluasi implementasi B50 perlu melampaui angka target mandatori dan menelaah kesiapan seluruh rantai pasok yang menopangnya. Setidaknya terdapat beberapa lapis kerentanan teridentifikasi dari data yang tersedia:

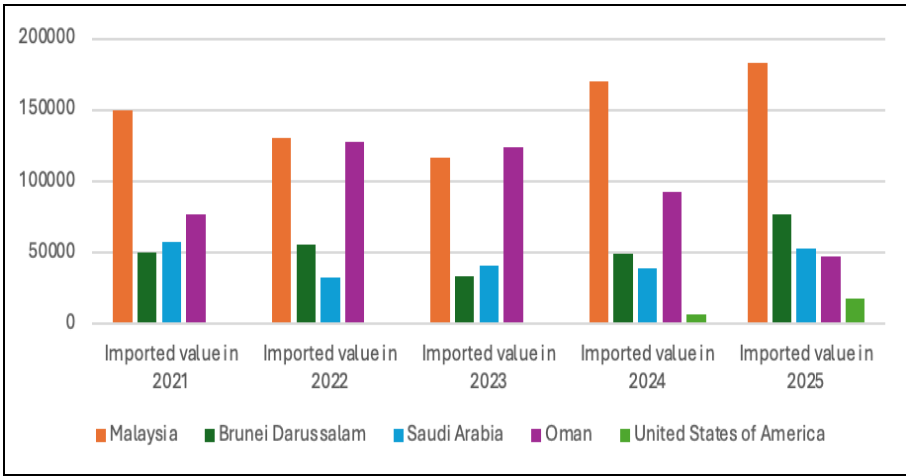
Pertama terkait dengan defisit Pasokan CPO. Proyeksi APROBI menunjukkan bahwa B50 penuh membutuhkan 17-18 juta ton CPO per tahun sebagai bahan baku yakni sekitar 6,2 persen lebih dari proyeksi produksi CPO 2024 sebesar 48,2 juta ton. Ditambah dampak variabilitas iklim El Niño 2023-2024 yang sudah menurunkan produktivitas perkebunan, serta ancaman El Niño baru pada H2-2026, risiko defisit CPO sangat nyata.

Selanjutnya dari sisi kapasitas produksi biodiesel tidak mencukupi. Kapasitas terpasang biodiesel Indonesia sekitar 19,6 juta kiloliter dengan utilisasi rata-rata 85 persen. Untuk memenuhi B50 penuh, dibutuhkan tambahan 4 juta kiloliter kapasitas yang belum tersedia. Penambahan ini membutuhkan investasi besar dengan masa konstruksi minimal 2-3 tahun.

Kemudian, lapis kerentanan lainnya yakni ketergantungan impor metanol yang tersembunyi. Ini adalah kerentanan yang paling jarang dibahas. Produksi biodiesel berbasis FAME membutuhkan metanol sebagai reaktan. Total impor metanol Indonesia terus meningkat, dengan Malaysia menguasai lebih dari separuh pangsa impor dan nilainya naik dari US\$150 juta ke US\$180 juta dalam empat tahun. Ketika B50 diimplementasikan, volume metanol yang dibutuhkan meningkat hampir dua kali lipat tepat saat pabrik metanol dalam negeri baru pertama diperkirakan beroperasi pada 2027. Sebagian klaim penghematan devisa dari B50 akan ternetralisasi oleh tagihan impor metanol yang membesar dari satu negara pemasok yang semakin dominan.

Total impor Indonesia menunjukkan peningkatan dan itupun baru hanya untuk kebutuhan B40. Ketika B50 diimplementasikan, volume metanol yang dibutuhkan langsung meningkat hampir dua kali lipat. Malaysia menguasai lebih dari separuh impor kita dan trennya naik terus, dari US\$150 juta ke US\$180 juta dalam 4 tahun. Struktur impor metanol kita rapuh. Satu pemasok dominan, alternatif mengecil, dan volume yang dibutuhkan akan melonjak drastis tepat saat pabrik dalam negeri belum siap sampai 2027. Sebagian dari klaim penghematan devisa itu akan langsung keluar lagi lewat tagihan impor

metanol yang membesar, dengan pemasok yang justru semakin terkonsentrasi di satu negara.



Gambar 4.5. Impor Metanol Indonesia Berdasarkan Pemasok Utama (Ribu US\$)

Sumber: UN Comtrade (2026)

Berikutnya terkait dengan isu teknis kualitas dan EUDR. Uji coba B50 menemukan kendala teknis (komposisi FAME vs HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), viskositas, cold-start). Di sisi ekspor, regulasi EUDR Uni Eropa yang mewajibkan *due diligence* bebas deforestasi berpotensi mengurangi aksesibilitas pasar ekspor CPO yang justru menjadi sumber pendanaan subsidi biodiesel melalui pungutan ekspor BPDP. Dengan kondisi kapasitas saat ini dan merekomendasikan jalur peralihan B45 terlebih dahulu yang mengintegrasikan penggunaan bahan baku terdiversifikasi (POME/limbah pabrik kelapa sawit dan minyak goreng bekas).

Lebih lanjut, terdapat trade-off yang dihadapi Indonesia dalam program pengembangan biodiesel, Dimana hal itu bersifat multidimensi.

Program B40 dan rencana peningkatan ke B50 merupakan instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Namun, semakin tinggi mandat campuran biodiesel berbasis CPO, semakin besar pula pertukaran kepentingan antara energi, fiskal, pangan, industri, dan lingkungan.

1. Ketahanan energi: impor solar turun, ketergantungan CPO naik

B40/B50 dapat menekan kebutuhan impor solar dan mengurangi kerentanan Indonesia terhadap lonjakan harga minyak dunia maupun gangguan pasokan global. Dalam konteks gejolak geopolitik, substitusi solar fosil dengan biodiesel domestik memberi perlindungan terhadap tekanan neraca perdagangan dan kebutuhan devisa.

Namun, kebijakan ini memindahkan sebagian risiko dari pasar minyak dunia ke pasar CPO domestik. Ketika produksi sawit terganggu oleh cuaca, produktivitas kebun menurun, atau permintaan ekspor meningkat, pasokan CPO untuk biodiesel dapat menjadi terbatas. B50 akan membutuhkan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel per tahun, jauh lebih besar dibanding kebutuhan B40 sekitar 15,6 juta kiloliter.

Trade-off utama:

Kemandirian dari impor solar meningkat, tetapi ketergantungan pada CPO dan risiko pasokan domestik juga meningkat.

2. Fiskal: penghematan impor versus beban subsidi biodiesel

Ketika harga minyak dunia tinggi, biodiesel menjadi lebih kompetitif karena penghematan impor solar dapat lebih besar daripada biaya insentif. Pemerintah memperkirakan kombinasi B40 pada semester I dan B50 pada semester II 2026 dapat menghasilkan penghematan biaya impor sekitar Rp157,28 triliun.

Sebaliknya, saat harga CPO lebih tinggi daripada harga solar, selisih harga atau *price gap* membesar. Selisih ini harus ditutup melalui dana subsidi biodiesel, terutama dari pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDP. Pada awal 2026, kebutuhan subsidi B50 bahkan diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp47 triliun sebelum kemudian direvisi turun akibat kenaikan harga minyak dunia.

Trade-off utama:

Penghematan devisa dan subsidi BBM dapat meningkat, tetapi risiko beban fiskal bergeser ke Dana Sawit/BPDP dan pungutan ekspor CPO.

3. Ketahanan pangan: nilai tambah sawit versus tekanan harga minyak goreng

B40/B50 menciptakan permintaan domestik yang besar dan stabil bagi CPO. Hal ini menguntungkan petani sawit, meningkatkan serapan produksi domestik, serta memperkuat nilai tambah industri hilir biodiesel.

Namun, CPO juga merupakan bahan baku utama minyak goreng. Jika porsi CPO untuk biodiesel meningkat terlalu cepat tanpa tambahan produktivitas kebun dan pasokan domestik, kompetisi antara kebutuhan energi dan pangan akan semakin kuat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan harga minyak goreng dan memperbesar risiko kelangkaan pada saat pasokan CPO menurun.

Trade-off utama:

Pendapatan sektor sawit naik, tetapi stabilitas harga pangan berbasis minyak sawit dapat tertekan.

4. Lingkungan: emisi transportasi turun, tekanan ekspansi sawit meningkat

Secara prinsip, substitusi sebagian solar fosil dengan biodiesel dapat menurunkan emisi dari sektor transportasi dan memperkuat agenda transisi energi. B40/B50 juga dapat menjadi jembatan transisi sebelum elektrifikasi kendaraan dan penggunaan bahan bakar rendah karbon berkembang lebih luas.

Namun, manfaat emisi akan melemah jika tambahan kebutuhan CPO mendorong pembukaan lahan baru, deforestasi, atau penggunaan lahan gambut. Karena itu, manfaat lingkungan B50 tidak hanya ditentukan oleh kadar campurannya, tetapi oleh sumber bahan baku, produktivitas kebun, sertifikasi keberlanjutan, dan penegakan tata kelola lahan.

Trade-off utama:

Emisi dari solar fosil berkurang, tetapi risiko emisi dari perubahan penggunaan lahan dapat meningkat.

5. Industri dan rantai pasok: hilirisasi tumbuh, risiko konsentrasi meningkat

Program biodiesel mendorong investasi pada industri esterifikasi, logistik CPO, terminal pencampuran, pelabuhan, serta distribusi bahan bakar. Dampaknya dapat berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri hilir, dan penguatan keterkaitan sektor sawit dengan sektor energi.

Namun, B50 juga meningkatkan konsentrasi permintaan CPO pada sektor energi. Jika produksi biodiesel, infrastruktur pencampuran, kualitas bahan bakar, atau pasokan bahan baku tidak tumbuh seiring mandat, dapat muncul gangguan distribusi dan kenaikan biaya logistik. Pemerintah juga masih melakukan pengujian jalan dan pengujian pada mesin non-otomotif sebelum penerapan penuh B50.

Trade-off utama:

Hilirisasi biodiesel berkembang, tetapi rantai pasok energi-pangan menjadi lebih terintegrasi dan lebih rentan terhadap gangguan CPO.

Tabel 4.3. Analisis Trade-off Program Biodiesel B40/B50

Dimensi	Peluang	Tantangan
Ketahanan Energi	Mengurangi ketergantungan impor solar, menghemat devisa	<ul style="list-style-type: none">• Ketergantungan baru pada CPO• risiko defisit pasokan
Fiskal	Penghematan subsidi BBM fosil, mendukung petani	<ul style="list-style-type: none">• Biaya subsidi biodiesel (Dana Sawit BPDP) membengkak
Ketahanan Pangan	Nilai tambah sawit, insentif petani swadaya	<ul style="list-style-type: none">• Potensi kenaikan harga minyak goreng• kelangkaan CPO
Lingkungan	Substitusi sebagian emisi dari solar fosil	<ul style="list-style-type: none">• Tekanan ekspansi lahan sawit• risiko deforestasi
Rantai Pasok Industri	Investasi hilir biodiesel, lapangan kerja	<ul style="list-style-type: none">• Gangguan rantai pasok pangan-energi jika CPO langka

Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat implikasi rekomendasi yang menjadi penting untuk ditindaklanjuti, antara lain:

1. Mereformasi subsidi energi dari skema berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat (*targeted subsidy*)

Pemerintah perlu mempercepat transformasi skema subsidi energi yang selama ini berbasis komoditas (*commodity-based subsidy*) menjadi subsidi yang berbasis penerima manfaat (*targeted subsidy*). Besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, karena rumah tangga berpendapatan tinggi masih memperoleh porsi manfaat yang signifikan akibat tingginya tingkat konsumsi energi mereka. Reformasi ini perlu didukung oleh integrasi basis data sosial-ekonomi, digitalisasi penyaluran bantuan, serta penguatan mekanisme verifikasi penerima manfaat untuk meningkatkan efektivitas belanja negara.

2. Mengalihkan sebagian belanja subsidi energi menjadi investasi produktif untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang

Belanja subsidi energi perlu diposisikan sebagai biaya yang bersifat konsumtif dan bukan sebagai investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara bertahap mengalihkan sebagian ruang fiskal dari subsidi energi fosil menuju investasi pada infrastruktur energi bersih, seperti pembangkit energi terbarukan, jaringan transmisi, dan sistem penyimpanan energi (*battery energy storage system/BESS*). Pergeseran ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus menciptakan aset produktif yang dapat mendukung ketahanan energi selama beberapa dekade ke depan.

3. Mempercepat reformasi regulasi untuk membuka ruang pembiayaan proyek energi terbarukan

Tantangan utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia tidak lagi terletak pada aspek keekonomian, melainkan pada hambatan regulasi dan kelembagaan. Pemerintah perlu mempercepat penyederhanaan perizinan, memberikan kepastian tarif dan skema pengadaan listrik, serta memperkuat

instrumen mitigasi risiko investasi agar proyek-proyek energi terbarukan yang telah masuk ke dalam *pipeline* dapat mencapai tahap pembiayaan (*financial close*). Kepastian kebijakan menjadi prasyarat utama untuk menarik investasi swasta dalam skala besar.

4. Menjadikan program de-dieselization sebagai prioritas nasional jangka pendek

Program penggantian pembangkit diesel di wilayah terpencil dan kepulauan dengan kombinasi pembangkit surya dan sistem penyimpanan energi (*solar dab BESS*) perlu dijadikan program prioritas nasional dalam jangka pendek. Strategi ini merupakan salah satu langkah dengan manfaat ekonomi paling cepat dirasakan (*quickest win*) karena mampu mengurangi konsumsi BBM impor, menekan biaya pembangkitan listrik, dan memperbaiki ketahanan energi di wilayah yang selama ini memiliki biaya energi paling tinggi.

5. Memanfaatkan guncangan energi 2026 sebagai momentum reformasi struktural sektor energi

Krisis energi pada 2026 perlu dipandang sebagai jendela peluang (*window of opportunity*) untuk mendorong reformasi struktural sektor energi yang selama ini sulit dilakukan. Tekanan terhadap APBN, pelebaran defisit neraca perdagangan migas, dan tingginya ketergantungan terhadap impor energi menunjukkan bahwa model ketahanan energi yang ada saat ini tidak lagi berkelanjutan. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk membangun konsensus politik yang lebih kuat dalam mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal di masa mendatang.

BAB 5.

INDUSTRI MANUFAKTUR DI TENGAH BADAI GLOBAL: MENGUJI DAYA SAING DAN PROSPEK TRANSFORMASI EKONOMI

Industri manufaktur Indonesia berada pada persimpangan penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pelemahan permintaan dunia, fragmentasi perdagangan, perang tarif, gangguan rantai pasok, volatilitas harga energi, serta risiko geopolitik telah menekan kinerja industri di banyak negara. Bagi Indonesia, kondisi ini menguji kemampuan sektor manufaktur untuk mempertahankan pasar ekspor, menjaga utilisasi kapasitas produksi, dan meningkatkan daya saing di tengah biaya logistik, energi, serta bahan baku yang masih relatif tinggi.

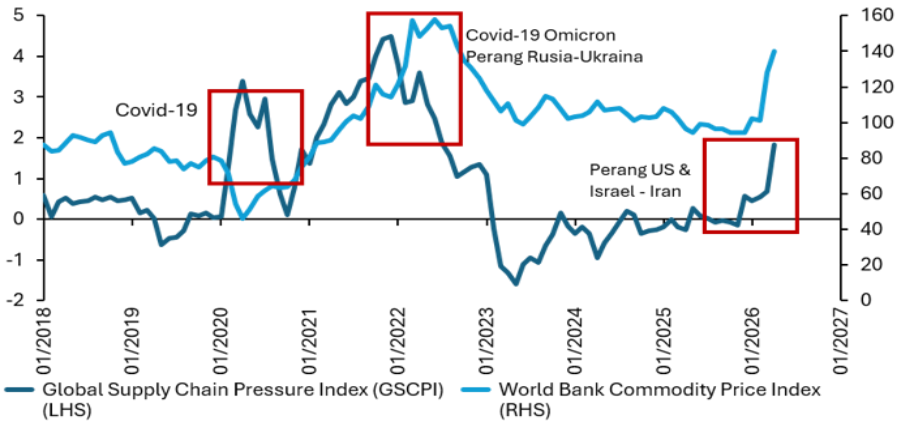
Di sisi lain, tekanan global juga membuka peluang transformasi ekonomi. Perubahan rantai pasok internasional mendorong banyak perusahaan global melakukan diversifikasi lokasi produksi, sehingga Indonesia berpotensi menarik investasi baru pada sektor elektronik, kendaraan listrik, kimia, farmasi, makanan-minuman, serta industri berbasis sumber daya alam bernilai tambah tinggi. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila Indonesia mampu memperbaiki iklim investasi, kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, ketersediaan energi yang kompetitif, serta kapasitas tenaga kerja terampil.

Tantangan utama manufaktur Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan output, tetapi meningkatkan kualitas struktur industrinya. Ketergantungan terhadap impor bahan baku, barang modal, dan teknologi masih tinggi, sementara kontribusi produk berteknologi menengah-tinggi terhadap ekspor belum optimal. Karena itu, transformasi manufaktur perlu diarahkan pada penguatan industri hulu dan antara, pendalaman rantai pasok

domestik, peningkatan riset dan inovasi, serta integrasi yang lebih kuat dengan rantai nilai global.

5.1. Tekanan Biaya Industri (Energi & Bahan Baku)

Globalisasi membuat semua negara semakin terhubung dalam sistem ekonomi global. Perdagangan barang dan jasa, investasi, arus modal, transfer teknologi, serta pertukaran informasi kini berlangsung semakin cepat lintas batas negara. Keterhubungan ini kemudian membentuk rantai nilai global atau *global value chains* (GVCs). Namun, semakin eratnya keterhubungan ekonomi global juga membawa risiko. Ketika terjadi gangguan di satu titik, dampaknya dapat menyebar ke banyak negara. Integrasi ini juga menciptakan kerentanan baru, tidak hanya pada dinamika pasar dan gangguan logistik semata tetapi juga mudah terpapar risiko geopolitik seperti konflik internasional, sanksi ekonomi, proteksionisme, dan pembatasan perdagangan yang menimbulkan tekanan pada indikator makroekonomi.



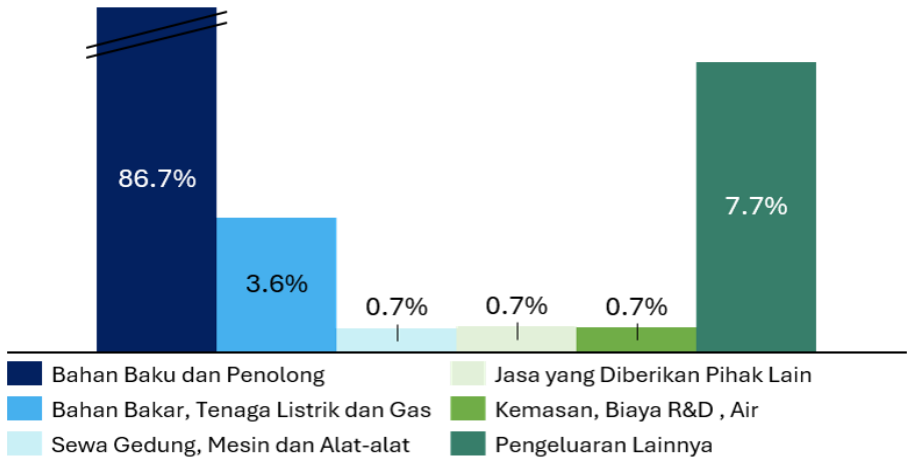
Gambar 5.1. Keterkaitan Disrupsi Rantai Pasok Global dan Kenaikan Harga Komoditas

Sumber: Federal Reserve Bank of New York (2026), Worldbank (2026)

Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap rantai pasok global terjadi beberapa kali ditandai dengan adanya peningkatan *Global Supply Chain Pressure Index* (GSCPI). Peningkatan ini sering kali bergerak sejalan dengan kenaikan harga komoditas dunia terutama jika sumber penyebabnya adanya konflik geopolitik yang memanas. Gangguan ini dapat memengaruhi

perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur utama: kenaikan biaya produksi, penurunan output sektoral, tekanan inflasi, dan perubahan kinerja perdagangan. Bagi Indonesia, kenaikan biaya produksi menjadi krusial karena banyak industri manufaktur masih bergantung pada bahan baku dan bahan penolong impor.

Lebih lanjut, Gambar 5.2. menunjukkan struktur biaya industri manufaktur di Indonesia, di mana komponen input produksi mendominasi total biaya. Bahan baku dan bahan penolong tercatat mencapai sekitar 86,7 persen dari total biaya produksi. Dengan struktur biaya seperti ini, kenaikan harga bahan baku dalam skala relatif kecil sekalipun dapat menimbulkan tekanan yang besar terhadap total biaya produksi. Tekanan tersebut akan lebih berat dirasakan oleh industri yang masih bergantung pada bahan baku impor dan memiliki ruang substitusi domestik yang terbatas.



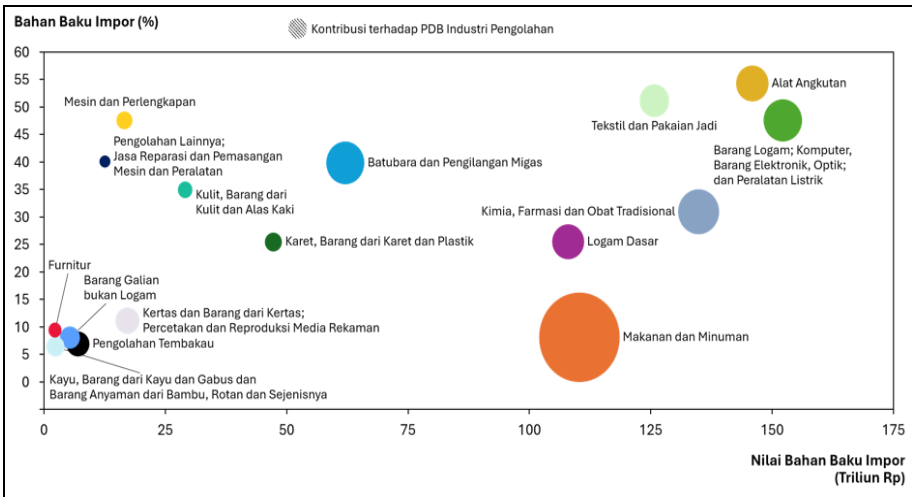
Gambar 5.2. Struktur Biaya Input Industri Manufaktur di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 25 persen dari total biaya bahan baku industri manufaktur Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Ketergantungan ini juga tercermin dari struktur impor menurut penggunaan barang. Pada Januari–April 2026, golongan bahan baku/penolong menyumbang 71,45 persen dari total impor Indonesia, dengan nilai mencapai US\$61,82 miliar. Nilai impor bahan baku/penolong juga mengalami peningkatan paling besar dibandingkan golongan barang konsumsi ataupun

barang modal dengan kaniakan sebesar US\$6,46 miliar pada Januari–April 2026 atau 11,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Indikasi tekanan harga juga terlihat dari Indeks Harga Impor (IHM) umum yang pada triwulan I-2026 meningkat 9,97 persen dibandingkan triwulan I-2025 secara tahunan. Kenaikan IHM ini menunjukkan bahwa harga barang impor mengalami peningkatan signifikan dan sinyal adanya tekanan harga dari sisi eksternal.

Dampak kenaikan biaya produksi akibat gangguan rantai pasok global tidak merata antar industri, kelompok industri yang paling rentan adalah industri dengan nilai impor bahan baku dan porsi bahan baku impor yang relatif tinggi. Gambar 5.3. menunjukkan terdapat beberapa industri bergantung pada bahan baku impor hingga setengah dari porsi kebutuhan bahan bakunya. Potensi tekanan kenaikan biaya produksi terbesar terjadi pada industri alat angkatan dengan ketergantungan sekitar 54 persen, diikuti industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 51 persen, serta industri barang logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik dan industri mesin dan perlengkapan yang mencapai 48 persen.

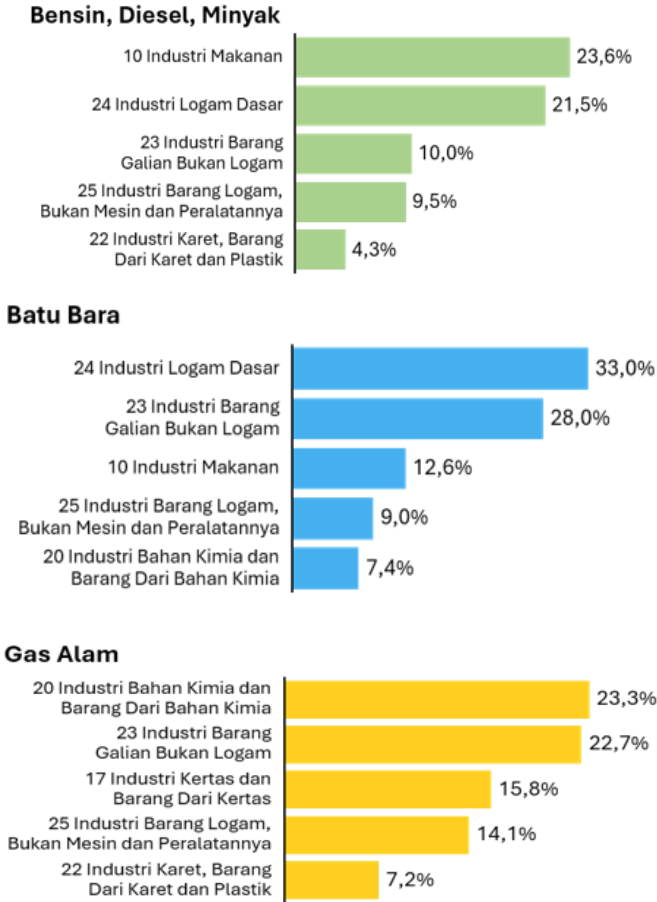


Gambar 5.3. Ketergantungan Industri pada Bahan Baku Impor

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Selain itu, industri kimia, farmasi, plastik, dan karet juga termasuk kelompok yang rentan karena banyak menggunakan bahan antara seperti bahan kimia dasar, resin, bahan aktif farmasi, dan komponen berbasis minyak bumi yang harganya saat ini meningkat sangat tinggi. Kenaikan harga energi

global dapat memperbesar tekanan pada sektor ini karena sebagian inputnya memiliki keterkaitan erat dengan harga minyak dan produk turunannya. Dengan demikian, industri yang paling tertekan bukan hanya ditentukan sebatas pada industri dengan porsi impor terbesar, tetapi juga industri yang menggunakan input spesifik, sulit mengganti bahan baku dari sumber domestik, dan memiliki keterkaitan kuat dengan rantai produksi global.



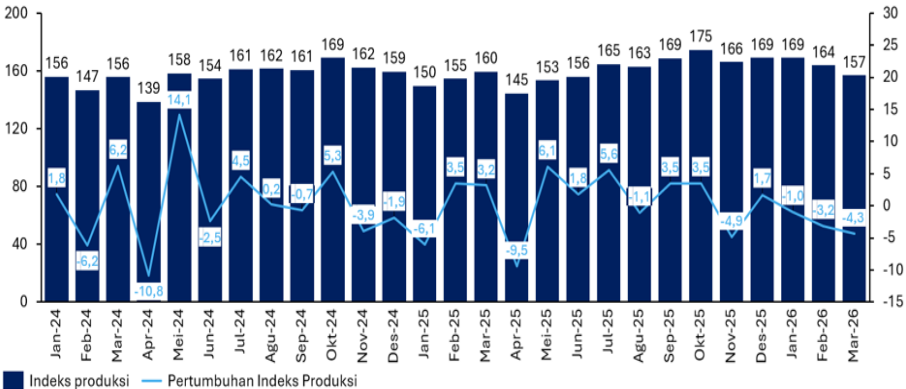
Gambar 5.4. Perbandingan Pemakaian Energi Manufaktur di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Komponen energi, seperti bahan bakar, listrik, dan gas juga memiliki peran penting dalam proses produksi industri manufaktur, meskipun porsinya sekitar 3,6 persen dari total biaya produksi. Peran energi tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi biaya, tetapi juga dari fungsinya sebagai input dasar

yang memengaruhi hampir seluruh tahapan produksi, mulai dari pengoperasian mesin, pemanasan, pendinginan, hingga distribusi barang. Dari sisi jenis energi yang digunakan, konsumsi energi manufaktur Indonesia masih didominasi oleh batubara, kokas, dan briket batubara sebesar 35,8 persen, diikuti oleh bensin, diesel, dan minyak sebesar 33 persen, serta gas alam sebesar 18,9 persen. Struktur ini menunjukkan bahwa industri manufaktur Indonesia masih sangat terkait dengan energi fosil. Karena itu, gejolak harga energi global akibat gangguan jalur perdagangan migas strategis seperti Selat Hormuz, dapat meningkatkan tekanan biaya produksi.

Tekanan ini akan lebih terasa pada industri yang bersifat energy-intensive, seperti industri logam dasar, industri makanan, industri barang galian bukan logam, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, serta industri kertas dan barang dari kertas. Pada sektor-sektor tersebut, energi bukan sekadar biaya pendukung, tetapi menjadi bagian penting dari proses produksi. Dampak kenaikan biaya energi tidak hanya muncul secara langsung di dalam pabrik, tetapi juga secara tidak langsung melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik. Dalam situasi tersebut margin usaha akan tertekan, jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama perusahaan akan merespons dengan mengurangi kapasitas produksi dan mendorong perusahaan untuk menunda ekspansi atau menyesuaikan harga jual. Pada ujungnya dapat berpengaruh pada penurunan output sektoral.



Gambar 5.5. Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Perkembangan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang (IBS) pada awal 2026 memperkuat indikasi bahwa tekanan biaya dan gangguan pasokan mulai bertransmisi ke kinerja produksi domestik. Pada Januari hingga Maret 2026, pertumbuhan indeks produksi tercatat negatif secara beruntun, yaitu -1,0 persen, -3,2 persen, dan -4,3 persen. Pola penurunan ini menunjukkan bahwa industri sedang dan besar mulai menghadapi tekanan terhadap kapasitas produksinya.

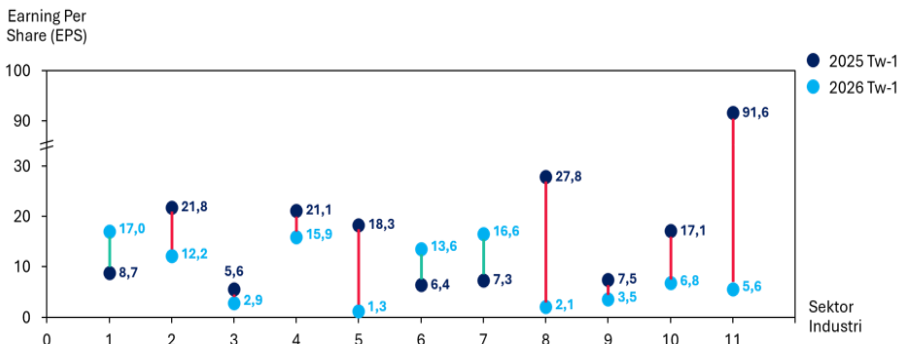
Sinyal pelemahan tersebut juga tercermin dari perkembangan Purchasing Managers' Index manufaktur Indonesia. Pada Mei 2026, PMI Indonesia kembali ke level 50,0 setelah sebelumnya berada di zona kontraksi sebesar 49,1 pada April. Meskipun terdapat perbaikan, posisi PMI yang tepat berada di ambang batas antara ekspansi dan kontraksi menunjukkan bahwa pemulihan sektor manufaktur masih rapuh. Volume output bahkan masih mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, terutama akibat tingginya harga bahan baku dan keterbatasan pasokan input.

Selain itu, kenaikan pesanan belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan riil. Sebagian peningkatan pesanan lebih banyak dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha dan klien untuk membangun stok di tengah ketidakpastian harga dan pasokan. Dengan demikian, perbaikan PMI perlu dibaca secara hati-hati karena belum menunjukkan pemulihan yang kuat karena lebih banyak ditopang oleh faktor musiman setelah Lebaran, sementara permintaan domestik cenderung stagnan, semakin memperkuat indikasi bahwa tekanan terhadap industri belum sepenuhnya mereda. Dibandingkan dengan negara kawasan, posisi Indonesia juga masih relatif lemah. Bersama Malaysia yang mencatat PMI 49,9, Indonesia menjadi salah satu yang terlemah di Asia Tenggara, tertinggal dari Vietnam sebesar 52,8, Thailand sebesar 52,6, dan Singapura sebesar 57,9 yang telah berada di zona ekspansi.

Tekanan margin industri juga diperkuat dengan perkembangan *earning per share* (EPS) pada triwulan I-2026 dibandingkan triwulan I-2025. Grafik menunjukkan bahwa mayoritas industri mengalami penurunan EPS, yang mengindikasikan bahwa tekanan biaya tidak hanya memengaruhi sisi produksi, tetapi juga mulai menekan profitabilitas perusahaan. Penurunan EPS ini mencerminkan bahwa kenaikan biaya bahan baku, energi, dan logistik

belum dapat direspons dengan menaikkan harga jual sehingga yang berdampak margin keuntungan perusahaan menyempit.

Beberapa sektor mencatat penurunan yang cukup tajam, seperti sektor Material Dasar yang EPS-nya turun dari sekitar 21,8 menjadi 12,2, sektor Barang Konsumen Non-Primer dari 18,3 menjadi 1,3, sektor Properti dan Real Estat dari 27,8 menjadi 2,1, sektor Infrastruktur dari 17,1 menjadi 6,8, serta sektor Transportasi dan Logistik dari 91,6 menjadi 5,5. Meskipun terdapat beberapa sektor yang masih mencatat perbaikan EPS, seperti Energi, Kesehatan, dan Keuangan, pola umum grafik menunjukkan bahwa pelemahan profitabilitas lebih dominan dibandingkan penguatan.



Keterangan: 1) Energi; 2) Material Dasar; 3) Industri; 4) Barang Konsumen Primer; 5) Barang Konsumen Non-Primer; 6) Kesehatan; 7) Keuangan; 8) Properti dan Real Estat; 9) Teknologi; 10) Infrastruktur; 11) Transportasi dan Logistik

Gambar 5.6. Perbandingan *earning per share* antar Industri di Indonesia

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2026)

Dari sisi harga, kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong inflasi. Ketika perusahaan tidak lagi mampu menyerap kenaikan biaya melalui penurunan margin keuntungan, sebagian beban biaya akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang. Mekanisme ini dikenal sebagai inflasi dari sisi biaya atau cost-push inflation. Dampaknya dapat meluas karena produk manufaktur tidak hanya dikonsumsi langsung oleh rumah tangga, tetapi juga digunakan oleh sektor lain sebagai input produksi.

Indikasi meningkatnya tekanan harga terlihat dari inflasi Mei 2026 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara year-to-date, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 1,35 persen, lebih tinggi

dibandingkan 1,19 persen pada Mei 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa akumulasi tekanan harga sejak awal tahun 2026 lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, secara year-on-year, inflasi Mei 2026 mencapai 3,08 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 1,60 persen.

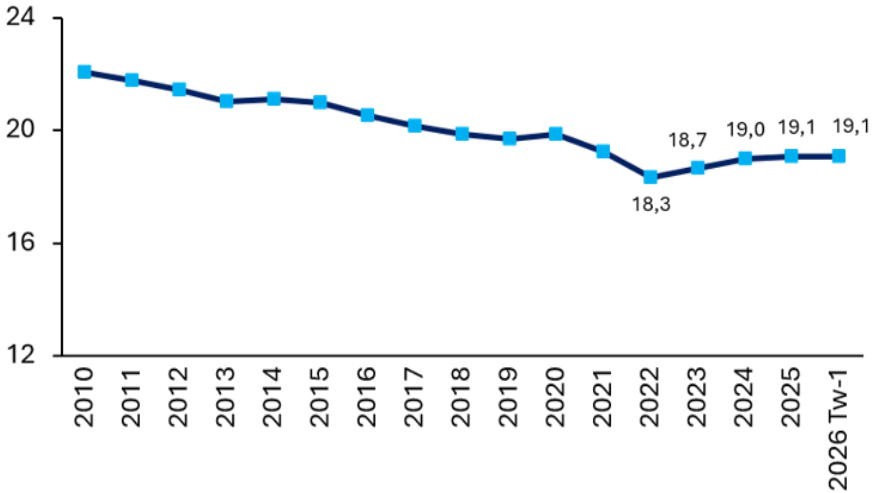
Gangguan rantai pasok juga dapat memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia. Jika harga bahan baku impor naik, nilai impor dapat meningkat meskipun volume impor tidak bertambah secara signifikan. Pada saat yang sama, kenaikan biaya produksi dapat menurunkan daya saing ekspor manufaktur Indonesia karena harga produk menjadi lebih mahal dibandingkan negara pesaing. Pelemahan posisi eksternal tersebut mulai terlihat dari menyusutnya surplus perdagangan. Pada April 2026, surplus perdagangan Indonesia hanya mencapai US\$0,09 miliar, menjadi yang terendah sejak Mei 2020 di tengah tren surplus yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut. Penyempitan surplus ini terjadi karena impor tumbuh 22,49 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor sebesar 21,98 persen.

Secara kumulatif, pada Januari-April 2026 surplus perdagangan tercatat sebesar US\$5,64 miliar, dengan ekspor mencapai US\$92,15 miliar dan impor sebesar US\$86,51 miliar. Sementara itu, surplus perdagangan pada triwulan I-2026 juga telah menyusut hampir separuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari US\$10,9 miliar menjadi US\$5,5 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan dari sisi impor semakin kuat. Surplus perdagangan masih dapat dipertahankan terutama karena kinerja komoditas nonmigas. Pada periode tersebut, sektor nonmigas mencatat surplus sebesar US\$14,16 miliar, yang mampu menutup defisit migas sebesar US\$8,52 miliar.

5.2. Risiko Deindustrialisasi Prematur

Pangsa industri pengolahan terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 18,3 persen pada 2022 menjadi 19,1 persen pada triwulan-I 2026. Namun, kenaikan ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Indonesia bebas dari risiko deindustrialisasi prematur. Setelah mengalami tren penurunan dalam jangka panjang, porsi industri pengolahan memang mulai membaik pada periode terakhir. Namun, kenaikan tersebut lebih tepat dibaca sebagai pemulihan terbatas dari titik rendah, bukan bukti kuat bahwa proses industrialisasi telah kembali solid. Risiko

deindustrialisasi prematur tetap relevan karena yang perlu dilihat bukan hanya naik-turunnya share industri pengolahan terhadap PDB, tetapi juga kualitas pertumbuhannya.



**Gambar 5.7. Pangsa PDB Industri Pengolahan di Indonesia
2010 - Triwulan I 2026**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Meskipun terjadi kenaikan pangsa terhadap PDB tetapi bukan ditopang oleh penguatan struktur industri. Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan memang masih tumbuh positif. Pertumbuhan industri pengolahan tercatat 4,64 persen pada 2023, 4,43 persen pada 2024, meningkat menjadi 5,30 persen pada 2025, dan pada triwulan I-2026 tumbuh sekitar 5,04 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan di kisaran tersebut belum sepenuhnya menunjukkan akselerasi industrialisasi yang kuat, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan transformasi struktural menuju industri bernilai tambah tinggi. Dengan kata lain, pertumbuhan positif belum otomatis berarti struktur industri semakin dalam.

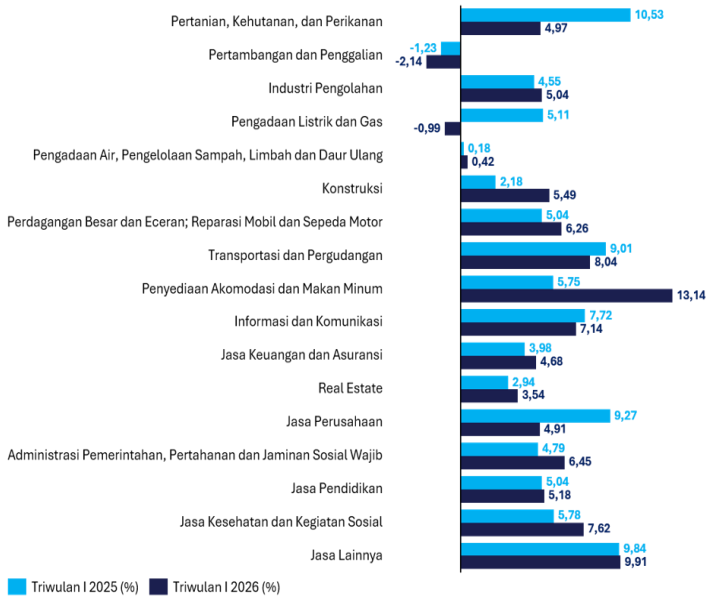
Indikasi lemahnya struktur industri juga terlihat dari tingkat utilisasi kapasitas. Rata-rata utilisasi industri pengolahan nonmigas pada Januari–September 2025 tercatat sekitar 61,4 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jika utilisasi masih berada pada kisaran 50–60 persen, maka

peningkatan share industri terhadap PDB dapat terjadi tanpa sepenuhnya mencerminkan ekspansi kapasitas produksi yang kuat. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian industri masih menghadapi hambatan permintaan, tekanan biaya, atau keterbatasan input produksi.

Selain itu, investasi industri belum selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Pada triwulan I-2026, terdapat 633 perusahaan industri yang melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru dengan total nilai investasi sekitar Rp418,62 triliun dan rencana penyerapan tenaga kerja 219.684 orang. Secara rata-rata, angka ini menunjukkan kebutuhan investasi sekitar Rp1,9 miliar untuk menciptakan satu rencana pekerjaan. Bahkan pada subsektor padat modal seperti industri logam dasar, investasi mencapai sekitar Rp218,04 triliun dengan rencana penyerapan 25.592 tenaga kerja, atau sekitar Rp8,5 miliar per tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa investasi manufaktur semakin banyak masuk ke sektor padat modal, sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja tidak sebesar sektor padat karya.

Pertumbuhan tertinggi datang dari jasa yang bergantung pada konsumsi dan program pemerintah. Akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen, tertinggi di antara seluruh sektor, didorong peningkatan aktivitas selama libur nasional serta perluasan program makan bergizi gratis. Jasa lainnya naik 9,91 persen seiring meningkatnya perjalanan wisatawan, sementara transportasi tumbuh 8,04 persen mengikuti mobilitas masyarakat pada periode libur. Kinerja ketiga sektor ini bergerak searah dengan lonjakan belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga, dan sebagian besar bersifat musiman.

Sektor yang terkait belanja negara ikut menguat dan menegaskan peran dorongan fiskal. Konstruksi tumbuh 5,49 persen, naik dari 2,18 persen setahun sebelumnya, didorong meningkatnya aktivitas pembangunan oleh pemerintah maupun swasta. Administrasi pemerintahan tumbuh 6,45 persen, mencerminkan efek ekspansi belanja negara. Penguatan pada kelompok sektor ini menempel pada realisasi anggaran awal tahun, sehingga rentan melemah ketika belanja melambat.



Gambar 5.8. Pertumbuhan PDB Menurut 17 Sektor

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Sektor penghasil barang atau *tradable* terlihat melambat pada periode yang sama. Pertanian melambat tajam dari 10,53 persen menjadi 4,97 persen, pertambangan memperdalam kontraksi menjadi 2,14 persen, dan pengadaan listrik dan gas berbalik dari 5,11 persen menjadi kontraksi 0,99 persen. Industri pengolahan, kontributor terbesar terhadap PDB, tumbuh moderat 5,04 persen. Konsumsi listrik biasanya bergerak mengikuti aktivitas industri, sehingga kontraksinya menandakan tekanan pada kapasitas produksi di saat pertumbuhan dipacu permintaan domestik.

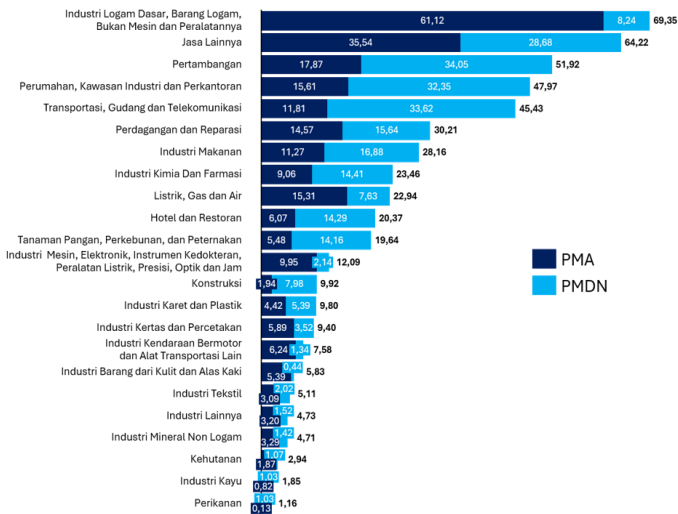
5.3. Investasi dan Urgensi Penguatan Struktur Industri

Urgensi penguatan struktur industri muncul karena manufaktur Indonesia masih menghadapi ketergantungan yang besar terhadap impor bahan baku, barang modal, komponen, dan teknologi. Ketika rantai pasok global terganggu atau nilai tukar melemah, biaya produksi industri domestik meningkat dan daya saing ekspor ikut tertekan. Oleh karena itu, investasi perlu diarahkan tidak hanya pada industri hilir, tetapi juga pada pengembangan industri hulu dan antara, seperti bahan kimia dasar, baja

husus, mesin, elektronik, komponen otomotif, material maju, serta industri pendukung energi terbarukan.

Investasi juga harus mendorong pendalaman struktur industri domestik melalui penguatan keterkaitan antara perusahaan besar, industri menengah, dan UMKM pemasok. Tanpa keterhubungan rantai pasok lokal yang kuat, investasi berisiko hanya menciptakan aktivitas perakitan dengan kandungan impor tinggi. Sebaliknya, investasi yang terintegrasi dengan pengembangan pemasok domestik dapat meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan memperkuat basis ekspor nasional.

Dalam perkembangannya, realisasi investasi tumbuh moderat dan terkonsentrasi pada pengolahan logam serta pertambangan. Total realisasi Triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun, naik 7,2 persen secara tahunan, dengan porsi modal asing dan dalam negeri hampir seimbang, yaitu PMA Rp250,0 triliun yang naik 8,5 persen dan PMDN Rp248,8 triliun yang naik 6,0 persen. Industri logam dasar menjadi penyumbang terbesar dengan Rp69,4 triliun, diikuti jasa lainnya termasuk pusat data Rp64,2 triliun dan pertambangan Rp51,9 triliun. Gabungan logam dasar dan pertambangan saja mencakup sekitar seperempat dari seluruh investasi.

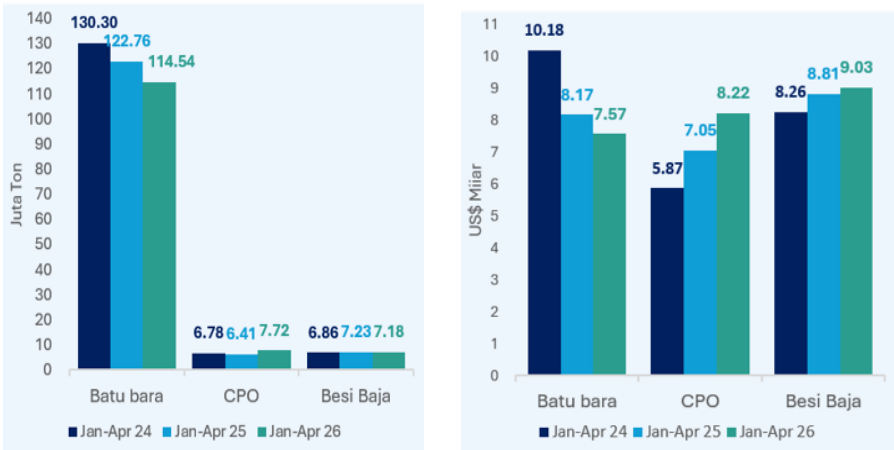


Gambar 5.9. Realisasi Investasi Menurut Sektor (dalam Triliun Rp)

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi (2026)

Aliran modal lebih banyak masuk ke pengolahan komoditas dibandingkan ke manufaktur yang membangun rantai nilai lebih luas. Subsektor seperti industri mesin dan elektronik hanya menarik Rp12,09 triliun, kendaraan bermotor Rp7,58 triliun, dan tekstil Rp5,11 triliun, jauh di bawah logam dasar. Pola ini memperdalam orientasi ekonomi pada pengolahan mineral yang padat modal dan terpapar siklus harga komoditas, sejalan dengan struktur ekspor yang masih bertumpu pada produk setengah jadi. Kualitas investasi ke depan akan diukur dari kemampuannya menciptakan keterkaitan pemasok lokal, alih teknologi, dan penyerapan tenaga kerja yang sepadan dengan besarnya modal yang masuk.

Strategi investasi perlu difokuskan pada sektor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, industri hijau, digitalisasi produksi, serta pengembangan riset dan inovasi. Kepastian regulasi, energi yang kompetitif, logistik yang efisien, insentif investasi yang tepat sasaran, dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prasyarat agar investasi benar-benar menghasilkan transformasi ekonomi. Dengan demikian, penguatan struktur industri bukan sekadar agenda meningkatkan jumlah investasi, melainkan memastikan investasi mampu membangun kapasitas produksi nasional yang lebih mandiri, inovatif, dan tahan terhadap guncangan global.



Gambar 5.10. Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Selanjutnya, melihat kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia, maka kenaikan nilai ekspor komoditas unggulan lebih banyak

berasal dari harga daripada volume. Nilai ekspor CPO pada Januari-April naik dari US\$7,05 miliar menjadi US\$8,22 miliar dengan kenaikan volume yang lebih terbatas, sedangkan besi dan baja naik nilainya menjadi US\$9,03 miliar pada volume yang hampir tidak berubah di kisaran 7,2 juta ton. Pola ini menunjukkan tambahan penerimaan ekspor sebagian besar mengikuti harga yang sedang tinggi, sehingga akan menyusut ketika harga komoditas melandai.

Berdasarkan komoditas, batubara yang selama ini menjadi andalan ekspor, justru menurun baik secara volume maupun nilai. Volume ekspornya turun dari 130,30 juta ton pada Januari-April 2024 menjadi 114,54 juta ton pada 2026, dan nilainya merosot dari US\$10,18 miliar menjadi US\$7,57 miliar pada periode yang sama. Penurunan ini menandakan permintaan energi termal yang melemah meski harga sempat tinggi, sekaligus menegaskan bahwa penerimaan ekspor yang bersandar pada komoditas mentah rentan terhadap pergeseran permintaan dan harga global.

Surplus dengan Amerika Serikat menopang neraca, tetapi bertumpu pada ekspor yang paling rentan terhadap tarif. Sepanjang Januari-April 2026, surplus nonmigas dengan AS mencapai US\$6,81 miliar, naik dari US\$5,4 miliar setahun sebelumnya, ditopang mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, alas kaki, serta pakaian dan aksesorinya. Produk padat tenaga kerja ini menjadi sasaran langsung kebijakan tarif AS, yang dalam perjanjian terbaru ditetapkan 19 persen, turun dari usulan awal 32 persen. Dengan tarif yang sudah disepakati, kenaikan surplus saat ini sebagian merupakan percepatan pengiriman sebelum dampak penuh terasa.

Defisit dengan Tiongkok melebar dan menandakan ketergantungan struktural pada mesin serta teknologi. Defisit nonmigas dengan Tiongkok pada Januari-April 2026 mencapai US\$8,03 miliar, dengan defisit total melebar ke US\$7,59 miliar dari US\$6,28 miliar pada periode yang sama 2025. Pelebaran ini dipicu impor mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta plastik dan barangnya, sementara ekspor Indonesia ke Tiongkok masih bertumpu pada besi dan baja, nikel, serta bahan bakar mineral. Indonesia mengirim komoditas dan produk setengah jadi, lalu membeli kembali mesin dan teknologi bernilai tambah tinggi, sehingga defisit cenderung membesar seiring naiknya kebutuhan investasi dan produksi.

5.4. Struktur Ketergantungan Impor Bahan Baku

Data impor Januari–April 2026 menunjukkan bahwa bahan baku/penolong tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur impor Indonesia, dengan nilai mencapai US\$61,82 miliar, meningkat 11,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar US\$55,35 miliar. Nilai tersebut jauh lebih besar dibanding impor barang konsumsi sebesar US\$7,58 miliar dan barang modal sebesar US\$17,11 miliar.

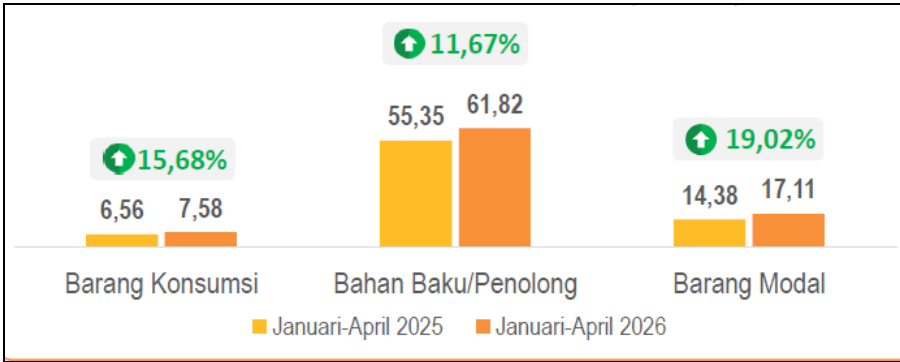
Komposisi ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur nasional masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku, komponen antara, dan input produksi dari luar negeri. Ketergantungan tersebut terutama terkait dengan kebutuhan industri terhadap bahan kimia, petrokimia, baja dan logam khusus, komponen elektronik, bahan baku farmasi, mesin produksi, serta bahan pendukung industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, dan elektronik.

Di satu sisi, kenaikan impor bahan baku dapat dibaca sebagai sinyal positif karena mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan permintaan industri. Kenaikan impor barang modal sebesar 19,02 persen juga menunjukkan adanya ekspansi kapasitas produksi dan investasi. Namun, struktur ini tetap mengandung risiko karena industri menjadi lebih rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan baku global, gangguan rantai pasok internasional, serta kebijakan perdagangan negara pemasok.

Dengan nilai impor bahan baku yang mencapai sekitar 71,5 persen dari total impor tiga kelompok penggunaan, struktur impor Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan input produksi. Karena itu, agenda penguatan industri tidak cukup hanya dengan meningkatkan investasi hilir, tetapi harus diarahkan pada pembangunan industri hulu dan antara. Prioritasnya meliputi pengembangan petrokimia, bahan kimia dasar, logam dan baja khusus, komponen elektronik, bahan baku farmasi, mesin industri, serta material maju.

Ke depan, kebijakan substitusi impor perlu dilakukan secara selektif dan berbasis kapasitas domestik. Tujuannya bukan menutup impor secara tiba-tiba, melainkan mengurangi ketergantungan secara bertahap melalui investasi industri hulu, penguatan pemasok lokal, transfer teknologi, peningkatan riset dan inovasi, serta integrasi industri besar dengan UMKM.

Dengan demikian, pertumbuhan manufaktur dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri dan lebih tahan terhadap guncangan global.



Gambar 5.11. Impor Indonesia Berdasarkan Golongan Penggunaan Barang (US\$ Miliar)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

5.5. Implikasi dan Rekomendasi

1. Memperkuat ketahanan pasokan bahan baku industri dan mendorong substitusi impor

Industri yang bergantung pada input impor perlu didorong untuk tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara pemasok. Pemerintah dapat memfasilitasi pencarian alternatif pemasok melalui kerja sama dagang, penyederhanaan prosedur impor bahan baku tertentu, dan penyediaan informasi pasar bagi pelaku usaha. Substitusi impor perlu dilakukan secara selektif, bukan menyeluruh. Fokusnya sebaiknya diberikan pada bahan baku yang permintaannya besar, teknologi produksinya memungkinkan dikembangkan di dalam negeri, dan memiliki pembeli industri yang jelas.

2. Menjaga daya saing ekspor manufaktur

Kebijakan perdagangan perlu diarahkan untuk menurunkan biaya ekspor, penurunan hambatan logistik domestik, memperbaiki waktu bongkar muat. Selain itu, perlu ada dorongan agar ekspor manufaktur tidak hanya

bertumpu pada produk berbasis komoditas, tetapi naik ke produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

3. Risiko deindustrialisasi prematur perlu dipantau dengan indikator yang lebih operasional

Kenaikan kembali *share* industri pengolahan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa risiko deindustrialisasi prematur telah hilang. Pemerintah perlu memantau indikator yang lebih substantif, seperti pertumbuhan output riil manufaktur, utilisasi kapasitas, investasi industri, ekspor manufaktur bernilai tambah, produktivitas tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja industri, serta ketergantungan terhadap bahan baku impor.

BAB 6.

DAMPAK DAN IMPLIKASI RISIKO GLOBAL TERHADAP KETAHANAN EKONOMI INDONESIA

6.1. Kerangka Asumsi Dalam Analisis Dampak Risiko Global

Tahun 2026 ditandai oleh kombinasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, disrupsi teknologi, dan tekanan perubahan iklim. Meskipun ekonomi global masih tumbuh positif, berbagai lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan berada di bawah rata-rata historis dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Jika pada periode 2021–2023 dunia menghadapi pemulihan ekonomi yang cepat namun disertai lonjakan inflasi, maka pada 2026 tantangan utama bergeser menjadi bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan, tekanan fiskal, transformasi teknologi, dan percepatan transisi energi. Dunia kini menghadapi apa yang oleh banyak ekonom disebut sebagai "era polycrisis", yaitu kondisi ketika berbagai krisis terjadi secara simultan dan saling memperkuat satu sama lain.

Ketidakpastian Geopolitik dan Konflik Timur Tengah

Pada tahun 2026, ketidakpastian geopolitik menjadi salah satu sumber risiko terbesar bagi perekonomian dunia. Berbeda dengan periode sebelum pandemi yang lebih banyak didominasi oleh isu ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan siklus bisnis, saat ini faktor geopolitik telah menjadi variabel utama yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi global. Konflik bersenjata, rivalitas antarnegara besar, gangguan jalur perdagangan internasional, serta meningkatnya fragmentasi ekonomi global telah menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian bagi dunia usaha, investor, dan pemerintah.

Di antara berbagai titik konflik global, kawasan Timur Tengah memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan pusat produksi dan distribusi

energi dunia. Kawasan ini menyimpan sekitar 48 persen cadangan minyak dunia dan lebih dari 40 persen cadangan gas alam global. Selain itu, kawasan ini juga menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika melalui Selat Hormuz, Laut Merah, Bab el-Mandeb, dan Terusan Suez.

Konflik yang terjadi di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat secara langsung, tetapi dapat menimbulkan efek rambatan (*spillover effects*) yang luas terhadap harga energi, perdagangan internasional, inflasi global, dan stabilitas pasar keuangan dunia.

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perekonomian global pada tahun 2026 adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang bersifat struktural dan cenderung berlangsung dalam jangka panjang. Berbeda dengan perlambatan yang terjadi akibat siklus ekonomi biasa (*cyclical slowdown*), perlambatan yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor struktural yang saling terkait, seperti penurunan produktivitas global, penuaan penduduk (*aging population*), tingginya utang publik dan swasta, fragmentasi perdagangan internasional, ketidakpastian geopolitik, serta melemahnya investasi produktif.

Selama lebih dari dua dekade sebelum pandemi, ekonomi dunia menikmati manfaat globalisasi, integrasi rantai pasok global, kemajuan teknologi informasi, dan ekspansi perdagangan internasional. Faktor-faktor tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global rata-rata di atas 3,5 persen per tahun. Namun, setelah pandemi COVID-19, berbagai sumber pertumbuhan tersebut mulai melemah.

Banyak lembaga internasional seperti International Monetary Fund, World Bank, dan Organisation for Economic Co-operation and Development memperingatkan bahwa ekonomi dunia sedang memasuki periode pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata historisnya. Bahkan, beberapa analis menyebut periode ini sebagai "The New Normal of Low Growth", yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi global secara permanen berada di bawah tren jangka panjangnya.

Fragmentasi Perdagangan dan De-globalisasi

Salah satu perubahan paling mendasar dalam perekonomian dunia pada dekade 2020-an adalah bergesernya paradigma dari globalisasi menuju fragmentasi ekonomi global (global economic fragmentation). Jika selama tiga dekade terakhir dunia menikmati integrasi ekonomi yang semakin dalam melalui liberalisasi perdagangan, investasi lintas negara, dan pembentukan rantai pasok global (Global Value Chains/GVCs), maka sejak pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, serta meningkatnya ketegangan geopolitik, arah perkembangan ekonomi global mulai berubah.

Negara-negara tidak lagi semata-mata mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga mulai memprioritaskan keamanan ekonomi (economic security), ketahanan rantai pasok (supply chain resilience), keamanan energi, keamanan pangan, dan keamanan teknologi. Akibatnya, dunia memasuki fase baru yang ditandai oleh meningkatnya proteksionisme, relokasi industri, pembatasan teknologi, dan pembentukan blok-blok ekonomi yang lebih tertutup.

Fenomena ini dikenal sebagai fragmentasi perdagangan global, yaitu kondisi ketika arus perdagangan, investasi, teknologi, dan produksi internasional semakin terpecah ke dalam kelompok-kelompok negara yang memiliki kedekatan geopolitik, ideologi, atau kepentingan strategis yang sama. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini sering disebut sebagai de-globalisasi parsial (partial de-globalization) atau slowbalization, yaitu melambatnya proses globalisasi yang telah berlangsung sejak akhir Perang Dingin. Dampak utama dari berbagai dinamika yang telah diuraikan tersebut antara lain Lonjakan harga minyak dan energi; Melambatnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia; Kenaikan biaya logistik global dan gangguan rantai pasok global.

6.2. Model Ekonomi (Computable General Equilibrium) dan Skenario

Computable General Equilibrium (CGE) adalah model ekonomi kuantitatif yang menggambarkan bagaimana seluruh pelaku ekonomi (rumah

tangga, perusahaan, pemerintah, investor, dan sektor luar negeri) berinteraksi secara simultan dalam suatu perekonomian. Model ini dibangun berdasarkan teori keseimbangan umum (General Equilibrium Theory) yang dikembangkan oleh Léon Walras dan kemudian dioperasionalkan secara empiris menggunakan data ekonomi aktual.

Berbeda dengan model ekonometrik atau Input-Output yang umumnya hanya menangkap hubungan parsial, model CGE mampu menangkap:

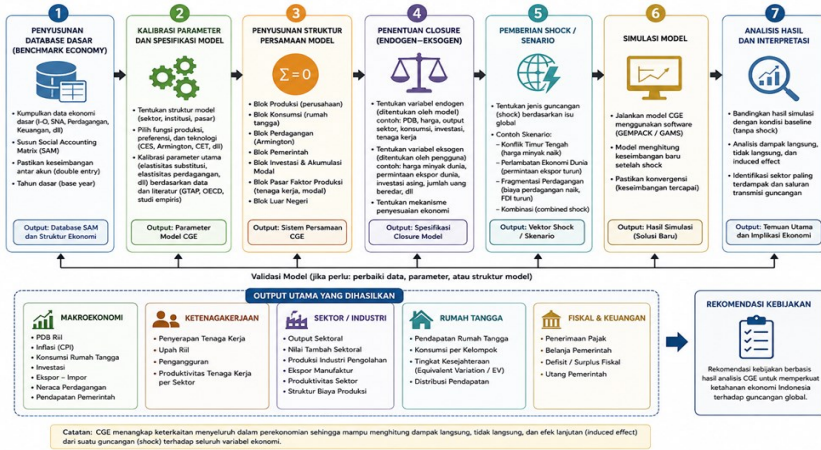
- Keterkaitan antarsektor ekonomi.
- Hubungan antara pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar modal, dan perdagangan internasional.
- Respons harga dan kuantitas secara simultan.
- Dampak langsung (direct effect), tidak langsung (indirect effect), dan efek lanjutan (induced effect).

Secara sederhana, CGE menjawab pertanyaan Jika terjadi suatu guncangan (shock) terhadap ekonomi, bagaimana seluruh sistem ekonomi akan menyesuaikan diri hingga mencapai keseimbangan baru? Dalam konteks Kajian Tengah Tahun INDEF 2026, model CGE digunakan untuk mengukur dampak berbagai guncangan global seperti:

- Skenario 1: Dampak Konflik Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga energi global.
- Skenario 2: Dampak Perlambatan ekonomi negara mitra utama Indonesia.
- Skenario 3: Fragmentasi perdagangan global dan disrupsi rantai pasok global

Dampak dari guncangan tersebut akan dapat dilihat dampaknya terhadap berbagai indikator ekonomi seperti PDB, inflasi, Investasi, Ekspor-impor, Ketenagakerjaan, dan Kinerja sektor industri.

ALUR KERJA ANALISIS CGE (COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM)



6.3. Dampak Guncangan Ekonomi Global Terhadap Perekonomian Indonesia

Guncangan ekonomi global—seperti perlambatan ekonomi negara mitra dagang, konflik geopolitik, kenaikan harga minyak, gangguan rantai pasok, perang tarif, dan volatilitas nilai tukar—dapat memengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur perdagangan, harga, investasi, fiskal, dan sektor keuangan. Dampaknya tidak selalu sama pada setiap sektor, tetapi secara umum meningkatkan ketidakpastian dan menekan ruang kebijakan domestik.

Tiga skenario berikut dapat digunakan sebagai kerangka simulasi CGE untuk menguji ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal pada 2026–2030. Ketiganya memiliki jalur transmisi yang berbeda: konflik Timur Tengah terutama melalui harga energi dan inflasi; perlambatan mitra melalui ekspor dan produksi; sedangkan fragmentasi perdagangan melalui biaya perdagangan, investasi, serta gangguan rantai pasok.

- Skenario 1: Dampak Konflik Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga energi global.
- Skenario 2: Dampak Perlambatan ekonomi negara mitra utama Indonesia.
- Skenario 3: Fragmentasi perdagangan global dan disrupsi rantai pasok global

Berdasarkan hasil simulasi CGE menunjukkan bahwa ketiga jenis guncangan ekonomi global—konflik Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi, perlambatan ekonomi negara mitra utama Indonesia, serta fragmentasi perdagangan global dan disrupsi rantai pasok—sama-sama memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, masing-masing skenario memiliki mekanisme transmisi, tingkat risiko, dan indikator makroekonomi yang paling terdampak secara berbeda. Secara umum, seluruh skenario menyebabkan pelemahan pertumbuhan PDB, penurunan upah riil, serta tekanan terhadap ekspor. Perbedaan utama terlihat pada besarnya dampak terhadap inflasi, investasi, dan impor. Skenario perlambatan ekonomi negara mitra menjadi skenario dengan tekanan paling besar terhadap ekspor dan pertumbuhan PDB, sedangkan konflik Timur Tengah memiliki risiko lebih tinggi terhadap inflasi, biaya energi, dan kebutuhan impor. Fragmentasi perdagangan global menimbulkan tekanan struktural yang lebih luas karena meningkatkan biaya perdagangan, mengganggu pasokan bahan baku dan komponen, serta menurunkan efisiensi industri domestik.

.Skenario 1: Konflik Timur Tengah dan lonjakan harga energi global

Pada skenario pertama, konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global memberikan tekanan melalui kenaikan harga minyak, gas, biaya transportasi, premi asuransi pelayaran, dan harga bahan baku berbasis energi. Dampak langsungnya tercermin pada kenaikan IHK sebesar 0,28 persen, yang menunjukkan bahwa inflasi domestik meningkat akibat naiknya biaya produksi dan distribusi. Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada konsumsi rumah tangga melalui kenaikan harga BBM, transportasi, dan pangan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional sektor industri, terutama industri yang intensif energi seperti transportasi, manufaktur, kimia, logam dasar, semen, makanan-minuman, dan pertanian.

Tekanan inflasi tersebut kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari penurunan upah riil sebesar 0,26 persen. Meskipun upah nominal tidak selalu turun secara langsung, kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan kemampuan konsumsi pekerja melemah. Rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok rentan akan menjadi kelompok yang paling terdampak karena proporsi pengeluaran mereka untuk pangan,

transportasi, dan energi relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Dalam kondisi ini, peningkatan inflasi dapat mengurangi konsumsi riil dan memperlemah permintaan domestik.

Dampak konflik Timur Tengah terhadap pertumbuhan PDB diperkirakan sebesar -0,21 persen (Tabel 6.1). Penurunan ini relatif lebih kecil dibandingkan skenario perlambatan ekonomi negara mitra, tetapi sifat risikonya lebih kompleks karena berkaitan dengan stabilitas harga, tekanan fiskal, dan ketahanan energi. Kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah apabila harga BBM domestik ditahan. Sebaliknya, apabila harga energi domestik disesuaikan, inflasi dapat meningkat lebih tinggi dan daya beli masyarakat akan semakin tertekan. Oleh karena itu, konflik energi global menciptakan dilema kebijakan antara menjaga stabilitas fiskal dan menjaga daya beli masyarakat.

Ekspor diperkirakan turun sebesar 2,44 persen. Penurunan ekspor terjadi karena kenaikan biaya produksi dan logistik mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sektor manufaktur berorientasi ekspor menghadapi kenaikan harga input energi dan bahan baku, sementara permintaan global juga dapat melemah akibat kenaikan harga energi secara internasional. Namun demikian, dampak terhadap ekspor dapat berbeda antar sektor. Komoditas energi seperti batu bara dan beberapa produk mineral berpotensi memperoleh manfaat dari kenaikan harga global, tetapi keuntungan tersebut belum tentu cukup untuk menutup pelemahan sektor manufaktur, pertanian, dan industri pengolahan.

Impor pada skenario ini justru meningkat cukup besar sebesar 7,8 persen. Kenaikan ini terutama dapat dijelaskan oleh peningkatan nilai impor energi, bahan bakar, produk minyak, LPG, petrokimia, dan input produksi yang harganya naik akibat lonjakan harga energi global. Dengan demikian, peningkatan impor bukan mencerminkan penguatan aktivitas produksi, melainkan kenaikan biaya impor akibat memburuknya *terms of trade*. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan migas dan meningkatkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan. Investasi masih meningkat sebesar 1,2 persen, tetapi peningkatan tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Investasi yang meningkat bukan berarti kondisi ekonomi

membalik secara keseluruhan, melainkan dapat mencerminkan kebutuhan penyesuaian modal untuk menjaga kapasitas produksi, penggantian mesin dan peralatan yang lebih hemat energi, investasi pada infrastruktur energi, atau peningkatan kebutuhan modal kerja akibat kenaikan biaya input. Dengan kata lain, investasi meningkat tetapi tidak cukup kuat untuk mengimbangi dampak negatif terhadap PDB dan daya beli.

Skenario 2: Perlambatan ekonomi negara mitra utama Indonesia

Skenario kedua merupakan skenario yang paling besar menekan kinerja ekspor Indonesia. Perlambatan ekonomi negara mitra utama, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, ASEAN, Uni Eropa, India, dan Korea Selatan, menyebabkan permintaan impor terhadap produk Indonesia menurun. Dampaknya terlihat dari penurunan ekspor sebesar 5,05 persen, yang merupakan kontraksi paling dalam dibandingkan dua skenario lainnya. Penurunan tersebut menunjukkan tingginya sensitivitas Indonesia terhadap kondisi ekonomi global, terutama terhadap permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama.

Ketika permintaan ekspor menurun, industri domestik yang berorientasi ekspor akan mengurangi produksi. Dampak ini terutama dirasakan oleh sektor pertambangan, batu bara, kelapa sawit, logam dasar, kimia, tekstil, alas kaki, elektronik, otomotif, furnitur, serta produk makanan olahan. Penurunan pesanan ekspor tidak hanya menekan perusahaan besar, tetapi juga rantai pasok domestik yang terdiri dari usaha kecil, pemasok bahan baku, perusahaan logistik, dan tenaga kerja di sektor manufaktur. Dengan demikian, perlambatan mitra dagang dapat menghasilkan efek berantai yang cukup luas terhadap perekonomian nasional.

Pertumbuhan PDB diperkirakan menurun sebesar 0,24 persen, menjadikannya dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dua skenario lain. Pelemahan PDB terjadi karena ekspor merupakan salah satu sumber permintaan agregat. Ketika ekspor turun, output industri menurun, pendapatan perusahaan melemah, permintaan tenaga kerja berkurang, dan konsumsi rumah tangga ikut tertekan. Dampak ini dapat menjadi lebih besar apabila perlambatan terjadi secara bersamaan di berbagai negara mitra utama, terutama jika disertai penurunan harga komoditas dunia.

Upah riil turun sebesar 0,29 persen, yang merupakan penurunan terdalam dibandingkan skenario lainnya. Penurunan upah riil mencerminkan melemahnya permintaan tenaga kerja pada sektor-sektor ekspor. Perusahaan dapat menahan kenaikan upah, mengurangi bonus, menurunkan jam kerja, atau mengurangi jumlah pekerja kontrak. Dalam kondisi tertentu, pekerja informal dan pekerja dengan keterampilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan karena mereka memiliki perlindungan pendapatan yang lebih terbatas. Penurunan upah riil kemudian mengurangi konsumsi rumah tangga dan memperdalam perlambatan ekonomi domestik.

Inflasi pada skenario ini hanya meningkat sebesar 0,11 persen, lebih rendah dibandingkan dua skenario lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlambatan permintaan global lebih dominan menghasilkan tekanan disinflasi dibandingkan tekanan inflasi. Ketika ekspor dan produksi melemah, permintaan terhadap energi, bahan baku, dan barang konsumsi ikut menurun. Namun, inflasi tetap meningkat secara terbatas karena penurunan penerimaan devisa ekspor dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah akan meningkatkan harga barang impor dan bahan baku industri, sehingga inflasi tidak sepenuhnya turun.

Impor menurun sebesar 0,23 persen, mencerminkan berkurangnya kebutuhan bahan baku, komponen, dan barang modal untuk mendukung produksi industri ekspor. Namun, penurunan impor yang relatif kecil dibandingkan penurunan ekspor menunjukkan bahwa neraca perdagangan berpotensi memburuk. Ekspor turun jauh lebih besar daripada impor, sehingga surplus perdagangan dapat menyempit atau defisit perdagangan berisiko melebar. Investasi masih tumbuh sebesar 0,36 persen, tetapi pertumbuhan investasi ini sangat terbatas dan menunjukkan perlambatan. Dalam konteks ini, investasi dapat tetap meningkat karena adanya proyek yang sudah berjalan, belanja modal pemerintah, atau investasi substitusi pasar domestik. Namun, laju investasi yang hanya tumbuh tipis mengindikasikan bahwa dunia usaha cenderung menunda ekspansi akibat ketidakpastian permintaan global.

Skenario 3: Fragmentasi perdagangan global dan disrupsi rantai pasok

Skenario ketiga menggambarkan meningkatnya fragmentasi perdagangan global, seperti kenaikan tarif, hambatan non-tarif, pembatasan ekspor, kebijakan *friend-shoring*, relokasi rantai pasok, serta gangguan jalur pelayaran dan distribusi internasional. Berbeda dengan skenario perlambatan ekonomi mitra yang terutama menekan permintaan ekspor, fragmentasi perdagangan lebih banyak memengaruhi sisi penawaran ekonomi melalui peningkatan biaya perdagangan, kelangkaan input, keterlambatan pasokan, dan penurunan produktivitas industri.

Pada skenario ini, inflasi meningkat sebesar 0,18 persen. Kenaikan inflasi terjadi karena biaya impor bahan baku, komponen, mesin, dan barang modal meningkat. Industri Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap input impor, terutama pada sektor elektronik, otomotif, mesin, farmasi, kimia, plastik, tekstil, dan logam. Ketika rantai pasok global terganggu, perusahaan harus mencari pemasok alternatif dengan harga lebih mahal atau waktu pengiriman yang lebih panjang. Kenaikan biaya ini kemudian diteruskan ke harga jual produk domestik, sehingga inflasi meningkat meskipun permintaan agregat tidak terlalu kuat.

Upah riil turun sebesar 0,23 persen. Penurunan ini terjadi karena perusahaan menghadapi tekanan biaya produksi yang lebih tinggi, sementara kemampuan untuk menaikkan harga jual terbatas akibat daya beli masyarakat yang melemah. Untuk menjaga profitabilitas, perusahaan dapat menekan biaya tenaga kerja, menunda perekrutan, mengurangi jam kerja, atau menahan kenaikan upah. Walaupun penurunan upah riil lebih kecil dibandingkan skenario perlambatan mitra, dampaknya dapat berlangsung lebih lama karena fragmentasi perdagangan berpotensi menjadi fenomena struktural, bukan hanya shock jangka pendek.

Ekspor turun sebesar 1,16 persen. Penurunan ekspor ini lebih kecil dibandingkan skenario perlambatan mitra karena permintaan eksternal tidak sepenuhnya hilang. Namun, daya saing ekspor Indonesia menurun akibat kenaikan biaya logistik, tarif, hambatan teknis, serta kesulitan memperoleh bahan baku dan komponen. Sektor yang paling terdampak adalah industri yang terintegrasi dalam rantai nilai global, seperti elektronik, otomotif, tekstil, kimia, alat mesin, dan produk manufaktur berbasis komponen impor. Dalam

jangka panjang, fragmentasi perdagangan dapat mengurangi peluang Indonesia untuk meningkatkan posisi dalam rantai pasok global apabila industri domestik tidak mampu memperkuat kapasitas produksi dan substitusi input.

Impor turun sebesar 0,30 persen, yang mencerminkan berkurangnya akses terhadap input impor serta meningkatnya biaya perdagangan. Penurunan impor dalam kondisi ini tidak selalu merupakan hal positif, karena dapat menunjukkan terbatasnya pasokan bahan baku dan komponen untuk industri domestik. Apabila impor bahan baku turun akibat hambatan perdagangan, kapasitas produksi sektor manufaktur dapat ikut melemah. Oleh sebab itu, penurunan impor pada skenario fragmentasi perdagangan perlu dibedakan dari penurunan impor akibat peningkatan substitusi domestik yang produktif.

Tabel 6.1. Dampak Guncangan Ekonomi Global Terhadap Indikator Makro Ekonomi Indonesia (dalam persen)

Indikator	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3
IHK	0.28	0.11	0.18
Upah Riil	-0.26	-0.29	-0.23
Investasi	1.2	0.36	0.07
Ekspor	-2.44	-5.05	-1.16
Impor	7.8	-0.23	-0.3
Pertumbuhan PDB	-0.21	-0.24	-0.17

Keterangan :

Skenario 1: Dampak Konflik Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga energi global.

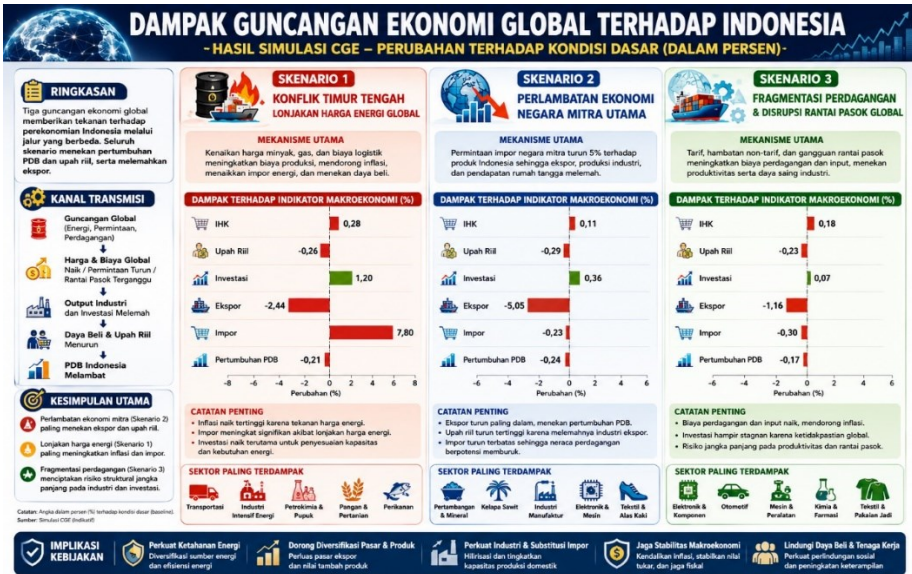
Skenario 2: Dampak Perlambatan ekonomi negara mitra utama Indonesia.

Skenario 3: Fragmentasi perdagangan global dan disrupsi rantai pasok global

Investasi masih tumbuh sebesar 0,07 persen, tetapi hampir stagnan. Pertumbuhan investasi yang sangat kecil menunjukkan bahwa pelaku usaha menahan ekspansi karena ketidakpastian kebijakan perdagangan global, risiko keterlambatan bahan baku, dan ketidakjelasan akses pasar ekspor. Dalam situasi seperti ini, investor cenderung memilih strategi menunggu,

memperpendek rantai pasok, atau memindahkan investasi ke negara yang memiliki akses pasar lebih pasti dan biaya logistik lebih rendah. Pertumbuhan PDB turun sebesar 0,17 persen, lebih kecil dibandingkan dua skenario lainnya, tetapi dampak jangka panjangnya dapat lebih besar apabila fragmentasi perdagangan berlangsung terus-menerus. Risiko utamanya bukan hanya penurunan output jangka pendek, tetapi juga tertahannya transformasi industri, investasi teknologi, dan peningkatan produktivitas nasional.

Ketiga skenario menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih rentan terhadap guncangan eksternal, meskipun jalur transmisinya berbeda. Konflik Timur Tengah terutama menciptakan risiko inflasi, kenaikan impor energi, tekanan fiskal, dan pelemahan daya beli. Perlambatan ekonomi negara mitra utama menjadi risiko terbesar terhadap ekspor, pertumbuhan PDB, upah riil, dan aktivitas industri berorientasi ekspor. Sementara itu, fragmentasi perdagangan global dan disrupsi rantai pasok menciptakan risiko jangka panjang terhadap produktivitas industri, biaya produksi, investasi, dan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.



Secara kebijakan, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi, memperluas diversifikasi pasar ekspor, memperdalam hilirisasi industri, mempercepat substitusi impor bahan baku strategis, serta memperkuat

konektivitas logistik nasional. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi pangan dan energi, serta memberikan dukungan kepada sektor manufaktur yang paling terdampak. Dalam jangka panjang, penguatan industri domestik, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan diversifikasi rantai pasok menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya mampu bertahan terhadap guncangan global, tetapi juga mampu memanfaatkan perubahan struktur perdagangan dunia sebagai peluang pertumbuhan baru.

BAB 7.

PENUTUP: REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI KETAHANAN

7.1. Kesimpulan

Kajian Tengah Tahun 2026 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam fase pengujian ketahanan yang semakin kompleks. Guncangan geopolitik, fragmentasi perdagangan global, volatilitas harga energi dan komoditas, serta risiko perubahan iklim tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat melalui jalur perdagangan, harga, nilai tukar, fiskal, investasi, produksi industri, dan kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan semata mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut tetap mampu menciptakan stabilitas harga, lapangan kerja, daya beli, dan fondasi transformasi ekonomi jangka panjang.

Pertama, ketahanan makroekonomi Indonesia masih relatif terjaga, tetapi bersifat resiliensi defensif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal 2026 belum sepenuhnya mencerminkan penguatan fundamental karena masih ditopang oleh faktor musiman konsumsi Ramadan–Lebaran, percepatan belanja pemerintah, dan efek basis yang rendah. Di sisi lain, tekanan terhadap nilai tukar, cadangan devisa, surplus perdagangan, inflasi pangan, serta ruang fiskal menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia dalam menyerap guncangan eksternal masih terbatas. Ketahanan ekonomi perlu dibangun bukan hanya melalui stabilisasi jangka pendek, tetapi juga melalui penguatan struktur produksi, fiskal, dan perdagangan.

Kedua, kenaikan harga energi global menjadi kanal risiko paling cepat bagi Indonesia. Sebagai negara net importir minyak, lonjakan harga minyak dan depresiasi rupiah meningkatkan biaya impor energi, memperbesar risiko subsidi dan kompensasi energi, serta menekan neraca perdagangan migas. Dampak tersebut kemudian menjalar ke biaya transportasi, harga pangan,

biaya produksi industri, dan inflasi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan energi nasional tidak dapat lagi hanya bergantung pada kebijakan subsidi, tetapi harus ditopang oleh percepatan diversifikasi energi, efisiensi energi, dan pengurangan ketergantungan terhadap BBM impor.

Ketiga, sektor pangan menghadapi risiko ganda dari perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global. Potensi El Niño, kekeringan, gangguan distribusi pupuk, serta kenaikan biaya logistik dapat meningkatkan volatilitas harga pangan dan menekan daya beli masyarakat. Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi nasional, tetapi juga dari kemampuan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, stabilitas harga, dan keberlanjutan produksi pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Keempat, industri manufaktur menghadapi tekanan biaya yang serius akibat tingginya ketergantungan pada impor bahan baku, komponen, mesin, dan energi. Ketika harga energi global meningkat, nilai tukar melemah, dan jalur perdagangan terganggu, industri domestik menghadapi kenaikan biaya produksi serta risiko penurunan utilisasi kapasitas. Sektor-sektor seperti kimia, farmasi, tekstil, elektronik, otomotif, mesin, plastik, dan karet menjadi kelompok yang paling rentan. Jika tidak direspons dengan kebijakan industri yang terarah, tekanan tersebut dapat mempercepat deindustrialisasi prematur, mengurangi investasi, dan melemahkan penciptaan lapangan kerja formal.

Kelima, dampak guncangan global tidak berhenti pada indikator makroekonomi, tetapi berpotensi memperlebar tekanan kesejahteraan. Kelompok miskin rentan terhadap inflasi pangan dan energi, sedangkan kelompok kelas menengah menghadapi risiko penurunan daya beli, kenaikan biaya hidup, keterbatasan akses pembiayaan, dan ketidakpastian pasar kerja. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan PDB, tetapi juga pada kemampuan menjaga kualitas hidup masyarakat dan mencegah penurunan kelas menengah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 diperkirakan melambat ke kisaran 5,0 persen secara tahunan. Perlambatan tersebut mencerminkan normalisasi konsumsi setelah Ramadan–Lebaran, meningkatnya tekanan harga energi dan pangan, pelemahan nilai tukar

rupiah, serta kenaikan biaya produksi akibat ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku dan energi. Dengan demikian, Triwulan II-2026 menjadi periode penting untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah memburuknya risiko global dan terbatasnya ruang fiskal. Prediksi ini konsisten dengan temuan Kajian Tengah Tahun INDEF pada 2026 bahwa Indonesia memasuki Triwulan II dengan kondisi “resiliensi defensif”: masih mampu tumbuh, tetapi belum memiliki fondasi struktural yang cukup kuat untuk menyerap guncangan global secara berkelanjutan

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal untuk bertahan menghadapi guncangan global, namun belum sepenuhnya memiliki fondasi struktural yang kuat untuk mengubah krisis menjadi peluang. Ketergantungan pada impor energi dan bahan baku, lemahnya diversifikasi ekspor, terbatasnya ruang fiskal, serta tingginya sensitivitas terhadap sentimen global menjadi kerentanan utama yang harus segera dibenahi. Kajian ini juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi perlu bergerak dari pendekatan responsif menuju pendekatan transformasional: dari sekadar meredam gejolak menuju membangun ketahanan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

7.2. Rekomendasi Kebijakan: Strategi Ketahanan Ekonomi

1. Memperkuat stabilisasi makroekonomi dan kredibilitas kebijakan

Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan perdagangan untuk menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, cadangan devisa, serta ekspektasi pelaku usaha. Kebijakan stabilisasi harus diarahkan untuk mengurangi ketidakpastian, bukan sekadar merespons gejolak setelah terjadi. Pemerintah perlu memastikan konsistensi regulasi, kepastian hukum investasi, serta komunikasi kebijakan yang kredibel agar kepercayaan dunia usaha dan pasar keuangan dapat terjaga.

2. Mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan produktif

Kebijakan subsidi energi perlu direformasi secara bertahap agar tidak terus menjadi sumber tekanan fiskal ketika harga minyak global meningkat. Perlindungan terhadap kelompok miskin dan rentan tetap harus dijaga, tetapi subsidi berbasis komoditas perlu secara bertahap dialihkan menjadi bantuan

yang lebih tepat sasaran berbasis data penerima manfaat. Dengan demikian, kebijakan energi tidak hanya berfungsi menjaga harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

3. Mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM

Pemerintah perlu menjadikan krisis energi 2026 sebagai momentum percepatan transisi energi. Prioritas kebijakan harus diarahkan pada peningkatan investasi energi terbarukan, khususnya tenaga surya, panas bumi, hidro, bioenergi berkelanjutan, serta sistem penyimpanan energi. Transisi energi harus diposisikan bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi sebagai strategi ketahanan fiskal, ketahanan industri, dan ketahanan neraca pembayaran.

4. Membangun sistem ketahanan pangan yang berbasis produksi, distribusi, dan adaptasi iklim

Pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan melalui pendekatan dari hulu hingga hilir. Fokus kebijakan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada stabilitas distribusi, pengendalian harga, penguatan cadangan pangan, dan mitigasi risiko iklim. Kebijakan pangan juga harus memperkuat perlindungan konsumen, terutama rumah tangga berpendapatan rendah dan kelas menengah yang paling cepat terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok.

5. Memperkuat struktur industri dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku

Strategi industrialisasi Indonesia perlu bergeser dari sekadar ekspansi kapasitas menuju penguatan kedalaman struktur industri. Pemerintah perlu mengidentifikasi bahan baku, komponen, mesin, dan teknologi yang paling strategis untuk dikembangkan di dalam negeri, terutama pada sektor kimia, farmasi, elektronik, otomotif, mesin, tekstil, pangan olahan, dan energi terbarukan. Kebijakan substitusi impor harus dilakukan secara selektif, berbasis daya saing, dan terhubung dengan strategi ekspor agar tidak menghasilkan industri domestik yang tidak efisien.

6. Mendorong diversifikasi ekspor dan integrasi rantai pasok regional

Fragmentasi perdagangan global perlu dipandang sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok regional. Indonesia perlu memperluas pasar ekspor ke Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, sekaligus meningkatkan keterhubungan dengan jaringan produksi ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik.

7. Melindungi daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah

Kebijakan perlindungan sosial perlu bergerak dari pendekatan statis menuju sistem yang adaptif terhadap gejolak harga, risiko kehilangan pekerjaan, dan perlambatan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bantuan sosial dapat diperluas secara cepat ketika terjadi lonjakan inflasi pangan, kenaikan harga energi, atau pelemahan pasar kerja. Ketahanan ekonomi harus diukur dari kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi, pekerjaan, dan kualitas hidup di tengah tekanan eksternal.

8. Mengintegrasikan kebijakan ketahanan ekonomi dalam satu kerangka nasional

Pemerintah perlu menyusun Strategi Ketahanan Ekonomi Nasional 2026–2030 yang mengintegrasikan kebijakan pangan, energi, industri, perdagangan, fiskal, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Strategi ini perlu memiliki indikator kinerja yang jelas, mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta sistem pemantauan risiko secara berkala.

Pada akhirnya, Indonesia perlu memandang guncangan global 2026 bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi. Ketahanan yang sesungguhnya bukan hanya kemampuan bertahan ketika krisis datang, melainkan kemampuan untuk membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri, produktif, hijau, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Advanced Biofuels USA. (t.t.). *Indonesia's B50 biofuel rollout faces uncertainty amid palm oil supply woes*. Diakses dari <https://advancedbiofuelsusa.info/>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik industri manufaktur Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Berita resmi statistik: Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2026*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Berita resmi statistik: Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Januari–April 2026*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Indeks harga konsumen dan inflasi Indonesia 2026*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia 2026*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2026). *Laporan perekonomian Indonesia 2026*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026). *Laporan kebijakan moneter 2026*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026). *Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. *American Economic Review*, 112(4), 1194–1225. <https://doi.org/10.1257/aer.20191823>
- Centre for Research on Energy and Clean Air. (2025a, September). *Indonesia's RUPTL 2025–2034: Fossils first, renewables later*. CREA. <https://energyandcleanair.org/publication/indonesias-ruptl-2025-2034-fossils-first-renewables-later/>
- Centre for Research on Energy and Clean Air. (2025b, November). *Indonesia's RUPTL outlines faster growth in fossil fuel use, downgrades ambition for clean energy*. CREA.

<https://energyandcleanair.org/publication/indonesias-ruptl-outlines-faster-growth-in-fossil-fuel-use-downgrades-ambition-for-clean-energy/>

CEIC. (2026). *Indonesia macroeconomic database*. CEIC Data.

Chicago Policy Review. (2025, Februari 6). *The country of perpetual potential: Indonesia's barriers in renewable energy transition*. <https://chicagopolicyreview.org>

CNBC Indonesia. (2026, Maret 4). *Purbaya jamin subsidi BBM tak jebol di 2026 meski ada perang Iran*. <https://www.cnbcindonesia.com>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2026). *Peran penting APBN dalam menjaga stabilitas harga BBM*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id>

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. (2026, April 6). *Pemerintah pastikan harga BBM subsidi tidak naik, APBN 2026 tetap terjaga*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id>

East Asia Forum. (2025, Agustus 1). *Indonesia's biofuel bet risks backfiring*. <https://eastasiaforum.org>

East Asia Forum. (2026, Januari 2). *Liberalisation alone won't power Indonesia's energy transition*. <https://eastasiaforum.org>

Ember. (2024, Oktober). *Indonesia's expansion of clean power can spur growth and equality*. <https://ember-energy.org/app/uploads/2024/10/EN-Report-Indonesias-expansion-of-clean-power-can-spur-growth-and-equality.pdf>

Federal Reserve Bank of New York. (2026). *Global supply chain pressure index*. <https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi>

Food and Agriculture Organization. (2026). *FAO cereal supply and demand brief*. Rome: FAO.

Food and Agriculture Organization. (2026). *Food outlook: Biannual report on global food markets*. Rome: FAO.

International Energy Agency. (2022). *An energy sector roadmap to net zero emissions in Indonesia*. Paris: IEA. <https://doi.org/10.1787/4a9e9439-en>

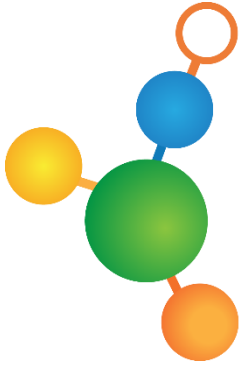
- International Energy Agency. (2025). *World energy investment 2025: Southeast Asia*. Paris: IEA. <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2025/southeast-asia>
- International Energy Agency. (2026). *2026 energy crisis policy response tracker*. <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/2026-energy-crisis-policy-response-tracker>
- International Energy Agency. (t.t.). *Enhancing Indonesia's power system: Executive summary*. <https://www.iea.org/reports/enhancing-indonesias-power-system/executive-summary>
- International Energy Agency. (t.t.). *Indonesia country profile*. <https://www.iea.org/countries/indonesia>
- International Monetary Fund. (2026). *World economic outlook: April 2026*. Washington, DC: IMF.
- International Renewable Energy Agency. (2024, September). *Renewable power generation costs in 2023*. Abu Dhabi: IRENA. <https://www.irena.org/Publications/2024/Sep/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2023>
- Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2024, Juli). *Unlocking Indonesia's renewable energy investment potential*. <https://ieefa.org/sites/default/files/2024-07/IEEFA%20Report%20-%20Unlocking%20Indonesia%27s%20renewable%20energy%20investment%20potential%20July2024.pdf>
- Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2025a, Juni). *The risks of fossil fuel dependence in Indonesia's electricity supply business plan (RUPTL) 2025–2034*. <https://ieefa.org/resources/risks-fossil-fuel-dependence-indonesias-electricity-supply-business-plan-ruptl-2025-0>
- Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2025b, Desember). *After years at an energy crossroads, can Indonesia pivot in 2026?* <https://ieefa.org/resources/after-years-energy-crossroads-can-indonesia-pivot-2026>

- Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2025c, Desember). *Building credibility in Indonesia's energy transition: Insights from the ETM and JETP Indonesia*. <https://ieefa.org/resources/building-credibility-indonesias-energy-transition-insights-etm-and-jetp-indonesia>
- Institute for Essential Services Reform. (2024, Desember). *Indonesia energy transition outlook 2025*. Jakarta: IESR. <https://iesr.or.id>
- Indonesia Investments. (2025, September 19). *Update on Indonesia's biodiesel program: B50 stage to be delayed?* <https://www.indonesia-investments.com>
- INDEF. (2026). *Kajian Tengah Tahun 2026: Menavigasi guncangan global—Menguji ketahanan ekonomi Indonesia*. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance.
- J.P. Morgan. (2026). *Food security under pressure: Climate risks, commodity prices and global food supply*. <https://www.jpmorgan.com/insights/sustainability/climate/food-security-under-pressure>
- Judijanto, L. (2026). The biodiesel paradox: Analyzing the multi-dimensional challenges of Indonesia's B50 mandate implementation. *Engineering and Technology Journal*, 11(2).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). *Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). *Rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN 2025–2034*. Jakarta: Kementerian ESDM. <https://web.pln.co.id/stakeholder/ruptl>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026). *Siaran pers: Implementasi B50 dan dampak ekonomi*. Jakarta: Kementerian ESDM.

- Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia. (2026). *Realisasi investasi Indonesia tahun 2026*. Jakarta: Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0d55974c-45ad-48f4-8db3-3804b37d195e/Buku-II-Nota-Kuangan-RAPBN-TA-2026.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026a). *APBN KITA: Kinerja dan fakta, edisi Maret 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026b). *APBN KITA: Kinerja dan fakta, edisi April 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026c). *APBN KITA: Kinerja dan fakta, edisi Mei 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). *Outlook komoditas pertanian strategis Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, April 7). *Pemerintah pastikan harga BBM subsidi tidak naik, APBN 2026 tetap terjaga*. <https://www.setneg.go.id>
- Modern Diplomacy. (2026, April 21). *Indonesia talks energy transition, but why does coal still rule?* <https://moderndiplomacy.eu>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *OECD economic outlook 2026*. Paris: OECD.
- Pajakku.com. (2026). *Pemerintah pastikan harga BBM bersubsidi tetap hingga akhir 2026*. <https://pajakku.com>
- Pilot Energy. (2026, Maret 18). *How Middle East geopolitics could reshape global energy prices in Q2 2026*. <https://pilotenergy.com>
- Policy Center for the New South. (2026, Januari 20). *What 2025–2026 tells us about the future of global energy*. <https://www.policycenter.ma>
- RBC Capital Markets. (2025, Desember 19). *2026 global energy outlook: Selective by design*. <https://www.rbccm.com>

- Rystad Energy. (2026, Januari 12). *Expectations and realities: 12 predictions for the year ahead in energy*. <https://www.rystadenergy.com>
- S&P Global Commodity Insights. (2025, Desember 23). *Indonesia keeps 2026 biodiesel quota flat, raising doubts over B50 target*. <https://www.spglobal.com>
- ScienceDirect/Elsevier. (2026). Toward a just and robust energy transition in Indonesia: A multi-scale, multi-dimensional assessment. *Environmental Research*. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2026.007784>
- Talattov, A., Kusumanegara, A. U., Hudaya, A., Nur'aeni, A., Rahmawati, L. S., & Taqy, Y. (2026a). *Monitoring issue of food, energy and sustainable development: Ujian ketahanan energi dan pangan Indonesia di tengah eskalasi perang di Timur Tengah* (Edisi Februari 2026). Jakarta: Center of Food, Energy and Sustainable Development, INDEF.
- Talattov, A., Kusumanegara, A. U., Hudaya, A., Nur'aeni, A., Rahmawati, L. S., & Taqy, Y. (2026b). *Monitoring issue of food, energy and sustainable development: Menguji retorika swasembada pangan di tengah tekanan harga energi global* (Edisi Mei 2026). Jakarta: Center of Food, Energy and Sustainable Development, INDEF.
- Tempo.co. (2026, April 17). *Alasan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026*. <https://www.tempo.co>
- Transisi Energi Berkeadilan. (t.t.). *Mengenal bentuk subsidi energi di Indonesia*. <https://transisienergiberkeadilan.id>
- United Nations Comtrade. (2026). *UN Comtrade database*. <https://comtradeplus.un.org>
- United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. (2026). *Production, supply and distribution database*. <https://www.fas.usda.gov/data/production>
- U.S. Energy Information Administration. (2025, Agustus 6). *Petroleum prices reacted to economic and geopolitical uncertainty in Q2 2025*. <https://www.eia.gov>

- World Bank. (2024). *Indonesia's fuel subsidies reforms*. Washington, DC: World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099748505212431959/pdf/IDU1e31e5e531f16114baa1b62c1b3201c9c2e68.pdf>
- World Bank. (2026a, April 28). *Commodity markets outlook, April 2026*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2026b). *Strait of Hormuz disruption sends oil prices surging*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org>
- World Bank. (2026c). *The commodity markets outlook in eight charts*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org>
- World Bank. (2026d). *East Asia and Pacific economic update, April 2026*. Washington, DC: World Bank.
- World Meteorological Organization. (2026). *El Niño/La Niña update 2026*. Geneva: WMO.
- World Uncertainty Index. (2026). *World uncertainty index database*. <https://worlduncertaintyindex.com>
- Yustika, M. (2026, April 2). *Advancing Indonesia's 100GW solar program through de-dieselization for energy security*. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. <https://ieefa.org/resources/advancing-indonesias-100gw-solar-program-through-de-dieselization-energy-security>



P U P U K
INDONESIA
H O L D I N G C O M P A N Y



**LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN**

Buku *Menavigasi Guncangan Global: Menguji Ketahanan Ekonomi Indonesia* mengangkat kondisi ekonomi dunia yang dibayangi oleh tiga tekanan utama, yaitu eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan dan rantai pasok global, serta risiko perubahan iklim. Konflik di Timur Tengah dan gangguan jalur strategis Selat Hormuz meningkatkan volatilitas harga energi serta biaya logistik internasional. Di saat yang sama, kecenderungan reshoring, friend-shoring, dan proteksionisme memperbesar risiko perlambatan perdagangan dunia dan mengubah peta rantai pasok global.

Bagi Indonesia, gejala tersebut ditransmisikan melalui kenaikan harga energi, biaya impor bahan baku, pelemahan perdagangan, tekanan nilai tukar, dan meningkatnya ketidakpastian investasi. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia menghadapi risiko peningkatan impor migas, tekanan terhadap neraca perdagangan, kenaikan subsidi energi, serta penyempitan ruang fiskal. Ketergantungan industri pada bahan baku dan barang penolong impor juga membuat sektor manufaktur rentan terhadap keterlambatan pasokan dan kenaikan biaya produksi.

Walaupun ekonomi Indonesia tumbuh kuat pada triwulan I-2026, pertumbuhan tersebut masih banyak ditopang oleh konsumsi musiman Ramadan–Lebaran dan percepatan belanja pemerintah. Di balik capaian tersebut, terdapat sejumlah sinyal kerentanan, antara lain meningkatnya pembiayaan anggaran, tekanan inflasi, pelemahan rupiah, penurunan cadangan devisa, serta menyusutnya surplus perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia masih bersifat defensif dan belum sepenuhnya didukung oleh fondasi struktural yang kuat.

Sektor industri menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena tingginya ketergantungan terhadap energi fosil dan bahan baku impor. Industri otomotif, tekstil, elektronik, mesin, kimia, farmasi, plastik, dan karet berpotensi menghadapi kenaikan biaya input, penurunan margin usaha, perlambatan investasi, serta risiko pengurangan kapasitas produksi dan tenaga kerja. Tekanan tersebut juga dapat diteruskan kepada masyarakat melalui kenaikan harga barang, inflasi, dan penurunan daya beli, terutama bagi kelompok kelas menengah yang rentan terhadap kenaikan biaya hidup dan risiko kehilangan pekerjaan.

Buku ini menegaskan perlunya respons kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga pada penguatan ketahanan struktural. Prioritas kebijakan mencakup pengurangan ketergantungan impor energi dan bahan baku, penguatan industri hulu dan komponen domestik, diversifikasi pasar ekspor dan sumber impor, perbaikan logistik, penguatan cadangan strategis, serta perlindungan daya beli masyarakat. Dengan strategi yang adaptif dan berbasis bukti, gejala global dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.